

MEDIA INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN JAWA TIMUR

SDM PLUS

ISSN : 2355-1164



9 772355 116002

EDISI: 243 (TRIWULAN III/2023)

DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT KE 78 PROVINSI JAWA TIMUR

JOB FAIR



KHOFIFAH INДАР PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur



**Banyak Pilihan
Kejuruan Pelatihan
di BLK**

**BPJamsostek Jatim
Tambah Peserta
Pekerja Rentan**

**Cegah TPPO di Jatim,
Kemlu Gelar Rakor**

Dorong Masyarakat Merdeka Berkarir

**Padat Karya
Jadi Pilihan
Turunkan TPT
Kabupaten/Kota**



Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur (Feb)	3,77	3,60	5,17	4,81
Jawa Timur (Agt)	3,82	5,84	5,74	5,49
Kab. Pacitan	0,95	2,28	2,04	3,65
Kab. Ponorogo	3,58	4,45	4,38	5,51
Kab. Trenggalek	3,43	4,11	3,53	5,37
Kab. Tulungagung	3,36	4,61	4,91	6,65
Kab. Blitar	3,11	3,82	3,66	5,45
Kab. Kediri	3,68	5,24	5,15	6,83
Kab. Malang	3,82	5,49	5,4	6,57
Kab. Lumajang	2,81	3,36	3,51	4,97
Kab. Jember	3,8	5,12	5,44	4,06
Kab. Banyuwangi	4,08	5,34	5,42	5,26
Kab. Bondowoso	2,96	4,13	4,46	4,32
Kab. Situbondo	2,82	3,85	3,68	3,38
Kab. Probolinggo	3,88	4,86	4,55	3,25
Kab. Pasuruan	5,42	6,24	6,03	5,91
Kab. Sidoarjo	4,72	10,97	10,87	8,8
Kab. Mojokerto	3,68	5,75	5,54	4,83
Kab. Jombang	4,39	7,48	7,09	5,47
Kab. Nganjuk	3,22	4,8	4,98	4,74
Kab. Madiun	3,62	4,8	4,99	5,84
Kab. Magetan	3,08	3,74	3,86	4,33
Kab. Ngawi	3,7	5,44	4,25	2,48
Kab. Bojonegoro	3,7	4,92	4,82	4,69
Kab. Tuban	2,76	4,81	4,68	4,54
Kab. Lamongan	4	5,13	4,9	6,05
Kab. Gresik	5,54	8,21	8	7,84
Kab. Bangkalan	5,84	8,77	8,07	8,05
Kab. Sampang	2,81	3,35	3,45	3,11
Kab. Pamekasan	2,32	3,49	3,1	1,4
Kab. Sumenep	2,17	2,84	2,31	1,36
Kota Kediri	4,22	6,21	6,37	4,38
Kota Blitar	4,64	6,68	6,61	5,39
Kota Malang	6,04	9,61	9,65	7,66
Kota Probolinggo	4,41	6,7	6,55	4,57
Kota Pasuruan	5,06	6,33	6,23	6,18
Kota Mojokerto	2,65	6,74	6,87	5,05
Kota Madiun	4,01	8,32	8,15	6,39
Kota Surabaya	5,87	9,79	9,68	7,62
Kota Batu	2,48	5,93	6,57	8,43

DAFTAR ISI

05 - LAPORAN UTAMA

> Rakor Pencegahan dan Penindakan TPPO di Jawa Timur UPAYA BERSAMA CEGAH PMI ONLINE SCAM

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terus meningkat, Data Polda Jawa Timur menunjukkan terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023. Untuk mencegah TPPO di Jawa Timur, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenu RI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sektor Online Scamming Serta Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan di Jatim



- > Waspada Tanda-tanda Eksploitasi PMI
- > Sulitnya Membedakan Korban dan Pelaku TPPO
- > Berharap Masyarakat Turut Mencegah PMI Ilegal

EDISI : 243 | TRIWULAN III | TAHUN 2023



14 - LAPORAN KHUSUS

Gubernur Resmikan Job Fair Sambut Hari Jadi Jatim ke-78
Canangkan Gerakan Merdeka Berkarir
Berkat Sinergi dengan Elemen Masyarakat
Mengapa harus Merdeka Berkarir?
Bergerak Bersama Mengurangi Pengangguran di Jatim

22 - BUDAYA K3

Lindungi Pekerja Rentan dari Kecelakaan Kerja
Jaminan Sosial untuk Relawan, Seniman dan Olahragawan

26 - LATIHAN KERJA

Atasi Pengangguran, Andalkan Pelatihan Kerja
Dewan Minta Latihan untuk Siswa SMK
Tidak Melulu Tenaga Kerja Industri

30 - TRANSMIGRASI

Pantau Keberhasilan Transmigran asal Jawa Timur

32 - PENTA KERJA

Padat Karya Atasi Pengangguran dan Kemiskinan Ekstrim

37 - ASAL TAHU

Sekilas Tentang Ikatan Langkah Dansa Indonesia

39 - INOVASI

Pembangunan Zona Integritas di UPT Keselamatan Kerja

42 - OPINI

Evaluasi Bursa Kerja dalam Penanggulangan Pengangguran di Sidoarjo
Mengupas SNI 9011:2021 Pengukuran Bahaya Ergonomi di Tempat Kerja
Kompetisi 5R/5S: Mendorong Produktivitas dan Kualitas Kerja
Evaluasi Bursa Kerja dalam Penanggulangan Pengangguran di Sidoarjo
Pencegahan CTD Pekerja Wanita Industri Tembakau
Program Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas

58 - LENSEA

Jalan Sehat Ketenagakerjaan
UPT K2 Surabaya Terima Mahasiswa MBKM Unusa
Pelatihan Calon Transmigran
Bimbingan Wirausaha Penyandang Disabilitas
FGD Pengawasan dan Perbaikan Tata Kelola TKBM

Surat Keputusan Kepala Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur
No.01 Tahun 2022
perihal Susunan Redaksi Majalah SDM Plus
Tahun Anggaran 2022

PENERBIT

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Timur

PENGARAH

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.
Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur

PENANGGUNG JAWAB

SIGIT PRIYANTO, ST MM
Sekretaris Disnakertrans Provinsi Jawa Timur

REDAKTUR PELAKSANA

DYAH ASTRI ROSMASARI, S.Si.
Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran

TIM REDAKSI

DEVI PUSPITASARI, S.STP, MA
BETY YULIANI, S.E.
EKO TRIAMBODO, S.E.
AMRI ARDIANSAH, S.T.
DICKY ARYO PRABOWO
RANGGA RENDRA SADEWA, S.H.

PENULIS ARTIKEL

PURWANTI UTAMI
SUPRAYITNA
MARDALENA
BETTY YULIANI
UMAR HASAN
SURATMAN, SH
SUGENG LESTARI SH, MH
SUNARYA
SILVIA SAPTORINI, SKM
SOEHANANIEK, SKM
SITI CHASANAH, ST
ARIF SUMANTO, S.H., dll

INFOGRAFIK

FITRI NURANI, S.Kom
YOE HAR TUBAGUS SYAIFULLAH, S.Kom
KELIK HENDRA JATI, S.Kom

Tenaga Desain & Tata Letak

ACHMAD MAS HUDI

Alamat Redaksi :

**Sekretariat Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur**

Jl. Dukuh Menanggal No.124-126
SURABAYA

e-mail:sungramnakertrans@yahoo.co.id

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami hantarkan "SDM Plus" sebagai Media Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Jawa Timur kepada masyarakat maupun seluruh stakeholder Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian seraya berharap dapat meningkatkan awareness pemerintah dan masyarakat terhadap program-program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Majalah SDM Plus ini sekaligus merupakan laporan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintah yang sangat penting sebagai perwujudan negara dalam menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketenagakerjaan adalah isu nasional dan global yang terkait erat dengan hak asasi manusia, investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Majalah SDM Plus edisi triwulan III tahun 2023 ini mengangkat berbagai isu ketenagakerjaan, di antaranya pelaksanaan job fair dengan tema Merdeka Berkarir, pembukaan beragam kejuruan di BLK Disnakertrans Jatim, upaya pencegahan dan penindakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Untuk mencegah TPPO di Jawa Timur, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sektor Online Scamming. Rakor ini juga untuk meningkatkan pemahaman/kesadaran publik serta pemangku kepentingan di daerah secara menyeluruh, sehingga diharapkan mampu menekan potensi peningkatan kasus-kasus WNI di luar negeri dan untuk memperkuat jejaring kerja di daerah guna mendukung pelaksanaan tugas perlindungan WNI.

Dalam bursa kerja tahun ini, Mengangkat tema Merdeka Berkarir, Mendukung Fleksibilitas Pasar Kerja Secara Inklusif di Jawa Timur, job fair tahun ini diharapkan menjadi wadah masyarakat agar bebas memilih profesi dan mengakses peluang kerja sesuai minat, bakat, kreativitas, kesempatan yang ada. Terutama karena job fair ini juga memberikan akses peluang kerja kepada pekerja difabel. Gubernur Jatim mendorong para tenaga kerja untuk terus upgrade kompetensi dan skill yang dimiliki agar sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Kerja (Dudika). Bahkan penyiapan ini harus dilakukan sejak di bangku sekolah.

Pada kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur serta semua pihak yang telah membantu sehingga SDM Plus edisi 243 di tahun 2023 dapat release sesuai waktu. Semoga SDM Plus ini dapat memberikan informasi dan referensi tentang dunia ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan mampu menambah kemanfaatan bagi upaya kemajuan pembangunan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Dr. Himawan Estu Bagiyo, SH, MH



Rakor Pencegahan dan Penindakan TPPO di Jawa Timur Upaya Bersama Cegah PMI Online Scam

Korban Tindak Pidana Perdagangan Perdagangan Orang (TPPO) terus meningkat. Data Polda Jawa Timur menunjukkan terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023. Darii hanya 10 kasus pada tahun 2021, turun 9 kasus (2022), namun melonjak dratsis pada tahun 2023 menjadi 91 kasus, dengan jumlah tersangka pelaku sebanyak 111 orang. Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas TPPO.

Untuk mencegah TPPO di Jawa Timur, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sektor Online Scamming Serta Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan di Jatim, yang tempat di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Singosari Disnakertrans Jatim di Kabupaten Malang, Rabu (27/9/2023).

Rakor TPPO sektor judi online dan online scam di luar negeri dimaksudkan untuk menyepakati rencana aksi yang implementatif dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap TPPO. Rakor ini juga untuk meningkatkan pemahaman/kesadaran publik serta pemangku kepentingan

di daerah secara menyeluruh, sehingga diharapkan mampu menekan potensi peningkatan kasus-kasus WNI di luar negeri dan untuk memperkuat jejaring kerja di daerah guna mendukung pelaksanaan tugas perlindungan WNI.

Peserta rakor kurang lebih 100 orang meliputi para pemangku kepentingan di daerah, yaitu sekretaris daerah kabupaten/kota se-jawa timur DP3AK Jawa Timur, Disnakertrans Jawa Timur, dan Dinas Sosial Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota, BP3MI Jawa Timur beserta P4MI di wilayah Jawa Timur dan anggota satuan tugas perlindungan PMI Jawa Timur.

Adapun pembicara terdiri dari Sesditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, selaku keynote speaker, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan PMI, Kemanaker RI; Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, BP2MI, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kemenkumham RI, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Jaksa Agung Nuda Tindak Pidana Umum dan Pengadilan.

Scam adalah istilah yang digunakan untuk

LAPORAN UTAMA



menggambarkan skema penipuan bisnis untuk mengambil uang atau barang dari pihak korban. Semakin berkembangnya teknologi internet, kejahatan scam pun meningkat dan bertransformasi berbasis online scam. Perusahaan scam online dapat dianggap perusahaan berbasis digital dengan menggunakan modus penipuan online dalam melaksanakan aktivitasnya, sebagai contoh kasino, judi online, belanja online palsu, donasi palsu.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Keserjahteraan Rakyat Sekdaprov Jatim, Benmy Sampirwanto saat menyampaikan sambutan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, berdasarkan pemantauan layanan counter helpdesk kedatangan PMI di Terminal Internasional Bandara Juanda, hingga akhir Juli 2023 terdapat 22.787 PMI yang pulang melalui Bandara Juanda di Sidoarjo. Dari jumlah itu, PMI selesai kontrak 20.426 orang (89,64%), cuti 2.132 orang (9,36%), PMI yang terkena kasus 210 orang (0,92%), dan PMI sakit 18 orang (0,08%). PMI bermasalah yang ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disnakertrans Provinsi Jawa Timur hingga akhir Juli 2023 terdapat sebanyak 303 orang. Termasuk diantaranya korban TPPO sekitar 120 orang dan korban online scam asal Jawa Timur. Sedangkan jenazah PMI yang meninggal dunia di negara penempatan dan difasilitasi pemulangannya oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Timur hingga bulan Agustus 2023 mencapai 74 orang.

Ia juga menyampaikan, mengingat Jawa Timur menjadi daerah embarkasi sekaligus debarkasi PMI, dalam konteks perlindungan dan pendampingan PMI bermasalah, Pemprov

Jatim tidak hanya melayani warga Jatim. "Sebagai contoh, dari 120 korban TPPO yang kami layani, 101 orang diantaranya adalah warga luar Jatim yang terkena cegah tangkal di bandara Juanda," kata Benny.

Ia menambahkan, dari berbagai permasalahan PMI tersebut masih perlu mencermati mulai dari saat penyiapan (pra penempatan), selama penempatan, hingga purna penempatan PMI. Dimulai dari persoalan PMI bermasalah, yaitu PMI yang berangkat secara nonprosedural, PMI undocumented, PMI yang mengalami kasus di negara penempatan, PMI yang dideportasi dari negara penempatan, PMI yang meninggal dunia di negara penempatan, hingga isu online scam yang saat ini banyak memakan korban WNI yang bermaksud mencari pekerjaan dan penghidupan di luar negeri. "Bagaimanapun, ini menjadi isu krusial menyangkut hak perlindungan yang harus dipastikan pemenuhannya oleh pemerintah. Sudah saatnya kita duduk bersama guna mencari solusi bersama atas segala persoalan menyangkut PMI.

Kenyataannya, lanjutnya, permasalahan PMI tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri secara sporadis, dan tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu atau dua institusi. "Diperlukan sinergi dan kolaborasi semua institusi terkait dalam mengeliminir permasalahan menyangkut PMI," katanya. "Ibu Gubernur tentunya sangat berharap, momentum rapat koordinasi diantara pemangku kepentingan ini dapat menghasilkan hal-hal yang lebih komprehensif, menghasilkan langkah nyata di dalam upaya bersama memberantas kasus TPPO khususnya terkait online scam.

Kita dorong sinergi yang semakin baik dan harmonis di antara semua pihak, karena momentumnya sangat tepat untuk mendukung upaya peningkatan perlindungan terhadap PMI," tambahnya.

Pemprov Jatim melalui Disnakertrans memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang scam online. "Dari hasil rakor nantinya harus ada rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti sebagai rencana aksi. Segera dilaporkan ke Gubernur serta dan tindak lanjut lagi ke depannya," katanya.





Prioritas Bersama

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, yang diwakili Sekretaris Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, menyampaikan, PMI termasuk kategori kelompok rentan (vulnerable people), maka penanganan dan perlindungannya harus menjadi prioritas bersama. Keberadaan mereka menjadi salah satu dasar komitmen hadirnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi/ kabupaten/kota, dan pihak-pihak berkepentingan untuk mengedepankan prinsip perlindungan dalam penempatan PMI ke luar negeri.

Dijelaskannya, penempatan PMI asal Jawa Timur berkontribusi mengurangi pengangguran bahkan kemiskinan di Jawa Timur. Pada kondisi rentan di saat pandemi nyaris melumpuhkan kesempatan kerja di dalam dan luar negeri, peluang kerja di luar negeri bagi warga Jawa Timur masih tetap menjadi pertimbangan.

Penempatan PMI asal Jatim ke luar negeri, kata Sigit, sebagai bukti nyata hadirnya pelayanan kepada calon PMI. Pemerintah Provinsi Jatim mengacu saran laporan Bank Dunia senantiasa melakukan perbaikan layanan migrasi melalui konektivitas layanan Jatim Migrant Care. Layanan migrasi terintegrasi meliputi aspek layanan pra penempatan serta purna penempatan, sebagaimana kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

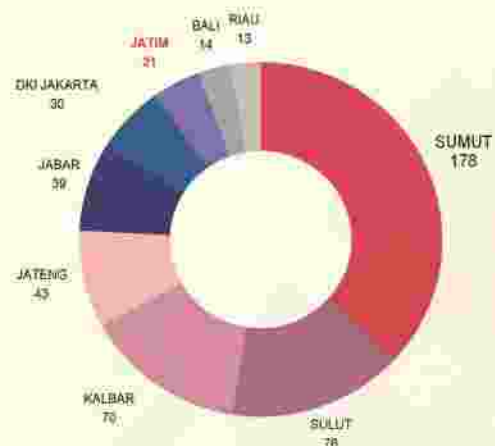
Di samping itu, sambungnya, hadirnya Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI provinsi serta layanan Jatim Migrant Care juga menjadi representasi hadirnya Pemprov Jatim di ranah pelayanan dan perlindungan PMI. "Ini merupakan komitmen penuh kami dalam mensupport pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian sangat kami harapkan keberadaan LTSA PMI provinsi juga bisa menjadi back-up bagi kab./kota dalam mempermudah pelayanan bagi calon PMI," kata. "Perlu kami sampaikan, berdasarkan pemantauan layanan counter helpdesk kedatangan PMI di terminal internasional bandara Juanda, hingga akhir juli 2023 terdata 22.787 PMI yang pulang melalui bandara juanda di Sidoarjo. PMI selesai kontrak 20.426 orang (89,64%), cuti 2.132 orang (9,36%), pmi yang terkena kasus 210 orang (0,92%), dan PMI sakit 18 orang (0,08%," katanya.

Tercatat PMI bermasalah yang ditangani Pemprov Jatim melalui Disnakertrans Jatim hingga akhir juli 2023 terdata

sebanyak 303 orang, termasuk diantaranya korban TPPO sekitar 120 orang dan korban online scam asal Jatim, sedangkan jenazah PMI yang meninggal dunia di negara penempatan dan difasilitasi pemulangannya oleh Disnakertrans Jatim hingga bulan Agustus 2023 mencapai 74 orang.

Mengingat Jatim menjadi daerah embarkasi sekaligus debarkasi PMI, dalam konteks perlindungan dan pendampingan PMI bermasalah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya melayani warga Jawa Timur, sebagai contoh, dari 120 korban TPPO yang kami layani, 101 orang diantaranya adalah warga luar Jatim yang terkena cegah tangkal di bandara Juanda. "Kita perlu mencermati hal-hal yang masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari saat penyiapan (pra penempatan), selama penempatan, hingga purna penempatan PMI," ujar Sigit.

Dimulai dari persoalan PMI bermasalah, yaitu PMI yang berangkat secara nonprosedural, PMI undocumented, PMI yang mengalami kasus di negara penempatan, PMI yang dideportasi dari negara penempatan, PMI yang meninggal dunia di negara penempatan, hingga isu online scam yang saat ini banyak memakan korban wni yang bermaksud mencari pekerjaan dan penghidupan di luar negeri. "Bagaimanapun, ini menjadi isu krusial menyangkut hak perlindungan yang harus dipastikan pemenuhannya oleh pemerintah. sudah saatnya kita duduk bersama guna mencari solusi bersama atas segala persoalan menyangkut PMI," terangnya.



Permasalahan PMI tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri secara sporadis, tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu atau dua institusi. diperlukan sinergi dan kolaborasi semua institusi terkait dalam mengeliminir permasalahan menyangkut PMI. "Saya sangat berharap, momentum rapat koordinasi diantara pemangku kepentingan ini dapat menghasilkan hal-hal yang lebih komprehensif, menghasilkan langkah nyata di dalam upaya bersama memberantas kasus tppo khususnya terkait online scam," katanya. "Kita dorong sinergi yang semakin baik dan harmonis di antara semua pihak, karena momentumnya sangat tepat untuk mendukung upaya peningkatan perlindungan terhadap PMI," imbuhnya."



Waspada Tanda-tanda Eksploitasi PMI

Terungkapnya ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di Kamboja membuka tabir aktivitas perdagangan orang, yang menimpa pekerja asal Indonesia. Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengungkap tiga kasus TPPO. Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto, Selasa (13/6/2023) mengatakan 3 kasus ini terungkap berkat kerja bersama Satgas TPPO Jatim, yang terdiri dari BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan dan dukungan dari KrimSus.

Kasus pertama, Polda Jatim menetapkan 4 tersangka berinisial MK, SA, HWT, dan 1 DPO berinisial JF yang telah memberangkatkan 130 orang CPMI. Tiga tersangka telah dilakukan penahanan, karena melakukan penyimpangan berkaitan dengan moratorium Kemnaker tahun 2015, pasal 4 dan pasal 10 undang-undang (UU) 21 tahun 2017 tentang TPPO, serta UU yang berkaitan dengan perlindungan PMI. Ancaman hukuman terhadap 4 tersangka minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun. Tim masih mengejar 1 DPO, ujarnya.

Kasus kedua, Polda Jatim bekerja sama dengan BP2MI Jatim telah menetapkan 4 tersangka atas kasus pemberangkatan 20 Calon PMI (CPMI) secara ilegal. Satu tersangka berinisial MYS telah ditahan sejak 25 Mei 2023 dan dilakukan pengamanan saat posisi ada Bandara Juanda. Tiga DPO lainnya sedang dilakukan pengejaran, inisial HKL, KSR, MS yang bekerja sejak tahun 2016, ujarnya. Totok mengatakan pasal yang ditetapkan sama dengan pasal yang ditetapkan kepada tersangka sebelumnya, yakni UU TPPO dan UU yang berkaitan dengan perlindungan PMI. Ancaman hukuman terhadap tersangka yakni minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun.

Kasus ketiga, Polda Jatim telah menetapkan tersangka inisial APP yang dilakukan penahanan pada tanggal 9 Juni 2023. Tersangka memberangkatkan 6 PMI ke negara Kamboja tanpa dilengkapi persyaratan yang sah. Sebelumnya tersangka juga telah memberangkatkan 14 orang PMI ke Hongkong, Taiwan dan Arab Saudi, serta berencana memberangkatkan 2 orang CPMI ke Jepang. "Tersangka mendapatkan keuntungan dari 1 orang CPMI berkisar Rp3-Rp5 juta dari agen yang ada di Kamboja," ujarnya.

Salah satu korban adalah AZ (40), asal Jember, Jawa Timur.

Sementara istrinya yakni AS (29) masih ditahan di Kamboja. "Terima kasih Bapak Kapolda Jatim, telah menyelamatkan saya, memulangkan saya dari Kamboja, tempat di mana saya dijual, dipekerjakan tidak layak. Tapi saya juga meminta tolong, saat ini istri saya masih ditahan di sana, tidak diperbolehkan pulang. Dan kalau bisa pulang itu saya disuruh tebus Rp 115 juta. Uang sebanyak itu saya dari mana," ujarnya sedih saat di Polda Jatim, Selasa (13/6/2023).

AZ mengatakan bahwa ia dan istrinya sebelum menjadi korban perdagangan orang ini, mendapat tawaran jadi PMI melalui istrinya. Ia sebenarnya tidak mengetahui pasti prosesnya, karena yang dari awal mengurus adalah istrinya. "Yang tahu semua istri saya. Karena saya nggak punya HP android. Jadi yang urus semua istri saya. Dapat info dari mana saya juga nggak tahu," jelasnya.

Menurut AZ, istrinya mengajaknya menjadi PMI lantaran tergiur dengan gaji yang besar. Katanya, awal mula itu akan dipekerjakan di sebuah perusahaan yang gajinya Rp 15 juta per bulan. Dari situlah, ia mengiyakan ajakan istrinya. "Memang semuanya dibiayain, dari berangkat sampai sana. Saya berangkat itu setelah Lebaran kemarin. Tapi ternyata di sana saya dan istri dijual ke perusahaan. Kemudian dijadikan scammer, dan hanya digaji Rp3-4 juta. Ketipu saya," paparnya.

AZ mengatakan, sistem kerja scammer yakni menggaet para pengusaha untuk mau beriventasi. Sasarannya, kebanyakan warga Indonesia. "Jadi saya sama istri ini dijadikan scammer. Nipu-nipu para pengusaha agar mau



investasi uangnya di perusahaan tempat saya bekerja. Kalau saya nggak nyampai target. Ya langsung dipotong gaji saya," ujarnya.

Rina Komaria, Kepala Subdirektorat Kawasan Asia Tenggara Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mengatakan, kasus PMI dari tahun ke tahun bertambah banyak. Pada tahun 2021, ditemukan sebanyak 29.223 kasus, 119 kasus di antaranya online scam. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat menjadi 35.149 (naik 20%). Jumlah kasus online scam naik 6 kali lipat menjadi 700 kasus. Sedangkan pada semester I tahun 2023, kasus PMI yang dilaporkan sebanyak 18.820 kasus.

Selain dapat dijerat dengan UU TPPO, pelaku perdagangan orang juga dapat dikenakan UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada pasal 120 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Aspek Kemanusiaan

Sementara itu, Dr. Herry Wiyanto, SH M.Hum, dari Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam paparan pada rakor Pencegahan dan Penindakan TPPO mengatakan, eksploitasi terhadap PMI sering terjadi dialami oleh PMI ilegal. Mengutip pasal 1 angka 1 UU 21/2007, perdagangan orang adalah sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sedangkan indikator TPPO sebenarnya tidak terlalu sulit. Yakni :

- Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya
- Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau

harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari)

- Adanya jeratan utang (untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan)
- Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, di bawah pengawasan terus-menerus)
- Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja
- Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman)
- Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai
- Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya
- Adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik
- Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang.
- Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri (perjalanan, visa paspor)
- Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya
- Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga

Dalam kasus eksploitasi pelacuran terhadap PMI, ditemukan sejumlah aturan merugikan yang menimpa korbannya, antara lain:

- Mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran
- Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari
- Pengelola atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga
- Tempat dimana calon korban dipekerjakan berubah-ubah.

Gubernur Jawa Timur dalam jumpa pers pemulangan korban TPPO asal Jatim di Mapolda Jatim, menekankan aspek kemanusiaan dan sinergi antarpihak terkait dalam melindungi WNI. Khofifah Inar Parawansa menyatakan bahwa melindungi jiwa adalah tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan harus dilakukan secara bersama-sama.

Gubernur memberikan apresiasi kepada perwakilan RI, Kementerian Luar Negeri, dan Interpol atas upaya mereka dalam penanganan kasus TPPO. Namun, ia menyoroti perlunya penyesuaian anggaran dan regulasi dalam pendirian shelter provinsi di luar negeri. Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya tindakan preventif dari tingkat desa untuk mencegah migran non-prosedural. Selain itu, beliau mengutamakan pendidikan anak-anak pekerja migran dengan mendirikan pusat pembelajaran masyarakat.*

Sulitnya Membedakan Korban dan Pelaku TPPO



Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam periode 5 Juni-2 Agustus telah menangkap 882 tersangka dan menyelamatkan 2.233 orang dari tindak pidana perdagangan orang, termasuk kasus jual beli ginjal jaringan internasional Indonesia-Kamboja. Namun penerapan hukum yang menjerakan belum bisa dilakukan secara maksimal.

Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Eliasta Sembiring Meliala mengatakan korban bisa menjadi pelaku baru dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Adrianus Meliala memberikan contoh kasus Patty Hearst yang fenomenal di Amerika Serikat pada 1974. Patty Hearts adalah seorang anak konglomerat yang menjadi korban penculikan. Namun pada akhirnya justru bergabung dengan kelompok penculik untuk melakukan tindakan kriminal. "Saya pakai analogi tersebut untuk menjelaskan kasus yang terjadi saat ini ketika seseorang tak merasa lagi dijual. Malah merasa mendapat pemasukan yang besar," ujar Adrianus, dikutip dari Antara pada Minggu, 6 Agustus 2023.

Perilaku perubahan korban menjadi pelaku TPPO tercermin pada kasus sindikat jual beli ginjal internasional yang terungkap belum lama ini. Dari 15 tersangka, sembilan

di antaranya pernah menjadi pendonor atau korban yang berubah menjadi pelaku TPPO. Dari kasus tersebut, Adrianus kemudian menyimpulkan bahwa dalam perkembangan kasus TPPO terdapat "varian baru" yakni korban yang berubah menjadi pelaku. "Ada variasi dalam konteks perdagangan orang berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu," ujar Adrianus.

Dalam varian baru TPPO, lanjut pria 56 tahun itu, pelaku dan korban terlibat kontak dengan adanya perpindahan tempat, ketika mengurus dokumen, atau saat berada di lokasi tertentu yang menjadi lokasi penampungan. "Dari kacamata aparat penegak hukum yang agak konservatif, korban juga dapat dikatakan sebagai penyerta. Jadi bukan hanya menjadi korban, tetapi dia sudah ikut serta dalam satu skema yang mengorbankan dirinya. Dia bekerja sama dengan orang lain agar dia menjadi korban," kata Adrianus.

Sementara itu, anggota Komisi III Bidang Hukum DPR RI, Didik Mukrianto, meminta Polri perlu menjalin kerjasama lintas instansi. Menurutnya kejahatan perdagangan orang sangat tidak manusiawi karena mengeksploitasi manusia,



NO.	URAIAN PERUBAHAN	Pasal	SANKSI PIDANA
1.	- Melakukan perburuan, pengumpulan, penampungan, pengiriman, penempatan atau pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengusiran, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu, perjanjian utang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memisahkan perikudai dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk tujuan eksploitasi di wilayah Indonesia. - Mengakibatkan orang terakibatkan	Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2)	3 - 18 tahun 100 - 600 jt 3 - 18 tahun 100 - 600 jt
2.	Membuatkan orang ke wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Indonesia atau di luar negeri	Pasal 3	3 - 18 tahun 100 - 600 jt
3.	Membawa WNI ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi	Pasal 4	3 - 18 tahun 100 - 600 jt
4.	Mengganggu anak dengan mengorbankan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi	Pasal 5	3 - 18 tahun 100 - 600 jt
5.	Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak di eksploitasi	Pasal 6	3 - 18 tahun 100 - 600 jt
6.	Melakukan Pasal 1, 2, 4, 5 dan 6 mengakibatkan korban: Menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang menyalahkan jiwa, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. Mengakibatkan mati.	Pasal 7 ayat (1) Pasal 7 ayat (2)	Tambah 1/3 Tambah 1/3 5 - seumur hidup 100 jt - 5 milyar

NO.	JENIS PERBUATAN	Pasal	SANKSI PIDANA
7.	Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan mengakibatkan terjadinya perdagangan orang	Pasal 8	Ditambah 1/3 Ditambah 1/3
8.	Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi.	Pasal 9	1 - 6 tahun 40 - 240 jt
9.	Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.	Pasal 10	3 - 15 tahun 120 - 500 jt
10.	Meyencanakan atau memufakatkan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.	Pasal 11	3 - 15 tahun 120 - 500 jt
11.	Menggunakan atau memanfaatkan korban dengan cara berstatus dan atau berbuat cabul.	Pasal 12	3 - 15 tahun 120 - 400 jt
12.	Memberikan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen yang dipakai dalam perdagangan orang.	Pasal 19	1-7 tahun 40 - 280 jt
13.	Memberikan kesakitan palsu, alat bukti palsu atau memengaruhi saksi kasus perdagangan orang secara melawan hukum	Pasal 20	1-7 tahun 40 - 380 jt
14.	Menyerang fisik saksi atau petugas sidang perkara perdagangan orang Mengakibatkan: - Luka berat - Mati	Pasal 21 Ayat (2) Ayat (3)	1 - 5 tahun 40 - 200 jt 2 - 10 tahun 80 - 400 jt 3 - 15 tahun 120 - 600 jt
15.	Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang baik terhadap terdakwa, terdakwa, saksi dalam perkara perdagangan orang	Pasal 22	1 - 5 tahun 40 - 200 jt
16.	Membantu pelarian pelaku perdagangan orang dari prose peradilan pidana	Pasal 5	1 - 5 tahun 40 - 200 jt
17.	Membertahukan identitas saksi/korban padahal harus dirahasiakan	Pasal 6	3 - 7 tahun 40 - 200 jt

baik dari sisi ekonomi, maupun seksual. "Perlu ada kerja sama lintas instansi dalam mengusut kasus TPPO, apalagi yang melibatkan oknum aparat. TPPO adalah kejahatan trans nasional serta kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat," paparnya.

Jika tidak dimitigasi dan dicegah, kejahatan itu kata Didik, korban akan terus berjatuh dan Indonesia akan terus menjadi sumber atau tempat transit kejahatan TPPO. "Bahkan menjadi penerima kejahatan trafficking yang cukup besar khususnya Jabar, NTB, Jatim, dan Jateng," ungkap Didik.

Didik mengatakan, penindakan kejahatan TPPO perlu ditangani secara serius dan berkesinambungan. Karena pada praktiknya, kasus perdagangan orang banyak yang melibatkan jaringan kuat baik secara lokal, nasional maupun Internasional. "Kejahatan ini juga memungkinkan dibackup oleh orang-orang kuat termasuk oknum-oknum aparat pemerintah, oknum polisi, oknum TNI," ungkap Didik.

Didik pun memuji langkah Polri yang membentuk Satuan Tugas (Satgas TPPO) sebagai langkah penegakan hukum dari maraknya kasus-kasus TPPO, yang mayoritas terkait dengan PMI ilegal. Sejak Satgas ini dibentuk, berbagai kasus perdagangan orang maupun praktik pengiriman dan penempatan PMI ilegal ke negara tujuan dapat diungkap serta digagalkan. "Saya mengapresiasi langkah-langkah cepat gugus tugas yang dipimpin oleh Kapolri dalam melakukan penindakan TPPO belakangan ini," tutur Didik.

Didik memaparkan data yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolkum) Mahfud Md bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, tercatat ada 1.900 jenazah korban perdagangan orang yang dipulangkan ke tanah air. "Disinyalir dua orang korban TPPO meninggal per hari, ini bisa dikatakan situasi yang sangat darurat dan harus dilakukan tindakan yang cepat dan seserius mungkin untuk mencegah, menindak para pelakunya, dan segera melindungi para calon dan korban TPPO," paparnya.

Sementara itu berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada Oktober 2022 tercatat sebanyak 2.356 korban TPPO yang dilaporkan dengan korban 50,97 persen anak-anak dan 46,14 persen perempuan. "Negara harus hadir melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Kita tidak boleh kecolongan lagi terhadap kasus perdagangan orang yang mana perempuan dan anak juga banyak menjadi korban," tegas Didik.

Menurut Legislator dari Dapil Jawa Timur IX ini, salah satu bukti Negara hadir dan berpihak kepada korban TPPO adalah dengan memperkuat instrumen penegakan hukum. Termasuk, disampaikan Didik, dengan penindakan yang tegas terhadap siapa pun yang terlibat. "Pemerintah juga harus terus melakukan tindakan preventif untuk mencegah jatuhnya korban-korban baru dengan mengkonsolidasikan kementerian atau lembaga di tingkat pusat, membangun sinergi yang utuh dengan pemerintah daerah dan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat," terangnya.



Didik pun mendorong kerja sama antar-negara dalam membongkar setiap jaringan praktik TPPO. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan Indonesia mendapatkan informasi akurat dalam melakukan tindakan penegakan hukum. "Untuk jangka menengah dan panjang, Pemerintah harus membangun kerja sama dengan berbagai negara khususnya negara tetangga dan negara-negara tujuan para tenaga kerja Indonesia," imbau Didik.

Komisi III DPR yang membidangi urusan penegakan hukum dipastikan akan terus mengawal kasus-kasus TPPO yang sudah menjadi momok di Indonesia. Didik berharap seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam tindakan pencegahan TPPO. "Kasus perdagangan orang di Indonesia dinilai dapat diminimalisir apabila ada kesadaran bersama terhadap persoalan ini. Apabila menemukan adanya indikasi PMI yang akan ditempatkan melalui jalur non-formal atau mengetahui tempat penampungan PMI ilegal, segera laporkan kepada pihak berwajib," tutup Didik.

Berharap Masyarakat Turut Mencegah PMI Ilegal

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara proaktif membantu mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural/ilegal. Hal ini disampaikannya sebagai respons atas kasus sejumlah WNI yang menjadi korban penempatan bekerja di Kamboja. Pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang.

Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural. "Dengan adanya peran aktif masyarakat, kasus-kasus penempatan PMI secara nonprosedural atau ilegal ini benar-benar dapat kita cegah. Oleh karenanya, masyarakat harus paham bagaimana prosedur penempatan yang benar, modus-modus penipuan, termasuk melaporkan manakala menemukan adanya penempatan secara nonprosedural," kata Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan pemerintah segera menyusun instruksi presiden (inpres) yang berisi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI dari hulu sampai hilir. "Presiden minta kerja kolaboratif kementerian dan lembaga. Kita akan segera membuat instruksi presiden yang merinci tugas masing-masing kementerian dan lembaga, pemerintah pusat, daerah sampai desa," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat koordinasi bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Ia mengatakan, inpres tersebut akan memperjelas tugas, kewenangan, dan tanggungjawab kementerian serta lembaga dalam tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. "Hasil rapat antar-kemenko akan dibuat instruksi presiden yang akan mengatur tanggung



jawab kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Ia mencontohkan terkait isu penempatan PMI, misalnya recruitment agreement, membuat visa, percepatan masa tunggu penempatan PMI, penerbitan surat izin perekrutan PMI, memperluas peluang kerja sama luar negeri pada skema government to government, itu menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri RI dan BP2MI.

Kemudian, lanjutnya, terkait dengan pemberian informasi peluang penempatan dan perlindungan PMI dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai ke pemerintah desa. Informasi itu dalam bentuk surat edaran bersama Mendagri, Menaker, Mendes PDDT, dan BP2MI. "Jadi setiap urusan tidak tunggal penyelesaian dan tanggung jawabnya, semuanya membutuhkan tindakan kolaboratif antar-kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah sampai pemerintah desa," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ida menyampaikan terkait dengan pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, terdapat tiga poin utama yang menjadi arahan Presiden RI. Pertama, perbaikan tata kelola yang



Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan Tahun 2020 – 30 April 2023

No	Negara Penempatan	2020	2021	2022	2023	Grand Total
1	MALAYSIA	359	483	451	79	1.372
2	TAIWAN	178	145	197	95	615
3	HONG KONG	179	112	117	91	499
4	SINGAPORE	103	64	60	8	235
5	CHINA	122	35	16	5	178
6	KOREA SELATAN	44	39	72	17	172
7	FIJI ISLANDS	7	121	10	2	140
8	BRUNEI DARUSSALAM	34	23	23	5	85
9	JAPAN	5	5	51	2	63
10	MAURITIUS		9	53		62
11	Lain-Lain	1	7	36	15	255
GRAND TOTAL						3593

Sumber: Data Pengaduan BP2MI



terdiri dari evaluasi tata kelola dari hulu sampai dengan hilir, pengawasan pelaksanaan penempatan PMI, dan mempermudah prosedur penempatan.

Kedua, perbaikan skema perlindungan jaminan sosial untuk pekerja migran Indonesia pada masa sebelum, selama dan setelah bekerja. Dan ketiga, evaluasi regulasi terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerjaan Indonesia.

Desa Pilot Project

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan PMI ilegal, Kemnaker akan melakukan dialog interaktif di 500 desa. Menariknya, di Tulungagung memiliki 6 Desa sebagai pilot project dalam penanganan PMI dan menjadi penyumbang terbanyak PMI ke luar negeri. "Ada 6 desa di Tulungagung yang menjadi pilot proyek kali ini yakni Desa Pagersari, Miringambar, Betak, Tunggangri, Jatidowo, Sumberagung," jelas Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, Jum'at, (22/9/2023) di Desa Pagersari, Kecamatan Kalidawir.



Menteri Ida menjelaskan bahwa topik pembahasan melibatkan perlindungan PMI di luar negeri, penguatan ekonomi keluarga PMI, parenting, penguatan ekonomi keluarga melalui koperasi, dan penyederhanaan layanan bagi PMI terkait. Semua ini akan dijalankan oleh desa-desa pilot proyek tersebut. "Banyak langkah akan diambil untuk meningkatkan perhatian terhadap PMI, termasuk CPMI, PMI, dan PMI yang telah purna tugas," ungkapnya.

Namun, untuk merealisasikan hal ini, kemenaker perlu berkolaborasi dengan instansi lain agar segalanya berjalan mulus. Salah satu isu penting adalah pencegahan PMI terjerumus ke perusahaan tidak resmi seperti PT. Abal - Abal, yang masih menjadi pilihan banyak PMI di Tulungagung.

Dalam proyek ini, upaya penyederhanaan pelayanan CPMI hingga mitra perusahaan di luar negeri akan menjadi perhatian utama. Untuk PMI yang ilegal, mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari proyek ini karena nama mereka tidak terdaftar di Kemenaker. "Jika ada yang berangkat secara ilegal tentu Kemenaker tidak bisa berbuat banyak jika terjadi persoalan, itu juga akan merugikan PMI itu sendiri," tutupnya.

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan PMI asal Tulungagung adalah tulang punggung ekonomi dengan remitansi tahunan mencapai lebih dari Rp 2 triliun. "Setiap PMI asal Tulungagung harus mendapatkan perhatian terbaik, terutama mereka yang telah purna dari perantauan dan menghadapi kesulitan dalam mencari penghidupan di negeri sendiri," kata Bupati Maryoto Birowo.

Untuk membangun sinergitas, Kemnaker juga memberikan penghargaan kepada Polres Tulungagung atas dukungan dan kinerjanya dalam pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan tahun 2023. Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Rapat Kerja Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (25/09/2023) malam. Kapolres Tulungagung AKBP Teuku Arsyah Khadafi mendapatkan penghargaan terkait pengungkapan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Hal ini berkat konsistensinya untuk mengambil langkah tegas terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.*

Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Jenis Permasalahan Tahun 2020 – 30 April 2023



No	Jenis Permasalahan	Jumlah Pengaduan
1	PMI Ingin Ditolong	886
2	Gaji tidak dibayar	421
3	PMI gagal berangkat	302
4	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	262
5	Meninggal dunia di negara tujuan	231
6	Penipuan peluang kerja	141
7	Putus Hubungan Komunikasi	117
8	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI	114
9	Ilegal Rekrut calon PMI	108
10	Overstay	103
11	Sakit	102
12	Meninggal	66
13	Lain-lain	940
Grand Total		3593

Sumber: Data P3MI 2023

10



Gubernur Resmikan Job Fair Sambut Hari Jadi Jatim ke-78

Canangkan Gerakan Merdeka Berkarir

Ribuan masyarakat mengantre dari lantai 2 untuk menuju ke lantai 6 Galaxy Mall 2, mereka sedang menuju ke Job Fair Merdeka Berkarir 2023 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur. Pada hari kedua pelaksanaan Job Fair Merdeka Berkarir yang diselenggarakan Disnakertrans Jatim di Galaxy Mall Surabaya, Rabu (20/9), nampak lebih banyak pencaker (pencari kerja) yang datang dibandingkan hari pertama. Untuk hari pertama, total pencaker yang teregistrasi sebanyak 2.554 pencaker, sedangkan total pencaker yang sudah teregistrasi per jam 15.37 sebanyak 2.943 pencaker.

Salah satu dari peserta pencari kerja itu ada Verdian (25) yang sudah datang di Galaxy Mall sejak pukul 09.00 WIB. Pria asal Mojokerto itu berniat mencari pekerjaan di Job Fair kali ini karena ada berbagai pilihan pekerjaan, "Niatnya mau cari lowongan sebagai Software Developer di Job Fair kali ini. Tapi nanti harus scan di booth dulu sama lihat lowongan apa saja yang tersedia," kata Verdi ditemui di tengah antrean hari pertama, Selasa (19/9/2023).

Istiyah (23) juga mengaku gembira karena Job Fair Jatim 2023 memberikan kesempatan bagi angkatan kerja dalam

mencari pekerjaan. Ia berharap mendapat pekerjaan sesuai dengan jurusannya sosiologi selama duduk di bangku perkuliahan. "Sebagai lulusan fresh graduate, saya berharap mendapat pekerjaan di sini. Setidaknya di awal masa kelulusan saya ingin mencari pengalaman kerja supaya mengetahui bagaimana dunia kerja," katanya.



Antrean pencari kerja sudah mengular sejak pukul 10.00 WIB, ketika acara belum dibuka. Bahkan saking penuhnya, mereka harus bergantian supaya bisa naik ke atas. Rata-rata peserta yang mengikuti gelaran Job Fair tahun ini masih fresh graduate. Dalam Job Fair kali ini, ada 57 perusahaan dengan 500 lowongan kerja di dalam maupun luar negeri dan tersedia sekitar 4.000 kebutuhan tenaga kerja. Dimana, 4 perusahaan diantaranya menyediakan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka langsung Job Fair Jatim 2023 dalam rangka Hari Jadi ke-78 Provinsi Jatim di Galaxy Mall Surabaya, tanggal 19-20 September 2023. Job fair yang digelar oleh Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dapat diikuti secara online dan offline.

Gubernur juga menyaksikan penandatanganan Pakta bersama Gerakan Merdeka Berkarir yang ditandatangani oleh Kepala Disnakertrans Jatim bersama Direktur Bank Jatim, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim, DPP APINDO Jatim, Ketua Kadin Jatim, ICCN Jatim, Forum Bursa Kerja Khusus Jatim, Milenial Job Center, dan Forum Organisasi Disabilitas Jatim. "Saya menyambut positif konsep Gerakan Merdeka Berkarir dalam menyiapkan angkatan kerja Jawa Timur sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi sekaligus menyambut Indonesia Emas 2045. Diperlukan kerjasama seluruh elemen di Jawa Timur untuk bergerak bersama ke arah menuju satu tujuan yang sama guna mendukung pengurangan pengangguran di Jawa Timur," katanya dalam sambutan tertulis.

Tagline Merdeka Berkarir Mendukung Fleksibilitas Pasar Kerja Secara Inklusif di Jawa Timur mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kebebasan penuh untuk memilih profesi dan mengakses peluang kerja sesuai minat, bakat, kreativitas, kesempatan yang ada. Selain mengubah stigma dimana sukses bekerja adalah bekerja secara formal, tagline ini juga sebagai respon atas berkembangnya profesi baru di era gig economy. Saat ini mulai banyak pencari kerja millennial bergeser minat dan passion-nya untuk

mendalami profesi baru dalam dunia digital sebagai freelancer. Terlebih era ini juga telah mengubah lanskap bisnis dari segi interaksi, pekerjaan dan transaksi dalam ekonomi. Banyak perusahaan beralih ke model bisnis digital, dan otomatis mengubah arah pasar kerja menjadi lebih fleksibel.



Siap dari Sekolah

Gubernur Khofifah menyampaikan, gelaran Job Fair menjadi salah satu upaya nyata guna menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur. Sebagai informasi, TPT Jatim per Februari 2023 sebesar 4,33%. "TPT Jatim per Februari 2023 di angka 4,33% dan ini masih di bawah TPT Nasional sebesar 5,45%. Artinya pengangguran di Jawa Timur rata-ratanya lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka nasional," kata gubernur.

Mengangkat tema Merdeka Berkarir, Mendukung Fleksibilitas Pasar Kerja Secara Inklusif di Jawa Timur, job fair tahun ini diharapkan menjadi wadah masyarakat agar bebas memilih profesi dan mengakses peluang kerja sesuai minat, bakat, kreativitas, kesempatan yang ada. Terutama karena job fair ini juga memberikan akses peluang kerja kepada pekerja difabel.



Khofifah mendorong para tenaga kerja untuk terus mengupgrade kompetensi dan skill yang dimiliki agar sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Kerja (Dudika). Bahkan penyiapan ini harus dilakukan sejak di bangku sekolah. Dimana sinkronisasi antara kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja harus linier. Agar setelah lulus, kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan perusahaan. "Maka teruslah membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja supaya link and match bisa kita bangun maksimal sehingga seluruh kebutuhan tenaga kerja bisa kita maksimalkan pemenuhannya," tambahnya.

Khofifah menyatakan, harus ada keselarasan antara kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat. "Oleh karena itu masyarakat harus melakukan cek kebutuhan dunia kerja, kebutuhan apa saja yang tersedia," kata Khofifah.

Menurut Gubernur Khofifah, upaya untuk menurunkan TPT ini selain dengan mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja, namun juga harus memberseingi dengan dukungan terhadap job creater



atau pencipta lapangan pekerjaan. Contohnya seperti start up. "Jadi nanti lapangan pekerjaan akan terbuka lebih lebar dan beragam. Peluang warga Jatim untuk mendapat pekerjaan yang sesuai lebih besar lagi," jelasnya.



Berkat Sinergi dengan Elemen Masyarakat

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur akan menggelar Job Fair Merdeka Berkarir Tahun 2023 yang diselenggarakan di Galaxy Mall Surabaya, Selasa dan Rabu (19-20/9/2023). Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, mengatakan, untuk itu Job Fair bersamaan dengan bulan Pasar Kerja, yang terbuka bagi seluruh angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur, dan Job Fair juga secara khusus rangkaian memperingati Hari Jadi Jatim

ke-78. "Bulan Juni, Juli, dan Agustus banyak lulusan yang belum terserap ke perguruan tinggi, dan ada yang ingin bekerja. Untuk itu berdasar SE Gubernur menetapkan menjadi bulan pasar kerja yang diharapkan menjadi ruang publik yang bisa dinikmati seluruh angkatan kerja untuk akses mencari pekerjaan," katanya.

Terselenggaranya Job Fair karena pengangguran masih menjadi beban yang harus diatasi bersama. Pengangguran memiliki banyak faktor, diantaranya seperti masalah link and



Gubernur Khofifah juga mengajak penyandang difabel untuk mengikuti Job Fair kali ini. Karena ada sejumlah lowongan kerja yang memang tersedia untuk para penyandang disabilitas. Dimana perusahaan bisa melakukan interview langsung dengan calon tenaga kerja

dan melakukan assessment. "Jadi ini adalah upaya kita bersama untuk berusaha selalu menjadi bagian yang bisa memberikan kesetaraan perlakuan diantara seluruh warga masyarakat Jawa Timur. Termasuk untuk tenaga kerja difabel,"katanya.*

match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Sedangkan tagline Job Fair yaitu Merdeka Berkarir, yang mendukung fleksibilitas pasar kerja antara inklusif di Jawa Timur. "Inklusif itu artinya bahwa semua angkatan kerja dapat diberi kesempatan untuk bisa mengakses dan menikmati peluang ini,"tambahnya.

Selanjutnya, pihaknya akan menggelar job fair serupa di 6 UPT BLK Disnakertrans Jawa Timur. Kegiatan ini meliputi, job fair di UPT BLK Surabaya pada 10 Oktober 2023, Mojokerto pada 11 Oktober 2023, kemudian Singosari pada 18 Oktober 2023, Kediri pada 24 Oktober 2023. Kemudian di Tuban dan Pasuruan pada 26 Oktober 2023. "Jadi keenam UPT BLK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur tersebut akan mengadakan Job Fair secara berturut-turut selama Bulan Oktober 2023,"katanya.

Rangkaian kegiatan pada pembukaan Job Fair adalah:

- 1) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara pihak Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dengan Aora LKP tentang Kerjasama Pengembangan SDM secara inklusif, dengan PT. Dayalima tentang Kerjasama penyediaan data profiling pencari kerja, dan dengan PT. Jawapos Media Televisi (JTV) terkait program Bersama penyebaran informasi peluang kerja melalui siaran regional JTV Jawa Timur.
- 2) Penyerahan penghargaan bagi 3 perusahaan di Jawa Timur yang memenuhi kuota tenaga kerja bagi

penyandang disabilitas, yaitu CV. Kinasih Abyudaya, CV Arsyadina, dan CV Sinar Baja Electric.

- 3) Penyerahan simbolis bantuan ambulance dari Bank Jatim sebagai bentuk Corporate Social Responsibility. Bantuan ambulance ini untuk mendukung program layanan ambulance gratis bagi Pekerja Migran Indonesia.
- 4) Penyerahan klaim dan santunan bagi 3 penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk program JKM, penyerahan simbolis 2 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan penyerahan penghargaan bagi Hokky Supermarket Buah yang telah mempekerjakan 3 tenaga kerja penyandang disabilitas melalui Program IJC (Inclusive Job Center) Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur bekerjasama dengan Aora LKP.

Kadisdakertrans Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hadir sendiri, melainkan bersinergi penuh bersama stakeholders untuk mengedukasi dan mempublikasikan informasi peluang kerja yang actual dan berkualitas kepada masyarakat, membantu mempertemukan kandidat potensial dengan perusahaan untuk mempercepat proses penempatan, juga ada fungsi pengembangan kemitraan untuk membuka peluang kerja, pilihan karir yang lebih terbuka dan peluang peningkatan kompetensi bagi masyarakat pencari kerja.*

Mengapa harus Merdeka Berkarir?



Menghadapi berbagai perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang tumbuh pesat saat ini, masyarakat dihadapkan pada tantangan yang berbeda dengan era sebelumnya. Apalagi sekarang kecerdasan buatan (AI) telah mulai dapat menggantikan pekerjaan orang sehingga lulusan SMK dan Perguruan Tinggi harus memiliki sikap berani dan adaptif. Mahasiswa tidak boleh terkungkung dengan apa yang diperolehnya selama kuliah empat tahun. Setiap lulusan harus memiliki keberanian untuk berkarir di luar kemampuan yang dia kuasai atau pelajari selama di kampus.

Ketika menghadiri Sidang Pleno Asosiasi Fakultas Ekonomi & Bisnis Indonesia (AFEBI) yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Malang, Kamis (06/07/2023), Emil Dardak berharap program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dijalankan berbagai kampus mampu merorientasi lulusan. Program Merdeka Belajar harus dapat disambungkan dengan Merdeka Berkarir sehingga diperlukan lulusan yang mampu menjawab tantangan melalui program Merdeka Belajar. "Salah satunya yang harus dilakukan adalah pihak Fakultas dipaksa untuk memampatkan mata kuliah sebanyak 1 semester yang nantinya dapat dipergunakan untuk menambah cakrawala berfikir para mahasiswa melalui program Merdeka Belajar yang nantinya akan berseiringan dengan Merdeka Berkarir," katanya.



Mengapa harus ada Merdeka Berkarir? Wagub Jatim menegaskan bahwa Merdeka Belajar harus dibarengi dengan Merdeka Berkarir. Menurutnya Merdeka Belajar merupakan awal menuju Merdeka Berkarir. Sebab, posisi apapun bisa diraih sekarang jika memiliki prestasi atau achievement (pencapaian). "Artinya kalau merdeka belajar, tapi karirnya gak merdeka ya percuma. Dulu karir mulai dari staf, supervisor, kemudian asisten manajer dan seterusnya. Tapi sekarang tangga karir jauh lebih flat," ujarnya saat menjadi Keynote Speaker Career Center Officer Program (CCOP) Indonesian Career Center Network (ICCN) Wilayah Jawa Timur, Kamis (25/5/2023).

Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan paradigma berkarir saat ini sudah berubah drastis. Hal ini menjadi kesempatan perguruan tinggi untuk berbenah. "Kampus jangan menjadi ivory tower (menara gading), artinya yang ngerti bahasa orang kampus ya cuma orang kampus saja. Tantangan di lapangan hanya sebatas pembahasan tapi tidak pernah diterapkan. Ini yang coba digagas oleh Mas Menteri (Nadiem Makarim) bagaimana Merdeka Belajar ini lebih aplikatif," jelasnya.

Emil mengatakan dalam Merdeka Berkarir, tidak boleh lagi ada istilah salah jurusan. Ia berpendapat saat ini yang terpenting adalah mencoba untuk omni disiplin tidak lagi mono disiplin. "Yang harus dipahami bagaimana saat ini generasi muda ini bisa lebih fleksibel. Masa depan tidak bisa divonis dari empat tahun kuliah. Ada banyak cara menjemput peluang tanpa harus meratapi salah jurusan. Makanya kalau saat ini sudah eranya digital, orang harus ngerti information technology (IT) meskipun cuma sedikit. IT juga harus diimbangi dengan komunikasi," katanya.

Dikatakan Emil, perlu adanya agility atau keluwesan dalam program Merdeka Berkarir. Merdeka Belajar, katanya, mencoba mengeluarkan seseorang dari keterkungkungan untuk Merdeka Berkarir. "Apalagi hal-hal yang sifatnya sangat technical sudah tergantikan oleh kecerdasan buatan artificial intelligence (AI)," imbuh dia.

Untuk mendukung Merdeka Berkarir, lanjut Emil, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan program



Millennial Job Center (MJC) yakni sebuah program yang berusaha memecahkan dua hal dalam satu program. Ini tentu memberi peluang bagi banyak anak muda yang saat ini menguasai teknologi digital. Salah satunya menjadi freelancer profesional.

Rancang Peta Karir

Sementara itu, Presiden Indonesia Career Center Network (ICCN), Teddy Indira Budiwan mengatakan, mayoritas perguruan tinggi tidak mengatur atau mempersiapkan dengan baik mahasiswanya setelah lulus. ICCN menggandeng 500 perguruan tinggi untuk merancang pelaksanaan program pembinaan karir bagi lulusannya, demi menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). "Harapannya para mahasiswa dan lulusan dapat merancang peta karir (jenjang karir) dengan baik, sehingga dapat menjadi insan yang Merdeka Belajar dan Merdeka Karir yang paripurna," jelasnya.

Data Ditjen Dikti Kemendikbudristek mencatat, pada tahun 2020 ada 4.593 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2022, disampaikan pula bahwa perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan 1,5 juta lulusan sarjana maupun diploma setiap tahun. Sementara lapangan kerja yang tersedia, hanya berkisar 300 ribuan tiap tahun. "Berkaca dari data tersebut, perlu langkah dan perencanaan matang agar Sumber Daya Manusia (SDM) produktif yang melimpah, bisa tertampung, tidak sia-sia," katanya.

Sedangkan, Arief Abdurrahman Ketua Indonesia Career Center Network (ICCN) Jawa Timur menjelaskan, program Merdeka Berkarier merupakan langkah meningkatkan serapan tenaga kerja di Jatim, serta menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim hingga tiga persen setiap tahunnya. Arief menyebut langkah ini tidak mudah. Sebab ada perbedaan karakteristik di angkatan kerja saat ini. Salah satunya keinginan kontrak kerja yang fleksibel dan tidak terikat. Namun dunia telah beradaptasi dengan karakter angkatan kerja saat ini, mulai dari pihak swasta hingga BUMN.

Arief mengatakan, salah satu goal dari program ini adalah menciptakan freelancer profesional dengan waktu kerja fleksibel. "Dunia kerja saat ini juga adaptif menjembatani. Oleh karena itu ada yang full time, part time. Bahkan BUMN

sekalipun termasuk sektor swasta juga memfasilitasi bagaimana kemudian mereka ingin berkarier di profesional," jelasnya.

Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Abdul Ghofar, SE., MSi, MAcc., DBA., Ak., CA mengakui bahwa penyesuaian Merdeka Belajar menuju Merdeka Berkarier tidak mudah. "Memang mau tidak mau kita harus meredefinisikan kurikulum kita termasuk kompetensi yang akan kita berikan kepada mahasiswa sehingga otomatis kurikulum akan berubah. Ini tantangan utama kita saat ini," ungkap Ghofar.

Selama ini, Perguruan Tinggi mendidik mahasiswa selama empat tahun, kemudian mereka menerima gelar dan ijazah. "Padahal saat ini trendnya sangat luar biasa. Sertifikasi-sertifikasi yang dulunya menjadi tambahan saat ini menjadi yang utama. Kompetensi tenaga kerja kita menjadi yang utama," ungkapnya.

Sementara itu, Budi Raharjo Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim mengatakan, untuk mencapai implementasi Merdeka Berkarier adalah menyusun ulang program Millennial Job Centre yang mengarah pada konsep jangka panjang. "Kita juga akan membantu adik-adik yang masuk ke arena Job Fair untuk memahami seputar dunia kerja," kata Budi.

Meski demikian, Budi juga menyebut masih ada jarak atau gap antara lulusan dunia pendidikan untuk masuk dunia kerja. Hal itu terbukti dari data Ditjen Dikti Kemendikbudristek pada 2022 perguruan tinggi di Indonesia mencetak 1,5 juta lulusan sarjana maupun diploma. Namun lapangan kerja yang tersedia hanya 300 ribuan setiap tahun. "Entah itu dari pengetahuan, skill, atau attitude. Nah itu saya kira butuh media adik-adik kita sebelum masuk dunia kerja. Mereka harus dipahamkan dunia kerja itu seperti apa. Kita juga harus mendukung program pemerintah untuk perluasan tenaga kerja dan penurunan pengangguran," jelasnya.

Budi menegaskan, perlu adanya manajemen untuk mengelola angkatan kerja ini. Dari data terakhir, 22 persen dari total penduduk Jatim merupakan milenial. Angka itu diprediksi bakal terus meningkat. "Kalau tidak mengelola penduduk yang produktif akan mencanai bencana sosial. Sisi yang lain tantangannya jelas, ada pertumbuhan ekonomi, kondisi global, digitalisasi. Pascapandemi banyak pekerjaan yang ada dan hilang itu jadi tantangan bersama. Saya kira butuh kerja bersama agar generasi milenial lebih siap menuju generasi emas 2045," katanya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah angkatan kerja atau usia produktif mencapai 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah itu diperkirakan bakal bertambah 3,5 juta jiwa setiap tahunnya dan puncaknya pada tahun 2045. Untuk itu, unsur pentahelix mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga dan media telah menggagas program Merdeka Berkarier untuk menyalurkan peluang tersebut.



Bergerak Bersama Mengurangi Pengangguran di Jatim

Meningkatnya jumlah pencari kerja usia muda menjadi perhatian pemerintah di semua tingkatan. Di Jawa Timur, perhatian tersebut dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Semua melakukan sinergi untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah masing-masing.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berkomitmen untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang ditarget mencapai angka di bawah 5 persen tahun 2023. Di antaranya dengan menggelar Job Fair 2023 yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Kota Mojokerto di Basement Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada, Rabu (28/6/2023). Job Fair 2023 yang menyediakan hingga 900 lowongan kerja. "Dalam dua tahun terakhir ini kita berupaya bagaimana bersama-sama memberikan fasilitasi, semoga ikhtiar ini bisa menurunkan tingkat pengangguran bagi Kota Mojokerto," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kota Mojokerto sebesar 5,05 persen atau setara 3.600-an orang pada akhir tahun 2022. Menurutnya, angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan sebelum terjadi pandemi Covid-19 dengan peningkatan tertinggi di tahun 2020-2021. "Semoga, tahun 2023 ini kita ikhtiarkan bersama-sama agar tingkat pengangguran terbuka bisa turun di bawah 5 persen," harapnya.

Komitmen untuk menurunkan TPT juga diupayakan melalui pelatihan kerja. Selama dua tahun berturut-turut, Pemkot Mojokerto berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Timur untuk memfasilitasi warganya mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK). Pada 2022 lalu, sebanyak 304 peserta mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan kelulusan yang bersertifikat standar Badan Sertifikasi Nasional. Dan, sampai tahun 2023 ini, sudah 70 persen yang berhasil mendapat pekerjaan.

Tak hanya itu, semakin gencarnya Pemkot Mojokerto menggelar event-event berdampak juga diharapkan bisa turut menekan angka TPT. Karena melalui berbagai kegiatan



budaya dan festival lainnya membuka banyak peluang pekerjaan baru. Selain menggeliatnya UMKM, warga juga memilih untuk membuka jasa parkir kendaraan. Bahkan, tutur Ning Ita, penghasilannya pun cukup menjanjikan. "Ini fenomena yang terjadi di Kota Mojokerto, sehingga anak-anak muda lebih memilih pekerjaan nonformal tersebut. Karena tidak butuh melamar, ijazah, tidak mengeluarkan pikiran berlebih, tapi dapat jauh lebih besar dibandingkan yang bekerja formal," ulasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo yang turut hadir dalam pembukaan Job Fair berharap TPT Kota Mojokerto bisa kembali turun. "Tingkat pengangguran di perkotaan itu selalu tinggi, mengapa, karena warga nya biasanya memilih pekerjaan, itulah bedanya dengan wilayah-wilayah rural (desa) pekerjaan apa saja dikerjakan," terang Himawan.

Kegiatan job fair juga digelar Pemkab Banyuwangi dengan mengundang 67 perusahaan terdiri dari 52 perusahaan dalam negeri serta 15 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) luar negeri. Banyuwangi Job Fair 2023 dilaksanakan pada tanggal 10-12 Agustus 2023, bertempat di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tawangalun, Banyuwangi. Salah satu perusahaan yang meramaikan bursa kerja tersebut adalah PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero). Melalui kegiatan ini, INKA mengumumkan lowongan kerja (loker) di sejumlah posisi. Dalam bursa kerja tersebut mempertemukan langsung antara pihak perusahaan dengan pencari kerja. Sehingga para pelamar nantinya, bisa memilih posisi mana yang akan diambil sesuai dengan keahlian masing-masing.

Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin juga membuka kegiatan Job Fair 2023 di Gor Gajah Putih, Trenggalek Rabu (26/7/2023). Melalui event yang di gagas oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran di Trenggalek yang sempat meningkat akibat adanya pandemi Covid-19. "Secara sumber daya manusia (SDM), peluang, dan daya saing dari pekerja di sini (Trenggalek) sangat cocok di job fair, jadi harus benar dimanfaatkan," ungkapnya. Job fair diikuti oleh 25 perusahaan atau 4.110 lowongan pekerjaan. Jumlah

tersebut terdiri dari 1.469 lowongan khusus untuk laki-laki, 2.541 lowongan khusus untuk perempuan, dan 100 lowongan untuk laki-laki maupun perempuan.

Pemerintah Kabupaten Jember juga menggelar Job Fair. Job Fair tahun 2023 ini dihadiri oleh 46 tenant perusahaan baik dari Jember maupun luar Jember yang siap memberikan pelayanan terbaik. Job Fair kali ini juga memberikan setidaknya 4 ribu lowongan kerja kepada sejumlah dua ribu lebih pencari kerja. Bupati Jember, Ir. H. Hendy Siswanto., ST., IPU mengatakan dengan Job Fair tanggal 2 s/d 3 Agustus 2023 ini diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi para pencari kerja. "Tentunya dengan tag line wes wayahe pengangguran di Jember berkurang, ini dimaksudkan untuk mempertemukan penyedia lowongan pekerjaan dengan para pencari kerja," ujar Bupati.

Sedangkan Pemkab Tuban menggelat Pameran Bursa Kerja di Hotel Mustika Tuban 26-27 Juli 2023. Adapun pameran bursa kerja diikuti oleh 29 perusahaan dengan 76 formasi dan membutuhkan 2244 tenaga kerja. Kepala Disnakerind Tuban Suwito mengatakan bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang mengikuti pameran bursa kerja memberikan laporan terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. "Dari 2244 yang dibutuhkan tersebut, apakah sudah terpenuhi, perusahaan mana yang belum memenuhi itu akan menjadi catatan kami," ucap Suwito.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky meminta, lulusan-lulusan SMA/SMK sederajat ini perlu dipersiapkan keahliannya atau kompetensi, sehingga ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, mereka sudah mempunyai bekal kompetensinya. "Ketika sudah diberikan pelatihan atau kompetensi, mereka mau melamar di perusahaan, sudah mempunyai sertifikasi atau istilahnya mengantongi SIMlah," paparnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, ketika membuka bursa kerja di halaman Disnakertrans Tulungagung itu berharap peluang atau lowongan kerja yang ada bisa dimanfaatkan para pencari kerja. Total ada 1.500 lowongan untuk berbagai posisi dengan spesifikasi keahlian berbeda disediakan. Menurut Maryoto, peluang kerja di Tulungagung cukup banyak, apalagi saat ini di Kabupaten Tulungagung tengah gencar membangun UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Sedangkan Universitas Negeri Malang menggelar Job Fair dan Higher Education Expo 2023 di Graha Cakrawala. Kegiatan itu diikuti oleh 39 perusahaan nasional dan multinasional. Selain itu, juga ada 20 lembaga perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Job fair kali ini harus melakukan perekrutan karyawan secara langsung. Para pencari kerja tak sekadar mengumpulkan berkas lamaran, tapi langsung proses seleksi. Tidak hanya mahasiswa dan alumni UM saja. Tapi juga mahasiswa dari kampus lain. Siswa SMK pun juga dapat bergabung bila memang ada posisi yang sesuai dengan jurusan yang ditekuni.*





Lindungi Pekerja Rentan dari Kecelakaan Kerja

Pemerintah berupaya melindungi penduduk usia produktif atau pekerja aktif dari kecelakaan kerja. Salah satunya dengan mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja untuk pekerja rentan. Mereka adalah petani, nelayan, pekerja transportasi, pekerja freelance, pelaku UMKM, relawan sosial/bencana, dan pekerja seni dan olahraga. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur (Jatim) segera menerbitkan regulasi perlindungan pekerja. Tak hanya itu, seluruh pemda di Jatim juga didorong untuk mengalokasikan anggaran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya masing-masing. Mulai dari pekerja formal, seperti non-ASN hingga pekerja sektor informal atau pekerja rentan seperti petani, tukang ojek, dan nelayan.

Hal ini secara tegas disampaikan lewat seminar bertajuk 'Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Dukungan dan Implementasi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur'. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem.

Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Makmur Marbun menyampaikan diperlukan upaya bersama untuk menekan angka kemiskinan ekstrem lewat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. "Kenapa ini kami dorong, karena salah satu manfaatnya bagaimana melindungi pekerja-pekerja yang rentan itu. Artinya tidak terjadi lagi kemiskinan yang ekstrem," tegas Makmur.

Lebih lanjut Makmur mengatakan Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan berbagai contoh regulasi yang dapat diaplikasikan kepala daerah. "Kami ingin mempermudah dan mempercepat bagaimana mengatur hal tersebut. Alhamdulillah hampir semua provinsi membuat, tinggal tingkat kabupaten kota yang di Jawa Timur ini," ungkapnya. Untuk pemda yang hanya memakai perjanjian kerja sama (PKS), lanjut Makmur, didorong harus menjadi minimal peraturan kepala daerah. "Bisa dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan wali kota," jelas pejabat Kemendagri tersebut.

Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Muhyidin menambahkan dalam Inpres 02 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari 4 poin besar, yaitu regulasi, coverage, anggaran dan integrasi. Menurutnya, regulasi menjadi faktor krusial untuk mendorong optimalisasi



pelaksanaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan. "Nah, ini yang coba kami dorong ke daerah. Di Jatim sendiri ternyata sudah ada 32 regulasi. Macam-macam bentuknya. Ada Perda, Pergub, Perbup dan Perwali. Kami memastikan sejauh mana efektivitas dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat,"kata Muhyidin.

Secara nasional, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 36 juta pekerja. Muhyidin optimistis jika didukung penuh seluruh pemda, target pemerintah sebesar 43,9 juta pekerja dapat terlampaui di akhir 2023 mendatang. "Jadi masih ada gap yang cukup besar, sehingga kami harus membantu pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pekerja terdindungi BPJS Ketenagakerjaan,"ujar Muhyidin.

Sementara itu, Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur berupaya memperluas kemanfaatannya kepada seluruh pekerja, baik untuk Penerima Upah (PU) atau pekerja formal, ataupun Bukan Penerima Upah (BPU). BPJamsostek Kanwil Jatim menargetkan jumlah seluruh peserta aktif mencapai 4,8 juta dari posisi saat ini sebanyak 4,3 juta peserta, dengan rincian PU sebesar 3,117 juta peserta, BPU sebanyak 953.535 peserta dan pekerja konstruksi sebanyak 820.092 peserta. "Dalam rangka pencapaian target tersebut, ada tiga strategi yang kami terapkan, yaitu retensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Dan ada empat fokus, yaitu ekosistem desa, ekosistem pasar, e-commerce dan UMKM, serta pekerja rentan. Agar target sesuai rencana, maka alat yang kami gunakan ada lima engine yaitu sistem keagenan, tokoh, supply chain, auto debit, compliance & pengawasan positif,"ungkap Kakanwil BPJamsostek Jatim, Hadi Purnomo.

Untuk ekosistem desa, BPJamsostek wilayah Jatim mendorong pemerintah desa mendaftarkan seluruh pegawainya sebagai peserta BPJamsostek agar mendapatkan perlindungan, mulai dari perangkat desa, RT/RW, Bhabinkamtibmas, Bumdes, serta seluruh pekerja desa lainnya. Sementara ekosistem pasar yaitu seluruh pekerja di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. "Bagi pekerja rentan, kami mendorong pemerintah provinsi, kabupaten dan kota ikut serta mendaftarkan pekerja rentan di wilayah mereka. Kita juga mendorong dana bagi hasil cukai tembakau agar bisa membiayai petani di sekitarnya, tidak hanya petani tembakau tetapi semuanya,"kata Hadi Purnomo.

Terus Bertambah

Upaya meningkatkan kepesertaan pekerja rentan dalam program jamsostek mulai menunjukkan hasil mengembirakan. Pemkab dan Pemkot di Jawa Timur mulai merealisasikan program jamsostek bagi pekerja rentan di wilayahnya. Di Kabupaten Blitar, sebanyak 4.717 petani didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar pada bulan September 2023. Pemkab Blitar memberikan bantuan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan kepada ribuan petani tersebut. "Ada 4.717 petani yang kami daftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ini sebagai upaya kami untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja informal khususnya petani,"ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar Tavip Wiyono, Rabu (27/9/2023).



Bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk petani diberikan selama empat bulan mulai September hingga Desember 2023. Sedangkan, nilai anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 300 juta dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. "Rencananya itu selama empat bulan, dan anggarannya dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau," terangnya.

Sebanyak 1000 pekerja rentan di wilayah Desa Kalanganyar, Sidoarjo juga memperoleh perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, berkat dukungan dana CSR JNE Express Cabang Utama Surabaya yang ikut berpartisipasi dalam program GN Lingkaran atau Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan. Program GN Lingkaran itu sendiri merupakan program yang dibangun sebagai sarana bagi masyarakat atau perusahaan yang ingin menyumbangkan donasi dan membayarkan iuran tenaga kerja mandiri atau tidak mampu. JNE Ekspres dengan sukarela melalui dana CSR nya telah bersedia melindungi para pekerja rentan, yaitu pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.

Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Tulungagung diberikan kepada 27.500 pekerja rentan. Perhatian ini karena Pemkab Tulungagung sadar seluruh pekerja rentan harus dilindungi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian. Pemkab Tulungagung mengcover 27.500 pekerja rentan itu dalam BPJS Ketenagakerjaan dari anggaran APBD dan DBHCHT. Pekerja rentan yang dicover di antaranya ojol, tukang bakso, pedagang kecil dan petani.

"Kabupaten Tulungagung ini kan daerah industri. Industri olahan pangan dan UKM-UKM kecil ada di Tulungagung. UKM-UKM kecil saja jumlahnya ada sekitar 25.000. Oleh sebab itu sebagai bentuk tanggung jawab sosial kita harus melindungi para pelaku usaha kecil itu agar aman dan nyaman dalam bekerja dan semakin sejahtera,"kata Bupati Maryoto Bhirowo saat itu. Tahun 2023, Pemkab Tulungagung mengucurkan total anggaran Rp 10 miliar untuk mengcover 27.500 pekerja rentan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Di Jawa Timur total ada sekitar 150 ribu pekerja rentan yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD dan DBHCHT. Dari seluruh kabupaten/kota, Kabupaten Tulungagung menjadi penyumbang tertinggi."

Jaminan Sosial untuk Relawan, Seniman dan Olahragawan

Selain pekerja rentan di sector formal dan informal, Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada para relawan bencana, relawan sosial, olahragawan dan seniman

Selain pekerja rentan di sector formal dan informal, Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada para relawan bencana, relawan sosial, olahragawan dan seniman. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan sosial bagi pekerja pada bidang kebencanaan di seluruh Indonesia. BNPB telah menjalin kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja di bidang kebencanaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Deputi Bidang Pencegahan Dra. Prasinta Dewi, M.A.P mengatakan semakin banyak masyarakat yang mempunyai ketertarikan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik secara sukarela menjadi relawan penanggulangan bencana yang bernaung dalam organisasi maupun mandiri. Berbagai risiko yang dihadapi para pelaku kebencanaan saat melaksanakan tugasnya, seperti keselamatan, penyakit, kematian, hingga terganggunya kesejahteraan saat berakhirnya kontrak kerja. "Melihat tingginya minat masyarakat menjadi relawan Covid-19 di tahun 2020, disamping risiko tinggi yang harus dihadapi, maka BNPB bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan memandang perlu untuk segera menjamin perlindungan para pelaku kebencanaan. Maka diterbitkan Peraturan BNPB Nomor 5

Tahun 2021 yang kemudian diperbaharui pada Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Bidang Kebencanaan," ujar Prasinta, Selasa (27/6/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono sektor kebencanaan yang telah menjadi program prioritas. "Relawan adalah pekerjaan dengan risiko tinggi sehingga perlu mendapatkan proteksi terhadap kecelakaan kerja untuk jiwa dan keluarga. Melalui sosialisasi dan advokasi pada kegiatan ini saya berharap kepada petugas dan pekerja kebencanaan di semua BPBD Provinsi/kabupaten/kota se Jawa Timur, Tim rescuer perusahaan/mitra kerja dan relawan





penanggulangan bencana untuk ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan,”ungkap Adhy.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial Jatim telah memberikan perhatian khusus kepada relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Jatim dengan memberikan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Kepala Dinsos Jatim, Dra Restu Novi Widiani MM, melalui Sekretaris Dinsos Jatim, Yusmanu SST, menjelaskan, pembayaran iuran BPJS TK ini diberikan untuk semua anggota Tagana se-Jatim yang berjumlah 1.900 orang.

“Ini adalah perhatian dari ibu Gubernur Jatim melalui Dinsos Jatim karena Tagana selalu membantu ibu Gubernur dalam setiap kegiatan. Yang terbaru, Tagana turut aktif dalam membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan,” katanya. “Hak yang diterima anggota Tagana sama meskipun ada perbedaan program BPU menjadi PU. Yang kami tekankan dalam pembinaan, ibu Kepala Dinsos Jatim tidak menginginkan ada temuan di lapangan. Jadi, jangan sampai ada anggota yang tidak aktif, tapi tetap mendapatkan hak itu,” tegasnya.

Kebijakan Dinsos Jatim ini mendapat sambutan hangat dari Koordinator Tagana Provinsi Jatim, Twi Adi. Mewakili seluruh anggota Tagana di Jatim, dia mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Dinsos Jatim kepada Tagana yang memberikan rasa aman, rasa nyaman, baik untuk Tagana maupun keluarga yang ditinggal bertugas. “Apalagi ada beberapa kemudahan. Di antaranya, jika kepesertaan

sudah tiga tahun dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya sampai meninggal dunia, ada jaminan beasiswa sampai perguruan tinggi. Selain itu, terjadi kecelakaan kerja kami mendapatkan kemudahan untuk komunikasi dengan rumah sakit-rumah sakit di wilayah Jatim,”ungkapnya.

Perlindungan jaminan sosial juga diberikan kepada para atlet atau olahragawan. Bahkan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sendiri santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada keluarga almarhum Farhat Mika Rahel Riyanto, atlet tinju asal Kotakulon, Bondowoso, Sabtu (16/09/2023). Total santunan JKK yang diberikan Rp 70 juta. Dengan rincian, Rp 48 juta santunan kematian, Rp 12 juta santunan berkala, dan Rp 10 juta biaya pemakaman.

Khofifah menegaskan, insiden yang menimpa Farhat merupakan musibah dan bukan karena kesalahan prosedur dalam cabang olahraga tinju ini.

“Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan diampuni segala dosanya,”ucapnya usai menyerahkan santunan JKK. Khofifah didampingi Kadisnakertrans Jatim Himawan estu Bagijo dan Kakanwil BPJamsostek Jatim Hadi Purnomo.

Hadi Purnomo mengatakan, santunan yang disalurkan bentuk kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. “Kita sampaikan santunan kepada ahli warisnya, karena memang Farhat terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga ahli waris berhak atas manfaat tersebut,”ucap Hadi.

Menurutnya, santunan yang diberikan merupakan bentuk hadirnya negara untuk para pekerja, termasuk atlet yang tengah berlaga di pekan olahraga provinsi (Porprov) VIII di Jombang. “Atlet lain (selain Farhat-red) yang mengikuti Porprov juga sudah (terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan - red). Ada 8700 yang terlindungi, termasuk official-nya,”ungkap Hadi.

Seluruh warga masyarakat khususnya pekerja untuk tidak khawatir dan cemas karena BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung risiko yang timbul dari setiap pekerjaan. “Kalau memang musibah bisa terjadi kapan pun dan dimanapun, untuk itu tidak perlu khawatir dan cemas karena BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung risiko yang timbul dari setiap pekerjaan, sesuai dengan kampanye kami yakni kerja keras bebas cemas,”tandasnya.

Farhat merupakan peserta yang terdaftar di Cabang Surabaya Darmo dan telah terlindungi pada segmen BPU sejak mengikuti kejuaraan tinju amatir pada piala Dandim 0820 Juni 2023. “Kami berharap, atlet-atlet yang mengikuti kejuaraan kedepannya dapat terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Seorang atlet memiliki risiko kerja yang tinggi sehingga wajib untuk dilindungi,”katanya.*



Atasi Pengangguran, Andalkan Pelatihan Kerja

Siapkan Ribuan Paket Pelatihan Kerja di Jawa Timur

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan angka pengangguran usia produktif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab/Pemkot mengandalkan pelatihan kerja bagi warganya. Pada tahun 2023, Pemprov Jatim menyediakan ribuan paket pelatihan yang dapat diakses secara gratis oleh para pencari kerja, terutama tenaga kerja usia muda. "Pelatihan kita sudah sangat beragam. Ada public speaking, barbershop, service HP, atau make up. Pelatihan ini melengkapi jenis pelatihan yang sudah ada, di bidang penyiapan tenaga kerja industri, manajemen, dan pengolahan hasil pertanian," kata Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo. Setiap program terdiri dari 16 peserta dengan jam pelajaran selama antara 240 jam pelajaran sampai 600 jam pelajaran.

Saat membuka pelatihan tenaga kerja di UPT BLK Tulungagung, Selasa (4/7/2023), Himawan mengatakan, pelatihan kerja di Jatim tidak hanya didanai oleh APBD Pemprov Jatim saja, namun merupakan kerjasama antara Disnakertrans Provinsi Jatim dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Dengan memiliki keterampilan mereka punya harga tawar, sehingga dalam bekerja sudah tidak menyulitkan pemberi kerja karena sudah dilatih dan nanti ada sertifikasi," tandasnya. Ppeserta pelatihan kerja tidak hanya dibekali dengan materi hard skill, tetapi juga materi soft skill. Di antaranya cara wawancara dan cara menghadapi dunia kerja.

Pelatihan kerja di BLK Tulungagung bukan hanya diikuti pencari kerja muda, namun juga calon tenaga kerja penyandang disabilitas dan calon pekerja migran Indonesia (CPMI). "Ibu Gubernur Jawa Timur selalu memerintahkan pada kami, yakni CPMI dan disabilitas harus menjadi proses

yang kita libatkan dalam pelatihan-pelatihan di BLK," ujar Himawan.

Himawan menyebut penyandang disabilitas dan CPMI punya hak yang sama dengan yang lainnya dalam mendapat pelatihan kerja. "Ini perintah. Kepala UPT BLK harus menyediakan slot untuk disabilitas dan CPMI," tandasnya. Para penyandang disabilitas mendapat pelatihan dan pembekalan tentang pembuatan roti dan kue. Sedang untuk CPMI adalah houskeeping (manajemen tanggung jawab dalam mengurus pekerjaan rumah tangga). "Sementara untuk yang pencari kerja fresh graduate ada beberapa program pelatihan. Seperti pembuatan desain grafis, desainer multi media dan pengoperasian mesin produksi," paparnya.

Selain pelatihan kerja di tingkat provinsi, warga Jawa Timur juga berhak mengikuti pelatihan kerja di kabupaten atau kota. Di antaranya, Pemkab Gresik yang melatih 48 warga tiga kecamatan (Bungah, Kedamean, dan Menganti), mendapatkan pelatihan keterampilan kerja sekaligus sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). "Ini menjadi modal awal. Mudah-mudahan peserta yang mengikuti pelatihan, mendapatkan ilmu sekaligus sertifikat menjadi lebih percaya diri untuk bersaing di dunia kerja," terang Bupati fandi Akhmad Yani saat membuka acara.

Pelatihan kerja meliputi tiga bidang. Diantaranya pelatihan konstruksi rangka atap baja ringan yang diikuti peserta 16 orang selama 23 hari, pelatihan digital marketing yang diikuti 16 orang selama lima hari, dan pelatihan menjahit yang diikuti 16 orang selama 16 hari. Bupati Yani, upaya pelatihan kerja ini, menjadi salah satu senjata Pemkab Gresik dalam menurunkan angka pengangguran. Data BPS

mencatat, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik tahun 2022 berada pada angka 7,84 persen, yaitu 56.501 orang. "Setelah mengikuti pelatihan ini, harapannya, para peserta dapat bekerja di perusahaan atau menciptakan lapangan kerja bersama (UMKM) sehingga dapat membuka lapangan kerja baru,"katanya.

Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir para pencari kerja, dengan menggelar Program Ayo Kursus, yakni sebuah program pelatihan kerja bagi SDM daerah. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1400 orang telah lulus pelatihan berbagai bidang kerja sepanjang 2022 lalu. Di program ini, tersedia berbagai pelatihan yang bisa diikuti. Mulai dari mencukur rambut (barbershop), menjahit, digital marketing, hingga pemberian bantuan alat usaha.

Selain itu, Pemkab juga rutin menggelar inkubasi pengusaha muda melalui program Jagoan Banyuwangi. Anak-anak muda Banyuwangi diberikan mentoring cara berbisnis di era digital, hingga stimulus modal usaha senilai ratusan juta rupiah. "Dengan berbagai program yang kita lakukan ini harapannya tidak hanya mengandalkan lowongan pekerjaan tapi juga bisa membuka lapangan kerja mandiri,"terang Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Sedangkan Pemkot Surabaya memanfaatkan lahan atau aset milik Pemerintah Kota Surabaya menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa, mengatakan, ketika warga Surabaya memanfaatkan lahan/aset Pemkot untuk kegiatan padat karya maka diharapkan pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang. "Dalam membangun sebuah kota, harus ada campur tangan warganya sehingga dengan adanya Rumah Padat Karya ini bisa digunakan bersama-sama untuk warga yang belum mendapatkan pekerjaan," kata Eri.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo memberikan pelatihan dasar menjahit dan perawatan pendingin ruangan (AC) sebagai salah satu upaya untuk menekan penanggungan di daerah setempat. Pemkab Sidoarjo juga memberikan pelatihan pembuatan bagian atas sepatu. Pelatihan dilakukan secara berturut-turut, yaitu pada 15 Agustus 2023 hingga 7 September 2023, diikuti 80 peserta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan kegiatan ini bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo untuk turut menekan angka pengangguran di daerah setempat. "Pelatihan seperti ini merupakan upaya kami untuk menekan pengangguran di Sidoarjo. Kita berusaha memberikan peningkatan kemampuan kepada peserta yang memang membutuhkan lapangan pekerjaan agar mereka tidak mengandalkan pekerjaan formal namun cukup dengan sektor informal,"ucapnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, angka pengangguran di daerah tersebut pada 2021 tercatat 10,87 persen, turun 2,07 persen pada 2022 menjadi 8,8 persen.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang melatih puluhan



siswa SMK untuk siap bekerja. Pelatihan itu diharapkan mendorong lulusan sekolah bisa langsung bekerja dan tidak menganggur. Pelatihan memasuki dunia kerja dilakukan dua tahap. Tahap kedua dilakukan pada 2-5 Mei 2023. Adapun tahap pertama sudah dilakukan pada Maret lalu. Peserta pelatihan adalah 133 siswa dari 32 SMK di Kabupaten Malang untuk setiap tahapnya. "Bidang Pelatihan dan Produktivitas (Lattas) Tenaga Kerja mempunyai tugas mempersiapkan pelajar menjadi pekerja siap kerja. Dengan kegiatan seperti ini, semoga menjadi salah satu problem solving untuk mengatasi masalah pengangguran lulusan SMK,"kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo, Jumat (5/5/2023).

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mengurangi angka pengangguran di wilayah setempat dengan menggelar pelatihan berupa teknis dan perakitan komputer guna meningkatkan daya saing para pencari kerja. "Pelatihan ini diikuti sejumlah 20 orang pencari kerja dari tujuh kecamatan di Kabupaten Magetan dengan harapan dapat menerima bekal keterampilan teknis dan perakitan komputer bagi para pesertanya,"kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Magetan Arief Ridwan. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Disnaker Magetan tahun anggaran 2023 dengan menggunakan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Para peserta pelatihan yang telah terdaftar akan dilatih selama sekitar 20 hari mulai tanggal 5-27 September 2023.

Ia menambahkan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja, sehingga mampu membuka peluang untuk diterima bekerja di perusahaan ataupun menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Salah satunya dengan menggelar sejumlah pelatihan bagi masyarakat. Pelatihan tersebut diharapkan bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan memberikan keahlian atau skill bagi warga, sehingga mereka bisa membuka usaha atau terserap di dunia

pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu mengungkapkan bahwa angka pengangguran di Kota Batu pada tahun 2023 tercatat sebanyak 10.400 jiwa. Angka tersebut membuat Kota Batu masuk urutan kedua dengan jumlah pengangguran terbanyak di Jatim. "Dari 320 kuota yang disediakan, sejauh ini yang mendaftar masih 247 orang. Peserta bakal mengikuti beberapa pelatihan antara lain digital marketing, admin perkantoran, perhotelan, dan pelatihan kecantikan kulit,"ujarnya. Kuota yang dibutuhkan tata kecantikan kulit 75 orang, digital marketing 60 orang, admin perkantoran 60 orang dan perhotelan 125 orang.

Ketua Kadin Kota Batu, Endro Wahyu Wijoyono menyatakan, persaingan bisnis dan tenaga kerja saat ini telah mengalami perkembangan. Dibutuhkan ketrampilan kerja yang benar-benar spesial untuk memenuhi kebutuhan industri. Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto menyampaikan, Kota Batu punya potensi industri yang cukup bagus. Utamanya dalam bidang perhotelan, namun Sumberdaya Manusia (SDM) nya masih perlu dikembangkan.

"Di Kota Batu dan Malang Raya ini sangat banyak sekali industri perhotelan. Dengan adanya pelatihan ini, kami ingin fokus terhadap pendidikan vokasi. Sehingga SDM yang ada, ketika nantinya masuk dunia kerja, bisa memiliki kemampuan sesuai yang dibutuhkan industri,"kata Adik.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengharapkan setelah melalui jalannya pelatihan, skill (kemampuan) SDM di Kota Batu bisa meningkat. Sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Batu. "Kebutuhan tenaga kerja dengan skill yang dibutuhkan saat ini masih sangat minim. SDM di Kota Batu ini mungkin banyak, akan tetapi belum banyak yang memiliki skill sesuai yang dibutuhkan dunia kerja saat ini,"kata Aries.

Melalui pelatihan tersebut, pihaknya berkeinginan masyarakat yang ingin masuk ke dunia kerja bisa terbantu. Selain itu masyarakat yang berada di taraf pengangguran bisa bangkit dan termotivasi. "Jika semua berjalan sesuai yang diharapkan. Kami yakin angka pengangguran di Kota Batu bisa berangsur-angsur menurun,"tandasnya."

Pemprov Jawa Timur diminta untuk meningkatkan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang membludak akibat pandemi Covid 19. Salah satunya adalah dengan menambah anggaran program pelatihan bagi lulusan SMK agar mereka bisa mandiri dan membuka usaha. Hal itu dikatakan oleh anggota DPRD Jawa Timur Achmad Silahuddin saat menggelar reses di halaman makam mbah Wahab Hasbullah desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Rabu (5/6/2023). "Paling tidak anggaran itu ditambah karena banyak anak-anak yang nganggur karena itu harus ada pelatihan supaya anak-anak keluar skillnya, dan nantinya harus ada wujud agar anak-anak nanti setelah mengikuti pelatihan bisa membuka usaha,"katanya.

Dia mengatakan, adanya pembatasan wilayah akibat pandemi Covid 19 membuat lulusan SMK kesulitan untuk mencari pekerjaan. Lesunya ekonomi akibat pandemi covid membuat lulusan SMK tidak bisa tertampung karena banyak perusahaan yang telah tertutup dan mengurangi jumlah karyawannya. "Bayangkan saja lulusan SMK yang akan kerja di luar harus melakukan tes swab yang mungkin berat. Dan lapangan pekerjaan di wilayah-wilayah lain juga terbatas karena kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi covid 19," tambahnya.

Politisi PPP Jawa Timur itu juga meminta agar perangkat desa bisa kreatif dalam menjalankan BUMDes. Pasalnya, jika usaha di desa tersebut eksis, maka mereka tidak lulusan SMK tidak perlu mencari pekerjaan di wilayah lain. "Nanti rencananya juga akan membuka pom bensin di desa-desa sehingga ia bisa nanti ada pom bensin mini dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya," tegasnya.

Dewan Minta Latihan untuk Siswa SMK



Dia juga meminta agar perangkat desa di wilayah tersebut kreatif untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desa. Salah satunya adalah menghidupkan wisata kuliner agar semakin diminati oleh masyarakat luar. Sehingga perekonomian di desa bisa lebih hidup dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat pelaku UMKM."

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR
UPT BLK SINGOSARI

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Program APBN dan APBD

Kejuruan
IV

PROGRAM PELATIHAN :

- ✓ Barbershop
- ✓ Batik Tulis
- ✓ Tata Boga
- ✓ Juru Ukur
- ✓ Pengelola Admin Perkantoran
- ✓ Practical Office Advance
- ✓ Servis Sepeda Motor
- ✓ Teknisi Telepon Seluler



PERSYARATAN :

- Usia antara 17 - 45 tahun
- Pendidikan formal minimal SMP/SLTP
- Pendaftar tidak sedang menempuh pendidikan/kuliah/sebagai pejaor aktif

Akses GRATIS!
Kuy buruan
daftar!



TIMELINE PENDAFTARAN:

- Pendaftaran Online : 20 s.d. 30 Juni 2023
- Pelaksanaan Tes : 05 Juli 2023
- Pengumuman Hasil Seleksi : 07 Juli 2023

DAFTAR DISINI :



bit.ly/daftaregs2023-tahap-4

INFORMASI LEBIH LANJUT :

+62-334-319-225

@blk_singosari

J. Raya Singosari, Singosari

Tidak Melulu Tenaga Kerja Industri

introduction, menggunakan ungkapan-ungkapan umum dalam bertelepon/using general expressions in telephoning, melakukan panggilan telepon/making telephone, melakukan percakapan sehari-hari tingkat dasar di tempat Kerja/Basic Daily Conversation at Work, melakukan percakapan sehari-hari tingkat terampil di tempat kerja/Intermediate Daily Conversation at Work, membuat materi presentasi, melakukan presentasi/Giving Presentation dan membuat ringkasan dan laporan/Writing Summaries and Reports. Pelatihan ini dilaksanakan selama 33 hari mulai dari tanggal 19 Juni sampai 8 Agustus 2023.

Secara garis besar, siswa pada program pelatihan ini akan dilatih untuk mampu menjadi pemandu acara, pembaca berita, reportase dan segala hal yang berhubungan dengan berbicara di depan publik. Ummu Lathifah selaku penanggung jawab pelatihan ini mengatakan bahwa di awal para siswa sebagian besar masih malu untuk berbicara di depan. Namun akhirnya hal itu diatasi dengan melakukan treatment kecil, yaitu setiap hari para siswa diberikan kata kunci dan harus menjelaskan hal tersebut selama 30 detik hingga 1 menit. Hal ini dilakukan selama satu minggu, kemudian dilanjutkan dengan diberikan suatu tema dan diwajibkan untuk menjelaskan hal tersebut selama 5 menit. Lambat laun para siswa mulai meningkat kepercayaan dirinya.

Selain dilatih oleh instruktur dari kejuruan Bisman, pada program ini juga mendatangkan praktisi yaitu news anchor dari TVRI Jatim dan Pranata Humas Disnaker. Kedua praktisi tersebut memberikan banyak pandangan baru bagi siswa. Sehingga mereka bisa memahami langsung cara menjadi pembicara yang baik.

Output dari pelatihan ini ialah siswa yang awalnya pemalu dan tidak percaya diri dalam berbicara di depan umum kini mereka mampu untuk berbicara di depan umum. Tidak hanya asal berbicara, siswa dapat menyampaikan dengan runtut apa yang ingin mereka sampaikan dengan beberapa bagian. Diawali dengan pembuka, inti dan penutup. Jadi tidak hanya pintar bicara, namun bicara pintar. Diharapkan ke depannya program pelatihan ini dapat diadakan secara berkala di UPT BLK Surabaya untuk mencetak generasi yang selaras dengan perkembangan jaman dalam hal pantas untuk tampil di depan publik sebagai pembicara. (Kiriman Sarah Fahira Adriati, S.T. – UPT BLK Surabaya)

Jenis kejuruan atau pelatihan kerja yang dibuka di Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jatim kini semakin berkembang. Jika semula lebih banyak menyiapkan pencari kerja untuk memasuki dunia industri, kini pelatihan lebih diarahkan untuk membuka usaha mandiri atau membuka lapangan kerja baru. Jenis kejuruan untuk industri, seperti las, bubut, listrik jaringan, otomotif, CNC/PLC, kayu dan rotan, serta manajemen perusahaan tetap dibuka, namun kini juga mengembangkan jenis2 kejuruan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Misalnya, make up, salon pengantin, barbershop, servis HP, dan public speaking atau english for frontliner.

Pelatihan barbershop diberikan oleh BLK Singosari. Sedangkan public speaking dan English for frontliner diberikan oleh UPT BLK Surabaya. Public speaking dan English for frontline merupakan pengembangan dari kejuruan Bisnis dan Manajemen (Bisman). Pada tahun 2023 ini, kejuruan Bisman membuka satu program pelatihan baru yaitu public speaking/english for frontliner. Tujuan diadakannya program pelatihan baru ini ialah untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja dimana anak jaman sekarang kekurangan skill dan hal komunikasi. Hal ini menyebabkan beberapa generasi muda yang sering kali menolak pekerjaan sebagai sales executive dikarenakan tidak percaya diri dengan kemampuan berbicara di depan publik. Padahal untuk era sekarang, kemampuan berbicara merupakan modal besar untuk mencapai kesuksesan. Sehingga dengan dibukanya program pelatihan ini cukup menarik animo masyarakat.

Unit kompetensi yang disajikan pada program ini antara lain memberi salam/greetings, melakukan perkenalan/



Pantau Keberhasilan Transmigran asal Jawa Timur

Sebagai daerah pengirim transmigran, Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap transmigran yang sudah ditempatkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melaksanakan monitoring dan evaluasi pascapelatihan tahun 2023 di UPT Bekkae SP2 Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13-15 September 2023.

Sebelumnya, berlokasi di Desa Matanghana Kec. Lampihong Kab. Balangan Kalimantan Selatan, petugas Pemkab Trenggalek juga melakukan kunjungan ke lokasi

transmigran asal Kab. Trenggalek yang ditempatkan sejak tahun 2009. Sebanyak 15 KK dengan mata pencaharian sebagai petani sawit di tempat tersebut. Para transmigran ini sudah cukup berhasil yakni sudah memiliki lahan pribadi sebesar 1,5 sampai 2 hektar kelapa Sawit.

Turut hadir pada kegiatan monitoring dan evaluasi pascapelatihan tersebut adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang yang menangani Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Wajo Prov.Sulsel. Adapun transmigran yang diwawancarai terkait monitoring dan evaluasi sebanyak 10 orang transmigran dari daerah Asal Jawa Timur yaitu: Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan Kabupaten Trenggalek, Probolinggo.

Pada kesempatan tersebut Kepala Disnakertrans Kab.Wajo Prov. Sulsel menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian tinggi pada program transmigrasi sebab program transmigrasi masih sangat diperlukan untuk pemerataan penduduk di wilayah Indonesia khususnya wilayah Kab. Wajo Sulsel. Diharapkan transmigran yang ditempatkan di UPT Bekkae SP2 Kab.Wajo bisa meningkatkan kesejahteraannya serta permasalahan-permasalahan yang pernah dialami dapat diselesaikan dengan baik dan tidak terulang kembali.

Ia mengimbau kepada seluruh jajaran pejabat di Kabupaten Wajo yang menangani ketransmigrasian agar dalam melaksanakan kegiatan ketransmigrasian untuk tetap berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sehingga pelaksanaan program ketransmigrasian dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan dan lebih berkualitas.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar melalui Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, pada tanggal 21-24 Februari 2023 juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap





transmigran asal Kabupaten Blitar yang telah ditempatkan ke UPT. Tanjung Buka SP.10 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Transmigran diberangkatkan sejak tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 3 KK (9 jiwa). Kegiatan ini di koordinir oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Tim melaksanakan pengumpulan data kesejahteraan transmigran untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan yang telah dicapai, serta permasalahan-permasalahan apa saja yang masih dihadapi oleh transmigran asal Kabupaten Blitar di lokasi transmigrasi. Tim Monev berpesan agar warga transmigran asal Kabupaten Blitar tetap semangat untuk bekerja keras dan cerdas menangkap peluang yang ada di lokasi transmigrasi untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

Identifikasi Kebutuhan

Tujuan monitoring dan evaluasi pascapelatihan adalah untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pasca pelatihan transmigran asal Jawa Timur, mengidentifikasi permasalahan pasca pelatihan yang dihadapi transmigran, mengetahui manfaat pelatihan terhadap alumni pelatihan dalam hal pengembangan usaha di desa guna meningkatkan produktivitas usaha/lahan, mengetahui jenis-jenis pelatihan lanjutan yang diperlukan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh warga desa (pelatihan dan kecakapan pendukung) dan berguna untuk peningkatan pendapatan, produktivitas dan kemandirian, menentukan jenis-jenis pelatihan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mendukung tercapainya taraf hidup dan kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pascapelatihan adalah tersedianya data potensi tentang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, kondisi ekonomi serta sosial budaya yang dapat dipergunakan untuk pengembangan kelompok usaha alumni yang pada akhirnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa, teridentifikasinya dampak pelatihan terhadap masyarakat / tingkat partisipasi masyarakat (non alumni). Juga terkumpulnya data tentang kecakapan eksisting yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu data yang diperoleh merupakan cerminan dari kemampuan dan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelatihan. Dalam hal ini terhadap upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat desa yang sangat berguna untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum pelatihan, teridentifikasinya jenis-jenis kebutuhan pelatihan, kebutuhan pembinaan dan instansi yang terlibat dalam pembinaanserta inovasi sosial yang diperoleh dari analisa bersama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. (Mardalena, Fungsional. PSM Bidang Transmigrasi)

Padat Karya Atasi Pengangguran dan Kemiskinan Ekstrim

Dewi Munir, penjahit UMKM Benang Emas dari Koperasi Sumber Mulia Surabaya, merasa sangat terbantu program padat karya Pemkot Surabaya. Ia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota (Wawali) Kota Surabaya Armuji yang telah memberikan banyak peluang pendapatan melalui program Padat Karya. Dewi tidak menyangka, dengan mengikuti program Padat Karya, kini ia bisa mendapat Rp 4 juta lebih per bulannya. "Alhamdulillah saya bisa terlepas dari data Keluarga Miskin karena ikut program binaan Pemkot Surabaya. Saya berterima kasih kepada Pak Eri dan Pak Armuji karena warga Surabaya diberikan peluang yang begitu banyak, serta selamat ulang tahun untuk Kota Surabaya,"kata Dewi Munir.

Senada dengan itu, Syaiful Anas warga Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya yang mewakili para pembuat paving mengaku bahwa sebelumnya mengikuti program Padat Karya, ia terpaksa menutup usaha warungnya akibat pandemi COVID-19. Kini, setelah mengikuti program tersebut, pendapatan yang ia terima mencapai Rp 5-6 juta per bulannya. "Setelah ikut Padat Karya, Alhamdulillah merubah perekonomian dan meningkatnya taraf hidup saya. Semua fasilitas dari Pemkot Surabaya, sekarang penghasilan bisa mencapai Rp 5-6 juta per bulan. Terima kasih untuk Pemkot Surabaya dan jajarannya, serta Pak Eri dan Pak Armuji,"kata Syaiful Anas.

Sedangkan Fitria memilih untuk mengelola usaha Toko Kelontong melalui program Padat Karya. Kini pendapatannya mencapai RP 2 juta per bulan. Sebab, sebelumnya hanya mencapai Rp 500 ribu per bulan. "Alhamdulillah bisa meningkatkan perekonomian keluarga saya. Terima kasih Pak Eri dan Pak Armuji, lewat Toko Kelontong bisa membantu saya keluar dari Keluarga Miskin,"tandas Fitria.

Program padat karya bukan hanya menurunkan pengangguran terbuka, namun juga angka stunting dan angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, awal tahun 2022 jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Kemudian pada akhir tahun 2022, jumlah warga miskin turun drastis menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK. Selanjutnya, hingga bulan Juni 2023, data keluarga miskin di Surabaya tersisa 172.129 jiwa atau 58.835 KK. "Di tahun 2023 ini, keluarga miskin ini saya minta sudah kerja semuanya dengan model padat karya dan intervensi lainnya, sehingga setiap anggaran yang kita keluarkan benar-benar tepat sasaran dan bisa menyejahterakan warga Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Sejak tahun 2022, Pemkot Surabaya terus bergerak menggalakkan Padat Karya. Tahun 2023 sudah ada 34 Rumah Padat Karya yang terletak di 14 kecamatan. Bentuk Rumah Padat Karya itu bermacam-macam di setiap wilayah,

ada yang berbentuk kafe, sentra menjahit, laundry, cuci kendaraan, perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), budi daya pertanian dan peternakan, Rumah Maggot hingga Pembuatan Paving. Bahkan, saat ini sudah ada puluhan jenis intervensi yang diberikan kepada keluarga miskin di Surabaya.

Dengan adanya program Padat Karya dan berbagai jenis intervensi itu, sekitar 22 ribu jiwa warga miskin dan miskin ekstrem bisa bekerja kembali. Kini, penghasilan mereka yang awalnya hanya Rp 500 ribu meningkat tajam hingga mencapai Rp 4,4 juta per orang setiap bulannya. Ada beberapa yang sampai tembus Rp 6 juta per bulan. Program ini terus berjalan dan terus dikembangkan hingga saat ini. "Jadi, tujuan akhir dari program Padat Karya ini adalah mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya. Makanya, saat mengembangkan padat karya, semua pihak saya minta tidak hanya meninggalkan ego sektoral, tetapi juga harus memiliki kebersamaan dan gotong royong. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan setempat bisa digerakkan," katanya. Ia juga memastikan bahwa program padat karya ini memanfaatkan aset sekitar 9,5 juta atau 9.555.372 meter persegi lahan kosong atau lahan tidur milik Pemkot Surabaya.



Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa warga yang mengelola lahan itu tidak perlu khawatir soal kemampuannya dalam mengelola lahan tersebut. Sebab, warga itu mendapat pendampingan dan pelatihan dari para ahli dan jajaran Pemkot Surabaya. "Mereka juga dibagi dalam pemanfaatan lahannya, karena harus disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal mereka. Jadi, sudah ada kelompok warga miskin yang bertanggung jawab di setiap lahan, dan pastinya itu selalu diawasi oleh jajaran pemkot," katanya.

Menurut Wali Kota Eri, karena sudah banyak yang bekerja, akhirnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Surabaya turun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2022 menurun 2 persen, tepatnya di angka 7,62 persen. Sebelumnya, angka pengangguran terbuka itu naik drastis

pada tahun 2019 di angka 5,76 persen. Kemudian, pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 meningkat menjadi 9,79 persen. Selanjutnya, pada tahun 2021 angka TPT itu menjadi 9,68 persen, dan akhirnya pada 2022 di triwulan II turun menjadi 7,62 persen. "Ini berarti APBD yang kami tetapkan bersama DPRD Surabaya berhasil, terbukti dengan adanya penurunan angka pengangguran terbuka. Alhamdulillah ini juga diikuti oleh angka kemiskinan di Surabaya juga turun menjadi 172.129 jiwa atau 58.835 KK per bulan Juni 2023," tegasnya.

Solusi Dampak Pandemi

Menindaklanjuti release Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, tentang angka pengangguran di Jawa Timur yang naik sebesar 2,03 persen atau berjumlah 466.015 jiwa selama pandemi covid 19, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Tenaga Kerja juga melakukan berbagai program kegiatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, salah satunya dengan program Padat Karya.

Program padat karya di Kabupten Kediri merupakan kegiatan yang setiap tahun selalu dilaksanakan utamanya untuk pembangunan sarana dan prasarana desa. Namun di era pandemi, program padat karya lebih diutamakan dengan



mempekerjakan warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi atau dalam kategori mempunyai pekerjaan namun tidak menentu.

Salah satu desa yang sedang melakukan padat karya yakni Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul. Sebanyak 104 warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengikuti program ini untuk melakukan normalisasi aliran sungai, karena jika hujan lebat arus sungai akan meluap hingga membanjiri sawah warga yang berujung gagal panen.

Dalam kegiatan ini, setiap pekerja diberikan upah sebesar Rp 70.000 per hari atau 6 jam kerja yang dimulai pukul 06.30 hingga 12.30 WIB. Menurut Kepala Desa Kayen Kidul, Bambang Agus Pranoto, Program Padat Karya tahun 2021 merupakan program rutin desa yang diselenggarakan



untuk pembangunan sarana maupun prasarana penunjang kegiatan masyarakat. "Salah satu alasan kami mempekerjakan banyak orang ini untuk pemulihan ekonomi warga yang terdampak akibat adanya pandemi covid 19 dengan memberikan pekerjaan baru," kata Kades.

Sementara itu, Jumadi Kabid Transmigrasi dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Kediri mengungkapkan, padat karya merupakan program pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun desanya sendiri. "Program padat karya ini merupakan program yang sejak dulu telah ada, namun saat ini sistem dan polanya yang berubah, dimana hasilnya dikembalikan lagi ke masyarakat desa tersebut," ungkap Jumadi.

SKB 4 Menteri

Program padat karya merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 4 Menteri pada tahun 2017, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan. Program padat karya (cash for work) ditujukan untuk pekerjaan bagi masyarakat seperti pembangunan sanitasi lingkungan, kegiatan penghijauan, dan pembangunan infrastruktur perdesaan, sebagaimana kebutuhan setiap daerah.

Program padat karya sangat tepat karena banyaknya sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Salah satu wujud pekerjaan program padat karya adalah konstruksi perbaikan jalan, saluran air, dan sebagainya, dengan tujuan mengurangi angka pengangguran.

Kementerian Desa PDTT melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan melaksanakan kegiatan Launching Gerakan Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Teluk Bakau, Kab. Bintan, (Kamis, 2/2/23). Kegiatan launching gerakan PKTD sebagai rangkaian Hari BUMDesa ini diharapkan mampu menjadi gong dalam pelaksanaan program PKTD. Diketahui Gerakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dilaksanakan selama dua periode dalam satu tahun yakni di bulan Februari dan Agustus, tujuannya mendukung program nasional.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyampaikan program PKTD bisa mengurangi angka pengangguran di desa. "Serap dana desa untuk padat karya tunai, saya yakin desa akan memberikan kontribusi yang sangat bagus bagi penurunan kemiskinan dan pengangguran," ujar pria yg di sapa Gus Menteri ini. Gus menteri juga berharap agar program tersebut bisa menggunakan tenaga kerja dengan memprioritaskan beberapa kalangan. Seperti terutama kaum marginal dan menjadi kepala keluarga.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai



(PKT/cash for work) Tahun Anggaran (TA) 2023 guna mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan hingga ke desa/pelosok serta mendorong perekonomian masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Alokasi anggaran PKT bidang permukiman TA 2023 sebesar Rp 2,1 triliun dengan progres penyerapan keuangan hingga Semester I tahun 2023 (per 12 Juni 2023) sudah 42,47% dan pekerjaan fisik mencapai 13,38%.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan alokasi anggaran Padat Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2023 disalurkan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dukungan Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). "Berdasarkan pemantauan sampai saat ini terdapat sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 15.639 orang dari rencana total penyerapan tenaga kerja sebanyak 62.000 orang," kata Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.

Pada TA 2023, Ditjen Cipta Karya melaksanakan program Pamsimas di 1.063 desa dengan progres fisik 15,33% dan

menyerap tenaga kerja 1.698 orang. Selanjutnya untuk Sanimas di 1.890 lokasi dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 5.157 orang.

Program padat karya bidang permukiman lainnya adalah pembangunan sanitasi Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan yang tersebar di 1.550 lokasi di Indonesia. Pelaksanaan program ini di antaranya pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestic dengan progres fisik 13,37% dan menyerap 2.533 tenaga kerja.

Kemudian TPS3R di 307 lokasi dengan capai penyerapan tenaga kerja 528 orang. Pembangunan TPS-3R dengan melibatkan masyarakat diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tetapi juga memberikan pembelajaran serta praktik langsung kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, sementara di sisi lain juga terjadi penyerapan tenaga kerja karena dilaksanakan dengan skema padat karya.

Sedangkan program PISEW yang dilaksanakan di 1.340 kecamatan di Indonesia. Saat ini progres fisik keseluruhan sudah mencapai 15,89% dan telah berkontribusi menyerap dengan serapan tenaga kerja 5.106 orang. Program PISEW dilakukan melalui dukungan infrastruktur dasar di skala kawasan seperti perbaikan saluran drainase dan perbaikan jalan lingkungan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

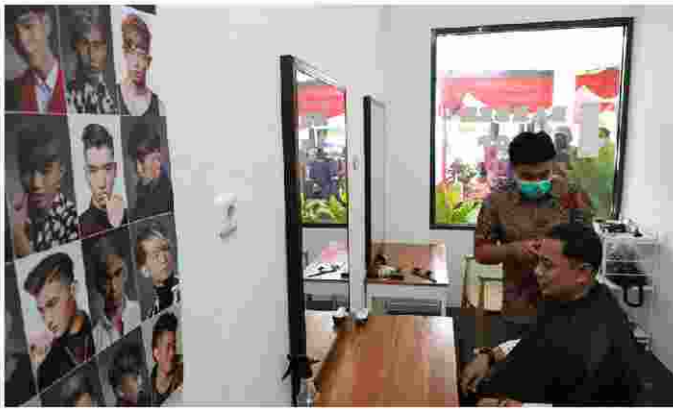
Kementerian PUPR melanjutkan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) bidang permukiman pada TA 2024 dengan alokasi anggaran Rp2,11 triliun. Besar anggaran tersebut diharapkan dapat berkontribusi menyerap tenaga kerja sebanyak 47.000 orang melalui pekerjaan Pamsimas di 1.183 lokasi, Sanimas di 1.546 lokasi, Sanitasi LPK di 1.279 lokasi, PISEW di 738 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, termasuk mendukung program Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 15 lokasi.*

DPRD: Jangan Jadi Proyek Mercusuar

Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony menyikapi salah satu strategi Pemkot Surabaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan memperbanyak program rumah padat karya. Menurutnya, program padat karya semestinya tidak hanya sebatas proyek mercusuar yang tidak memiliki pondasi yang kokoh. Sehingga dalam pelaksanaannya, tidak tepat sasaran dan tidak mengena bagi masyarakat.

Untuk itu, ujar dia, Pemkot Surabaya harus jeli dalam memilih dan memilah program kerja apa yang akan diberikan kepada masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan. Terutama dalam kaitan dengan mengurangi ketergantungan masyarakat dari bantuan uang tunai yang





selama ini diterima secara cuma-cuma. "Ini harus menjadi perhatian serius, bagaimana pemkot kemudian jeli memberikan apa yang akan dikerjakan masyarakat sebagai pengganti bantuan tunai dan nantinya bisa menghasilkan pendapatan,"katanya.

AH Thony menyampaikan, kunci utama adalah potensi masyarakat harus bisa diverifikasi baik keahlian, kemampuan, dan kecapakannya sehingga padat karya yang diberikan benar-benar pas dan bisa dilakukan. "Ibaratnya, orang tidak bisa jalan, jangan diberi pekerjaan yang sekiranya membutuhkan mobilitas tinggi dengan berjalan,"kata dia.

Kemudian yang kedua, katanya, adalah mengenai data masyarakat. Ini, ujar AH Thony, harus benar-benar terverifikasi betul siapa- siapa yang berhak menerima program tersebut. Dia tidak menampik, adanya 19.643 jiwa keluarga miskin (gamis) menolak lowongan kerja di program padat karya lantaran sudah terlalu nyaman dengan model bantuan secara tunai yang selama ini diterima.

Dari jumlah gamis tersebut, Pemkot kata Thony, harusnya bisa memetakan potensi atau minat warga dibidang apa? "Baru Padat Karya itu disiapkan menjawab kebutuhan itu," kata AH. Thony. Sehingga bila sukses, legislator Partai Gerindra ini, optimis padat karya bakal jadi motivasi bagi masyarakat di kota Pahlawan, bahkan tidak menutup kemungkinan, jadi patron dan percontohan bagi daerah lain.

Sebenarnya urai Thony, dengan data kemiskinan yang ada, Pemkot Surabaya tinggal mendetailkan, apa saja potensi yang dimiliki dalam satu keluarga itu. Misalnya, yang



produktif bisa mengembangkan suatu usaha. Kemudian ada yang tidak punya skill, tapi mereka punya keinginan untuk maju (sukses). "Ini juga harus terukur. Kemudian, setelah dilakukan pendataan lebih spesifik, pemkot melakukan pendampingan, minat usaha itu visible atau penempatannya sudah strategis. Sesuai kebutuhan masyarakat. Pemkot harus mengeva-luasinya," kata AH Thony.

AH Thony menambahkan, setelah data gamis benar-benar terverifikasi dengan benar, langkah selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Langkah ini sangat diperlukan bertujuan untuk keberlangsungan program. "Jangan kemudian dikasih peralatan untuk bekerja kemudian dibiarkan, harus dipantau sejauh mana perkembangannya, sejauh mana perubahannya terhadap tingkat kesejahteraan dari yang didapat berkat program padat karya," kata dia. Jadi, lanjut dia, banyak variable yang perlu dibenahi beriringan dengan program padat karya tersebut dan ini butuh waktu tidak sebentar.

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra Ajeng Wira Wati maupun anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah tetap mendesak agar dilakukan langkah taktis dan terukur untuk tetap menjaga produktivitas kerja di padat karya. Proyek padat karya itu harus berkelanjutan. Harus didukung bahwa proyek padat karya ini benar-benar bisa menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan. Lahan kosong milik Pemkot Surabaya itu, harus bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan mengangkat martabat warga.

Sebagai pelayan masyarakat, Pemkot Surabaya harus didorong bisa memaksimalkan keberadaan lahan kosong itu dengan dukungan kegiatan berbasis warga. Diharapkan dengan dimanfaatkannya lahan kosong, akan diikuti peningkatan kesejahteraan warga di setiap wilayah. Termasuk yang sudah dilakukan dengan tempat padat karya sehingga menciptakan lapangan usaha dan kesempatan kerja.

Anggota Fraksi Gerindra Ajeng mendesak agar ratusan lahan itu juga diidentifikasi. Mana lahan subur dan mana lahan dengan nilai ekonomi tinggi. "Saya melihat masih ada lahan Pemkot yang belum menghasilkan nilai manfaat dan ekonomi untuk masyarakat. Data semuanya. Lalu ada tata cara sewa supaya bisa optimal," kata Ajeng.*



Sekilas Tentang Ikatan Langkah Dansa Indonesia

Oleh: Tim DWP Disnakertrans Jatim

Ikatan Langkah Dansa Indonesia (ILDI) Jatim meramaikan pembukaan perayaan Agustusan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Beberapa anggota ILDI Jatim melakukan gerak dansa yang energik bersama 120 peserta senam ASN-PTT Disnakertrans Jatim di halaman Kantor Disnakertrans Jatim, Kamis (3/8/2023). Apa itu ILDI? ILDI merupakan organisasi olahraga yang berfungsi sebagai wadah kreativitas masyarakat untuk hidup lebih sehat dan bugar.

Langkah dansa atau line dance merupakan salah satu cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), dengan tujuan untuk mengembangkan seni budaya yang menjunjung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dengan langkah indah diiringi instrumen lokal.

Apa tujuan melakukan line dance? Dance memberikan manfaat yang serupa dengan senam aerobik, terutama dalam menjaga kesehatan mental. Menari bisa mengurangi gejala depresi dan stres. Saat menari, suhu batang otak akan meningkat dan memberikan efek ketenangan. Selain itu,

tubuh yang bergerak secara aktif memicu pelepasan endorfin.

Menari bisa jadi pilihan olahraga menyenangkan bagi Anda yang tidak menyukai olahraga menjenuhkan, seperti lari atau angkat beban. Selain itu, menari punya manfaat yang sama besarnya dengan olahraga lain karena mengharuskan Anda menggerakkan banyak bagian tubuh selaras dengan alunan musik.

Manfaat bagi Kesehatan

Menari atau dance memiliki jenis yang beragam, mulai dari balet, belly dance, aerobik, pole dance, salsa, tap dance, modern dance, latin dance, hingga zumba. Selain menyenangkan, menari juga memiliki berbagai manfaat yang baik untuk tubuh dan pikiran. Berikut ini adalah berbagai manfaat dance untuk kesehatan.

1 Meningkatkan daya ingat

Menurut sebuah studi dalam PLoS One (2018), manfaat menari dapat meningkatkan daya ingat dan mencegah Anda

dari kepikunan seiring bertambahnya usia. Studi ini mengungkapkan bahwa menari melatih Anda untuk mengingat gerakan dan kepekaan Anda terhadap lingkungan sekitar. Kombinasi ketiganya ternyata mengembalikan volume yang hilang dalam hipokampus, yakni bagian otak yang mengontrol ingatan. Hipokampus secara alami akan menyusut saat Anda menginjak usia lanjut, sering menyebabkan gangguan ingatan dan kepikunan.

2. Meningkatkan fleksibilitas

Tarian membuat bagian tubuh yang semula kaku lebih luwes dan fleksibel. Dalam hal ini, menari mengharuskan Anda menjaga koordinasi gerakan tangan, kaki, badan atau bagian tubuh lainnya. Tubuh pun perlu bergerak menyesuaikan dengan irama musik. Selain itu, kebanyakan kelas dance menggabungkan pemanasan panjang yang cenderung terdiri dari banyak peregangan. Inilah sebabnya menari punya manfaat besar meningkatkan fleksibilitas tubuh. Dengan memiliki tubuh yang fleksibel, Anda juga bisa mengurangi risiko berbagai cedera otot, sendi, dan tulang, terutama saat berolahraga.

3. Membentuk otot

Dalam menari, Anda perlu meningkatkan atau memperlambat kecepatan gerakan secara terus-menerus. Hal ini bisa menghabiskan banyak energi. Pada saat yang sama, dance melibatkan sejumlah posisi yang sulit dan bahkan gerakan melompat yang memberikan ketahanan pada otot.

Dengan demikian, dance juga memiliki manfaat membentuk otot. Selain itu, gerakan tarian bisa dijadikan sebagai gerakan untuk meratakan perut dan membuat kaki serta pantat lebih kencang.

Jika melihat penari profesional, Anda akan melihat seberapa kencang dan proporsional tubuh mereka. Anda juga akan mendapatkan tubuh seperti itu jika menambah jadwal latihan dan rutin melakukannya.

4. Melatih keseimbangan

Mengutip studi terbitan *International Journal of Environmental Research and Public Health* (2021), menari membantu mengasah kemampuan koordinasi tubuh sehingga cocok sebagai pilihan latihan keseimbangan. Lebih lanjut, hasil riset ini menunjukkan menari selama tiga kali seminggu selama beberapa tahun mampu meningkatkan keseimbangan tubuh saat Anda berdiam.

Di samping itu, menari mampu melatih otot tubuh bagian tengah sehingga meningkatkan kestabilan tubuh saat bergerak. Manfaat dance yang satu ini dapat membantu Anda mengurangi cedera olahraga lainnya karena kegiatan ini mengurangi risiko Anda terjatuh. Banyak gerakan tarian melibatkan keseimbangan pada satu kaki seperti bertumpu pada ujung jari kaki.

5. Menjaga kesehatan jantung

Sebagai olahraga kardio, manfaat menari bisa meningkatkan kesehatan jantung. Gerakan pada tarian meningkatkan kerja jantung memompa darah untuk mengedarkan oksigen lebih banyak ke seluruh tubuh. Ini membuat aliran darah semakin lancar. Tidak hanya itu, aktivitas fisik yang satu ini juga menurunkan rangsangan saraf simpatetik sehingga menjaga detak jantung tetap normal.

Manfaat dance untuk kesehatan juga menurunkan kadar kolesterol jahat pada tubuh. Hal ini mencegah penyumbatan pembuluh darah sehingga mengurangi risiko akibat stroke dan serangan jantung.

6. Mengurangi stres dan depresi

Dance memberikan manfaat yang serupa dengan senam aerobik, terutama dalam menjaga kesehatan mental. Menari bisa mengurangi gejala depresi dan stres. Saat menari, suhu batang otak akan meningkat dan memberikan efek ketenangan. Selain itu, tubuh yang bergerak secara aktif memicu pelepasan endorfin. Senyawa pada otak ini mampu memicu perasaan bahagia dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan, termasuk mengurangi stres dan gejala depresi.

Ketika menari, Anda juga berusaha fokus menyesuaikan gerakan dengan alunan musik. Hal ini membantu mengalihkan pikiran dari rasa sedih dan ketegangan. Dengan begitu, Anda juga bisa lebih mudah mengendalikan perasaan sedih dan tertekan secara mandiri. Ketika sudah merasa lebih baik, Anda pun bisa lebih percaya diri dan mampu melakukan hal-hal sesuai kemauan. Jadi, menari bisa menjadi pilihan olahraga saat sedih.

7. Menurunkan berat badan

Menurunkan berat badan sering kali dilalui dengan proses yang membuat Anda patah semangat dan frustrasi. Jika Anda mencari cara menurunkan berat badan yang menyenangkan, menari bisa menjadi solusi. Menari dengan intensitas biasa membakar kalori sebanyak 229 kkal. Jika Anda naikkan lagi intensitasnya, menari bahkan mampu membakar 421 kkal atau hampir dua kali lipatnya. Proses menghilangkan lemak ini akan lebih optimal jika Anda mengontrol asupan kalori.

Anda mengikuti kelas dance karena keinginan sendiri, tanpa disadari Anda telah menjalani olahraga teratur setiap minggunya.

Ya, Anda merasakan manfaat menari tanpa adanya paksaan. Efeknya, penurunan berat badan tidak terasa melelahkan karena tubuh telah membakar banyak kalori dengan cara yang menyenangkan.

Manfaat menari bagi kesehatan ternyata sudah dibuktikan dari berbagai penelitian. Menari membantu menjaga kesehatan fisik dan mental serta mengurangi risiko berbagai penyakit.

Agar lebih maksimal, pastikan Anda melakukannya secara rutin setidaknya 3–5 kali dalam seminggu.*

Pembangunan Zona Integritas di UPT Keselamatan Kerja

Oleh: Tim UPT K2 Surabaya

Komitmen bersama mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) terus dikumandangkan pemerintahan di era sekarang. Bagaimana menciptakan pelayanan publik yang prima menjadi tujuannya. Pemerintah mengajak bersama-sama menyukseskan zona integritas, bukan hanya dilakukan pimpinan saja tetapi juga harus sampai ke bawah. Semangatnya tidak hanya pada kontestasi, tetapi

semangatnya berupa dua hal yang menjadi output WBK/WBBM ini dimana outputnya yaitu layanan masyarakat yang sudah baik dan sudah tidak ada lagi perilaku koruptif dengan dibuktikan dengan survei internal yang nanti dilakukan zona integritas menjadi niat pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Seperti halnya pencairan zona integritas menuju WBK/WBBM di setiap instansi pemerintah, bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat yang terbaik dari

INOVASI
DALAM PENGUATAN INTEGRITAS

HELLO K2

WBS "IPIN" (Informasi Pengaduan Internal)

Scan Barcode SPAK dan SUKMA

INOVASI
DALAM PENINGKATAN KINERJA

e-Letter K2

Dareal (Data Realtime)

INOVASI
PENINGKATAN LAYANAN

SIMPEL K3
(Sistem Pelayanan K3)

Penghargaan kovablik 2021

INOVASI UNGGULAN
UPT K2
UPT KESELAMATAN KERJA
DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TIMUR

BERAKHLAK bangga melaksanakan tugas dengan integritas

CETAR!

KONTAK

- UPT Keselamatan Kerja Pemprov Jatim
- uptkeselamatankerjasby
- k3.disnakertrans.jatimprov.go.id

KAN
KUMHUB ADMINISTRASI REGIONAL
LABORATORIUM PENJAJAN
LP-332-IDN

yang terbaik. Yang jelas nanti ke depan indikator zona integritas ini harus memenuhi di mana kita bekerja dengan penuh tanggung jawab namun amanah. Jangan jadi beban karena dengan menjalankan amanah ini maka pekerjaan tidak akan terlalu berat karena murni ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pembangunan Zona Integritas di UPT Keselamatan Kerja dimulai pada tahun 2021 hingga saat ini telah mencatat banyak kemajuan dan peningkatan kualitas layanan serta penerapan budaya kerja yang semakin berdampak pada peningkatan kinerja secara umum. Komitmen pembangunan zona integritas didorong dengan diperolehnya Penghargaan KOVABLIK Top 30 Tingkat Jawa Timur melalui penggunaan system aplikasi SIMPELK3 pada layanan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada akhir tahun 2020 yang memberi kemudahan, kecepatan, dan inovasi layanan kepada pengguna/Perusahaan. Mulai dari permintaan layanan dari Perusahaan, pengiriman penawaran harga sesuai tarif di Per Gub dan jadwal pengujian, sampai dengan upload dokumen laporan hasil uji dapat melalui SIMPELK3 ini. Selain itu dalam pengolahan data juga telah berbasis aplikasi yang terintegrasi mulai dari coding sampel uji, analisis data, sampai penerbitan laporan hasil uji. Laboratorium Uji telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yang telah menerapkan ISO/IEC 17025:2017 yaitu Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian.

UPT Keselamatan Kerja berkontribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan pengujian K3L, pemeriksaan kesehatan kerja, dan pelatihan di bidang K3. Dan mulai tahun 2021 pembayaran layanan melalui system aplikasi PAD Online, tidak lagi menerima pembayaran secara tunai. Kondisi dan karakteristik pelayanan di UPT Keselamatan Kerja tersebut diatas mendorong terbentuknya komitmen Pimpinan dan semua staf untuk pembangunan zona integritas dalam melakukan pelayanan yang berintegritas, berkualitas, dan profesional menuju terwujudnya "Pelayanan Prima". Adapun hasil konkrit Pembangunan Zona Integritas dari Tahun 2021 sd Tahun 2023 sebagai berikut :

Ikhtisar Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

Instansi Pemerintah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Keselamatan Kerja

No	Penilaian	Nilai
I	Pengungkit (Pemenuhan + Reform)	52,85
	a. Manajemen perubahan	7,19
	b. Penataan Tata Laksana	5,58
	c. Penguatan Manajemen SDM	8,55
	d. Peningkatan Akuntabilitas	9,17
	e. Penguatan Pengawasan	13,19
	f. Peningkatan Pelayanan Publik	9,17
II	Hasil	36,08
	a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	21,12
	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	
	2. Capaian Kinerja lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya	
b. Pelayanan Publik yang Prima	14,96	
1. Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP)		

Tabel 1 Hasil Konkrit Jumlah Layanan tahun 2021 s/d tahun 2023

IPAK	Tahun		
	2021	2022	2023
Hasil survey sangat sedikit yg kembali		3,98	3,97
Capaian Kinerja (%)			
Jumlah Layanan Pengujian K3L (Perusahaan):	95	81	44 (sd Apr 2023)
Jumlah Layanan Pemeriksaan Kesehatan (orang):	140	124	31 (sd Apr 2023)
Jumlah Layanan Pelatihan K3 (orang):	30	60	70 (sd Apr 2023)
Realisasi PAD	142,94 %	148 %	17,44 % (sd Apr 2023)
Realisasi Anggaran	97,31 %	98,82 %	23,64 % (sd Apr 2023)
IPKP	3,33	3,32	3,42

Tabel 2 Hasil Konkrit Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 s/d Tahun 2023

No.	Before	After
Sektor Pelayanan dan Integritas		
1.	Informasi maupun penanganan Pelayanan baik permohonan Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan Kerja/Pelatihan maupun Konsultasi dan Pengaduan diberikan secara manual dengan datang langsung ke Kantor/berkirim surat/ melalui telepon.	Informasi serta penanganan Pelayanan baik permohonan Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan Kerja/Pelatihan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien melalui kanal media sosial maupun integrasi SPBE aplikasi seperti: SIMPELK3.com, Pengolah Data Lab, PAD Online, Su3Ma, HelloK2.
2.	Proses pembayaran pelayanan dilakukan secara manual setor ke Rek Kas Daerah melalui Bendahara Pemertuan Pembantu (BPa)	Proses pembayaran secara virtual melalui SKRD yang diterbitkan PAD Online. Perusahaan pengguna layanan bisa melakukan pembayaran secara online mandiri dimanapun kapanpunsebelum jatuh tempo pembayaran.
3.	Petugas Pengambil Contoh Uji, Petugas Koding, Analis Laboratorium dan Petugas Pembuat LHU melakukan proses memasukkan data hasil Uji Kualitas Udara dan Pemeriksaan Kesehatan secara manual dengan menggunakan form	Kegiatan-kegiatan memanfaatkan data hasil Uji telah terintegrasi dalam aplikasi pengolahan data.
4.	Belum adanya sinergistas dengan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov Jawa Timur untuk penguasaan Su3Ket.	Telah berjalan sinergistas dengan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov Jawa Timur untuk penguasaan Su3Ket.
5.	Pengaduan Internal melalui website Disnakertrans Prov. Jatim	Pengaduan Internal melalui aplikasi IPEN (Informasi Pengaduan Internal)

Tabel 2 Hasil Konkrit Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 s/d Tahun 2023

No.	Before	After
Sektor Kinerja		
1.	Realisasi Keuangan dan Pelayanan UPT K2 diinput secara manual di form kemudian diserahkan ke stasiun langsung	Realisasi Keuangan dan Pelayanan Publik bisa dibuka melalui DAREAL oleh setiap pegawai UPT K2
2.	Surat Menyurat dilakukan secara manual dan perlu lembar disposisi	Secara efektif dan efisien prosedur Surat melalui online E-Letter langsung melalui stasiun ke penanggung jawab kegiatan dimanapun/kepunpun.
3.	Pembuatan dokumen Tagihan SPJ dilakukan masing-masing seksi secara manual dan hanya operator yang melakukan verifikasi	Pembuatan tagihan SPJ bisa dilakukan secara online dengan kecermatan dokumen dalam aplikasi SIKANGEN id yang terintegrasi dengan SIPPOL BPKAD sehingga proses lebih cepat dan mudah



UPT Keselamatan Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 62 Tahun 2018. Tugas pokok UPT K2 adalah melaksanakan sebagian tugas teknis Disnakertrans Prov. Jatim di bidang pengujian, pemeriksaan, pengkajian teknis, dan pelatihan di bidang K3 dan hygiene perusahaan. Hal ini untuk memastikan bahwa norma-norma K3 telah dilaksanakan oleh Perusahaan dimana hal ini merupakan kewajiban Perusahaan untuk melindungi pekerjaanya dari terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Isu strategis UPT K2 yang kesatu yaitu peningkatan pelayanan pengujian K3L, pemeriksaan kesehatan kerja, dan pelatihan di bidang K3 guna pelaksanaan norma K3 di Perusahaan. Pembangunan zona integritas erat kaitannya dengan peningkatan kinerja pelayanan yang dilakukan dengan berbagai upaya perubahan dimasing-masing area perubahan, seperti dilakukan inovasi dengan penggunaan system aplikasi SimpelK3, aplikasi pengolahan data yang terintegrasi, aplikasi inventarisasi alat dan aplikasi e-letter untuk mempercepat, mempermudah, dan menyederhanakan pelayanan.

dilakukan perubahan pelaporan kinerja ke Dinas dari setahun sekali menjadi per triwulan, perkembangan capaian kinerja terpantau dengan adanya aplikasi "DAREAL" yang terupdate setiap bulan. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik telah terdapat fasilitas pengaduan baik internal (WBS) maupun eksternal (Hello K2), juga dilakukan survey eksternal (SPAK dan SPKP).

Isu strategis yang kedua yaitu optimalisasi pemakaian laboratorium pengujian sebagai sumber PAD, hal ini berkaitan erat dengan pembangunan zona integritas pada area penguatan akuntabilitas dengan pemakaian aplikasi PAD Online, yang dulu pembayaran dari pengguna layanan secara tunai sekarang sudah melalui system aplikasi. Juga pada area penguatan pengawasan telah dibentuk UPG (Unit Pengendali Gratifikasi), kanal pengaduan layanan melalui Hello K2, guna pencegahan terjadinya kebocoran dalam hal pemasukan PAD.

Inovasi Unggulan

- Penguatan Integritas. PAD Online yaitu pembayaran paska layanan berbasis aplikasi/non tunai, Hello K2 yaitu pelayanan pengaduan eksternal yang terhubung dengan no hp whatsapp operator, bentuk pengaduan bisa konsultasi, saran, dan keluhan. WBS "IPIN" yaitu informasi pengaduan internal melalui scan barcode yang terhubung dengan no hp Kepala UPT, dan scan barcode SPAK dan SPKP
- Peningkatan Kinerja. e-letter yaitu system aplikasi administrasi surat masuk surat keluar/paper less, e-master yaitu system aplikasi kepegawaian, sikangen yaitu system aplikasi administrasi keuangan internal seluruh unit kerja di Disnakertrans Jatim, dan informasi laporan capaian kinerja real time "DAREAL" melalui scan barcode
- Peningkatan Layanan. Simpel K3 yaitu pelayanan pengujian K3L dan pemeriksaan kesehatan kerja secara on line mulai dari permintaan layanan, penawaran dan jadwal uji, dan down load Laporan Hasil Uji, System pengolahan data terintegrasi yaitu mulai dari coding sampel uji, analisa data, dan penerbitan laporan hasil uji, System Inventarisasi Alat "SLM" yaitu informasi terpantau kondisi dan posisi peralatan uji.*



Pada area penataan tatalaksana dibuat, disempurnakan dan/atau direvisi SOP Pelayanan misalnya SOP Pelatihan P3K telah dilakukan revisi disesuaikan dengan aturan dan persyaratan terbaru dari Kemnaker. Pada area penataan system manajemen SDM Aparatur juga dilakukan peningkatan kompetensi Penguji K3 dengan diikutsertakannya pada Diklat Dasar Penguji K3 secara bertahap. Pada area penguatan akuntabilitas telah

Evaluasi Bursa Kerja dalam Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo

Oleh: Tharisma Novitasari dan Diana Hertati, Prodi Administrasi Publik FISIP UPN Jatim

Hasil Sensus Penduduk (SP 2020) menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Indonesia sebesar 141 orang per kilometer persegi dan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 274,9 juta. Kenaikan jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya membuat sumber daya manusia (SDM) semakin bertambah. Hasil SP 2020 juga menyebutkan bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan generasi millennial.

Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada kisaran tahun 1997-2000-an. Generasi Z merupakan generasi muda yang sudah mengenal banyak teknologi. Dalam hal ini tentunya kelas produktif usia generasi Z dan generasi millennial akan mempercepat Indonesia masuk dalam revolusi industri 4.0.

Namun, jumlah penduduk yang besar mengakibatkan angkatan kerja semakin banyak. Artinya semakin banyak orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan tidak sebanding dengan tingkat pengangguran yang ada menyebabkan semakin banyak orang yang menganggur termasuk penduduk usia produktif.

Pengangguran adalah masalah terbesar yang dihadapi setiap negara, yang tidak lagi asing terdengar di setiap daerah, baik dalam tingkat pusat provinsi, maupun kabupaten/kota. Berdasarkan data BPS Republik Indonesia (2020) menyebutkan, bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 7,07 persen meningkat 1,84 persen dari Agustus 2019. Per Agustus 2020 TPT pada laki-laki sebesar 7,46 persen dan TPT pada perempuan sebesar 6,46 persen. Menurut BPS Provinsi Jawa Timur diketahui jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2021 menurun sebesar 343,98 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada Februari 2020. Dengan jumlah pengangguran sebesar 1.147.061 juta jiwa, BPS Jawa Timur menyebutkan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dengan angka pengangguran tertinggi dengan jumlah 131.444 ribu jiwa atau dalam persentase sebesar 10,97% pada tahun 2020.

Sebenarnya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak menjadi sebuah masalah bila dalam daya dukung perekonomian suatu daerah cukup kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk salah satunya dalam penyediaan kesempatan kerja. Pengangguran terbuka terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif

lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat. Dari data TPT di Kabupaten Sidoarjo dalam satu tahun terakhir (tahun 2020-2021) menunjukkan bahwa pengangguran bertambah 77 ribu orang dan TPT naik 6,35 persen menjadi 10,97 persen pada Agustus 2020 dibanding TPT Agustus 2019 sebesar 4,62 persen. Semakin berkurangnya kemakmuran masyarakat akan karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Tingginya angka pengangguran ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya yaitu krisis ekonomi yang berkepanjangan diakibatkan oleh Covid-19. Pandemi Covid-19 ini berdampak hampir pada semua aspek seperti pada aktivitas dan dinamika ketenagakerjaan. Menurut BPS Kabupaten Sidoarjo, penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: pengangguran karena Covid-19, bukan angkatan kerja karena Covid-19, sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan pengurangan jam kerja karena Covid-19. Dalam hal ini 1,7 juta penduduk usia kerja di Sidoarjo, 357 ribu atau 20,06 persen diantaranya terdampak Covid-19, apalagi seperti sekarang ini banyak pengangguran muncul akibat pandemi ini seperti kasus PHK yang semakin banyak.

Pemerintah terus berupaya untuk membuka lowongan pekerjaan di berbagai sektor. Untuk mengatasi permasalahan dari pengangguran pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan berbagai program untuk penanggulangan angka pengangguran yaitu Program pelatihan melalui Balai Pelatihan Kerja (BLK), Program Job Matching, Program Bursa Kerja (Job Fair). Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang paling banyak diikuti oleh masyarakat adalah orogram Bursa Kerja (Job Fair). Program Job Fair yang diadakan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2018 berhasil menurunkan angka pengangguran. Kabupaten Sidoarjo berhasil menurunkan angka pengangguran terbukti bahwa pada 2015, pengangguran di wilayahnya sebanyak 68.311 jiwa, sedangkan tahun 2018 turun menjadi 53.473 jiwa.

Program Job Fair mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 pasal 1 tentang

penempatan tenaga kerja disebutkan bahwa Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja. Selanjutnya, dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomer 92 tahun 2019 ayat 18 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi memiliki fungsi yaitu salah satunya pelaksanaan pemberian rekomendasi swasta dalam penyelenggaraan bursa kerja (Job Fair).

Job Fair merupakan salah satu wadah atau tempat bertemunya pihak perusahaan dan pencari kerja secara langsung yang diadakan di salah satu tempat yang disediakan oleh pihak penyelenggara Job Fair, baik pihak Pemerintah maupun swasta. Job Fair merupakan salah satu media yang dapat menjembatani antara penyedia kerja (perusahaan) dengan pencari kerja dalam penyampaian informasi lapangan pekerjaan. Tujuan Job Fair tentu saja untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Pelaksanaan Job Fair ini tentu sangat memerlukan peran berbagai entitas atau aktor. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melibatkan para stakeholders dan masyarakat. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat ini tak lain ialah agar kebutuhan masyarakat tentang informasi lowongan pekerjaan. Kerjasama ini merupakan kesepakatan antara dua pihak ataupun lebih yang memungkinkan antara pihak-pihak tersebut melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang sama, dan kerjasama ini dari masing-masing pihaknya berperan atau melakukan tugasnya sesuai tanggung jawab serta kekuasaannya.

Program Job Fair ini dinilai sangat membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan daya tampung tenaga kerja baru dalam pelaksanaan Job Fair di Kabupaten Sidoarjo semakin sedikit.

Job Fair yang digelar pemerintah Kabupaten Sidoarjo setiap tahun bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelamar, antara perusahaan dan para pencari kerja saling membutuhkan dan dengan banyak pelamar yang diterima bekerja, akan berdampak pada angka pengangguran yang turun. Oleh karena itu, mengingat pentingnya Program Job Fair dalam penanggulangan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo ini perlu mendapat perhatian.

Program Job Fair merupakan kebijakan public, yakni merupakan serangkaian keputusan atau kebijakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan dan aktor pemerintah yang sesuai kewenangan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan melihat kondisi lingkungan dalam rangka pemecahan masalah. Adapun keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Adapun tahap kebijakan publik yaitu identifikasi, formulasi, legitimasi, aplikasi, dan evaluasi kebijakan.



Evaluasi sendiri merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan public. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public, guna mempertanggungjawabkan kepada konstituensi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Menurut Khothimah & Hertati (2021), evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik yang tidak hanya dilakukan pada tahap terakhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Menurut William N. Dunn dalam Nugroho (2014) menjelaskan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Nugroho memaparkan bahwasannya evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. William N. Dunn dalam Anggara (2014) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Bursa Kerja (Job Fair)

Job Fair sering juga disebut bursa kerja adalah sebuah acara atau event yang diselenggarakan khusus ditujukan untuk para pencari kerja. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 ayat 17 tentang penempatan tenaga kerja disebutkan bahwa Bursa Kerja atau Job Fair adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja. Selain itu Job Fair dapat diartikan sebagai seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya

transaksi produktif diantara orang yang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 ayat 17 tentang penempatan tenaga kerja disebutkan bahwa Bursa Kerja atau Job Fair adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja (Ketenagakerjaan, 2016). Selain itu Job Fair dapat diartikan sebagai seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif diantara orang yang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut.

Program Job Fair merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan tujuan yaitu memberikan informasi kepada pencari kerja baik itu pengangguran, setengah pengangguran, maupun yang sudah bekerja mengenai lowongan yang tersedia. Program Job Fair di Kabupaten Sidoarjo ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Program Job Fair ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja yang selanjutnya pelaksanaan Job Fair diatur didalam Rencana Kerja Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya.

Program Job Fair ini bekerja sama dengan pihak swasta dalam penempatan tenaga kerja yang dimana sasaran dari Program Job Fair adalah masyarakat Sidoarjo yang belum bekerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan yang dimilikinya. Namun dalam pelaksanaannya perlu secara terus-menerus dilakukan evaluasi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dengan menggunakan teori William N. Dunn, program Job Fair dilihat dari enam fokus kebijakan yakni: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektivitas

Efektivitas Program Job Fair dapat dilihat dari adanya kesesuaian antar konsep dengan fakta yang ada di lapangan sehingga memungkinkan tujuan Job Fair berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Menurut William N. Dunn dalam Anggara, (2014), efektivitas berisi perasaan mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan tertentu. Efektivitas program Job Fair nantinya diharapkan sesuai dengan tujuan yaitu mengurangi tingkat pengangguran.

Pada fokus efektivitas ini diketahui bahwa program Job Fair dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Namun, kurangnya tindakan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan program ini seperti, masih ada kendala dalam sasaran program Job Fair tersebut karena adanya ketidaksesuaian pemilihan pekerjaan dari peserta dengan kualifikasi yang diperlukan dari pihak perusahaan sehingga

menurut permasalahan ini yang membuat jumlah peserta yang diterima menjadi sedikit.

Selanjutnya dalam sosialisasi Program Job Fair untuk perusahaan yang mengikuti sosialisasi program terlihat masih kurang untuk pihak swasta (perusahaan). Tetapi, pelaksanaan program Job Fair sudah sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa evaluasi dari program Job Fair pada fokus efektivitas pelaksanaan Program Job Fair sudah berjalan cukup efektif.

Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan "seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil dari Program Job Fair yang diinginkan". Menurut Dunn dikutip oleh Anggara, (2014), efisiensi berkenaan dengan sejauh mana usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Fokus dari kriteria ini adalah banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan program Job Fair meliputi sumber daya yang digunakan baik alokasi tenaga (SDM) dan efisiensi waktu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya.

Pada fokus efisiensi diketahui bahwa program Job Fair dapat dikatakan sudah efisien. Dalam pelaksanaannya sedikitnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang mengikuti karena peserta hanya melakukan pendaftaran melalui formulir online yang sudah disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Untuk target yang dicapai dalam pelaksanaan Job Fair sudah tercapai walaupun di dalam target perusahaan masih belum maksimal, tetapi, bukan berarti pelaksanaan program Job Fair belum mencapai target dalam penempatan tenaga kerja. Untuk estimasi waktu dalam pelaksanaannya 1-2 hari memudahkan peserta dalam mencari dan menanyakan lebih lanjut terkait lowongan yang ada, dengan estimasi pelaporan penerimaan peserta sekitar 1 bulan.

Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan program Job Fair berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan permasalahan akibat pengangguran saat ini. Menurut Dunn dikutip oleh Anggara, (2014), kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Pada fokus kecukupan dalam program Job Fair dapat dikatakan sudah membantu masyarakat dalam mencari informasi terkait lowongan di perusahaan-perusahaan dan dalam program Job Fair mempermudah masyarakat mendapatkan pekerjaan karena dalam program ini masyarakat tidak dipersulit. Pihak Dinas Tenaga Kerja berusaha memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Adanya



program Job Fair ini dikatakan sudah cukup membantu masyarakat dalam penempatan tenaga kerja karena dalam pelaksanaan Program Job Fair, pihak Dinas Tenaga kerja memiliki target di setiap tahunnya yang tercantum di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

Dalam persentase pelaksanaan program Job Fair tahun 2020 juga sudah mencapai target yaitu sebanyak 110,4%. Dari capaian pelaksanaan program Job Fair ini memberikan dampak yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo menurun sebanyak 0,1 %. Program Job Fair pada fokus kecukupan dalam pelaksanaan telah memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat yaitu pengangguran.

Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan pemerataan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn dalam Anggara, (2014) mengungkapkan bahwa kriteria kesamaan (equity) diidentikan dengan kenyataan yang benar, sosial dan menunjuk pada penyampaian hasil dan usaha yang tidak memihak. Kebijakan terletak pada hasil atau upaya yang merata.

Pada penelitian ini perataan dilihat dari proses distribusi yang dilakukan Disnaker kepada kelompok sasaran program Job Fair dan kemudahan masyarakat dalam menjangkau program Job Fair. Pada fokus perataan bahwa dalam pemerataan program ini sudah merata ke masyarakat. Pemerataan ini diantaranya tidak hanya perusahaan yang menerima lulusan sarjana saja tetapi, banyak juga perusahaan yang menerima lulusan dari SMK.

Dalam program Job Fair ini diperuntukan untuk masyarakat umum di Kabupaten Sidoarjo. Dalam jangkauan masyarakat terhadap program Job Fair ini diantaranya ada sosialisasi yang dilakukan di SMK yang ada di Kabupaten Sidoarjo, melalui pamflet online yang disebar melalui media sosial baik dari media sosial yang dimiliki oleh Disnaker maupun media sosial dari perusahaan yang mengikuti. Hal ini cukup memudahkan masyarakat menjangkau program Job Fair.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik merupakan tanggapan terhadap kegiatan. Ini berarti respon kebijakan publik terhadap implementasi kebijakan. Kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, prioritas, atau nilai-nilai sekelompok orang. Responsivitas menurut Dunn dalam Anggara, (2014) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu atau tidak.

Pada fokus perataan ini diketahui bahwa Program Job Fair sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena dengan adanya program ini juga membantu masyarakat dalam mencari informasi tentang lowongan pekerjaan dengan mudah. Hasil dari program Job Fair sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memenuhi target. Target yang ditentukan program Job Fair pada tahun 2020 sebanyak 65% dengan pencapaian hasil tahun 2020 yakni 71,8%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari pelaksanaan program Job Fair telah memenuhi target yang ditentukan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

Ketepatan

Menurut William Dunn dalam Anggara, (2014) ketepatan yaitu hasil yang telah dicapai benar-benar berguna khususnya bagi kelompok sasaran. Ketepatan berhubungan dengan tujuan yang sebenarnya berharga atau berguna. Hasil dari pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu keberhasilan program. Pada fokus ketepatan program Job Fair dapat dikatakan sudah tepat. Hasil yang dicapai dalam program Job Fair bermanfaat atau bernilai bagi masyarakat dan program Job Fair merupakan langkah yang strategis dan preventif dalam mengatasi masalah pengangguran.. Hal tersebut karena persentase dalam penerimaan peserta dalam program Job Fair merupakan persentase terbanyak dibandingkan dengan program yang lain yaitu sebanyak 110,4%.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah program Job Fair di Kabupaten Sidoarjo ini sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan Program Bursa Kerja (Job Fair) dapat dikatakan terlaksana dari enam kriteria kebijakan publik yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pada fokus kecukupan diketahui bahwa capaian pelaksanaan program Job Fair sedikit banyak memberikan dampak bagi penurunan angka pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 menurun sebanyak 0,1 %. Walaupun pada fokus efisiensi didalam target perusahaan masih belum maksimal tetapi bukan berarti pelaksanaan program Job Fair belum terlaksana dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang. (dikutip dari Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora Volume 8 Nomor 2 Juni 2022 - PP:299-305. Email: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id)

Mengupas SNI 9011:2021 Tentang Pengukuran Bahaya Ergonomi di Tempat Kerja

Oleh : Aidina Rochmania¹, Muh Agus Ainur Rosyid², Kuuni Ulfah Naila El Muna¹
¹Universitas NU Surabaya, ²UPT Keselamatan Kerja Disnakertrans Prov Jatim

Pada tahun 2021, Badan Nasional Indonesia menetapkan dan memperkenalkan sebuah standar baru dalam pengukuran ergonomi yakni SNI 9011:2021 merupakan standar nasional Indonesia yang mengatur pengukuran ergonomi di tempat kerja. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar pekerja dan lingkungannya terutama tempat kerja dalam kata lain mementingkan keselamatan pekerja. SNI 9011:2021 yang secara khusus menjadi pedoman pengukuran ergonomi di tempat kerja. Standar ini dirancang untuk membantu pengambil sampel uji di bidang ergonomi dalam mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko yang kemungkinan besar sering terjadi dalam aktivitas pekerjaan dengan pemahaman pengukuran ergonomi secara spesifik dan meningkatkan kondisi kerja aman sehingga pekerja dapat bekerja dengan nyaman.

SNI 9011:2021 Penting?

SNI 9011:2021 adalah langkah yang efektif dalam memperkuat sistem manajemen risiko di lingkungan kerja. Hal ini bukan hanya tentang melindungi aset finansial, tetapi juga tentang melindungi nyawa, lingkungan, dan masa depan berkelanjutan dalam perusahaan. Melalui penerapan standar ini, kita dapat memastikan bahwa para pekerja lebih siap dan tangguh dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Standar ini digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi potensi bahaya ergonomi, menilai tinggi rendahnya serta menerapkan pengendalian efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran potensi bahaya ergonomi dalam standar SNI 9011:2021 meliputi persiapan, pelaksanaan pengukuran serta mengimplementasikan hasil pengukuran potensi bahaya ergonomi di tempat kerja. Dalam standar SNI 9011:2021 menetapkan metode identifikasi kelulahan gangguan otot rangka akibat kerja (GOTRAK) yang dialami oleh pekerja. Gangguan Otot Rangka Akibat Kerja (GOTRAK) merupakan permasalahan Kesehatan kerja kedua tertinggi setelah gangguan mental yang diakibatkan oleh pekerjaan serta permasalahan ini sering dikeluhkan oleh pekerja Ketika melakukan pekerjaan dengan waktu yang cukup lama.

GOTRAK dapat berdampak pada otot, sendi, dan tendon di seluruh bagian tubuh, termasuk punggung, leher, lengan, kaki, dan bagian lainnya.

Prinsip pengukuran ergonomi dalam SNI 9011:2021 yakni mengidentifikasi bahaya ergonomi oleh pengambil sampel uji atau Lembaga uji dengan menggunakan daftar periksa potensi bahaya ergonomi sesuai standar SNI 9011:2021, dalam melakukan pengamatan potensi bahaya ergonomi hal yang wajib diketahui adalah jenis pekerjaan, tugas dan elemen yang dilakukan oleh pekerja dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.

Metode interpretasi penilaian tingkat risiko keluhan GOTRAK yang dilakukan pengambil sampel uji untuk mengetahui nilai prevalensi kelulahan yang dialami oleh pekerja, hal ini didasarkan indikator frekuensi: tidak pernah [1], terkadang [2], sering [3], selalu [4] dan indikator keparahan : tidak ada masalah [1], tidak nyaman [2], sakit [3], sakit parah [4]).

Pada tahap analisis hasil yang didapatkan dari dua indikator tingkat risiko kelulahan GOTRAK, maka dapat dikategorikan tingkat risiko dari pengukuran tersebut. Kategori tingkat risiko rendah adalah hasil didapatkan dengan nilai 1-4, tingkat risiko sedang dengan nilai 6, dan tingkat risiko tinggi dengan nilai 8-16. Tujuan dari pengkategorian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkatan risiko yang dialami pekerja mengenai kelulahan GOTRAK.

Prosedur Pengukuran

Dalam standar SNI 9011:2021 terdapat survei keluhan gangguan otot rangka yang sebagai acuan pengukuran kepada pekerja yang diuji atau diamati. Hal pertama yang dilakukan yakni mengisi informasi pekerja yang diuji meliputi perusahaan pekerja sebagai tempat bekerja, tanggal sampel yang diuji, nama dari pekerja yang diuji, bagian apa pekerja yang akan diuji, serta tugas-tugas pekerja dalam melakukan aktivitas pekerja yang kemungkinan menimbulkan keluhan gangguan otot rangka. Setelah itu dilakukan wawancara kepada pekerja yang bersangkutan, yakni tangan yang dominan ketika melaksanakan pekerjaan,

SNI 9011:2021

Catatan: 'sakit' dapat berupa nyeri, kaku, mati rasa, kesemutan, atau rasa terbakar

Pada setiap bagian tubuh dengan keterangan "sakit" atau "sakit parah", atau "selalu" merasakan "tidak nyaman", jelaskan pekerjaan yang menurut Anda menyebabkan masalah tersebut, dan apakah sebelumnya Anda pernah mengalami cedera di bagian tubuh tersebut

Bagian Tubuh	Pernah Mengalami Cedera Sebelumnya	Kemungkinan Pekerjaan yang Menyebabkan Masalah
	Ya	Tidak
	Ya	Tidak
	Ya	Tidak
	Ya	Tidak

Penguji K3/ Ahli K3 Lingkungan Kerja Madya/ Utama

(.....)
NIP/No. REG.....

© BSN 2021 8 dari 28

seberapa lama bekerja pada posisi atau jabatan saat ini, apakah pekerja merasakan kelelahan mental dan kelelahan fisik selama bekerja, serta hal penting adalah ketidaknyamanan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam satu tahun terakhir.

Dalam pelaksanaan pengukuran factor ergonomic di tempat kerja, hal yang harus diperhatikan adalah pada saat melakukan wawancara dengan acuan survei keluhan gangguan otot rangka harus memperkenalkan diri penguji dan menjelaskan tujuan melakukan wawancara guna mengisi survei keluhan gangguan otot rangka bukan semata-mata untuk mengukur kinerja pekerja tetapi dapat menciptakan suasana tempat kerja yang aman. Supaya responden atau pekerja yang diuji tidak menutupi apa yang terjadi selama melakukan pekerjaan.

Dalam pengisian survei gangguan otot rangka dapat menelusuri keluhan bagian tubuh yang dialami oleh responden atau pekerja yang diuji. Sebagai contoh pada pekerja di perusahaan x mengalami keluhan bagian leher dan

pernah mengalami cedera sebelumnya kemungkinan hal ini terjadi karena posisi kepala yang over high yang menyebabkan cedera pada leher. Setelah pengisian survei keluhan gangguan otot rangka, maka hasil pengukuran tersebut dapat dilanjutkan dalam penentuan pengendalian yang efektif untuk pekerja.

Penentuan pengendalian bahaya yang didapatkan dari pengukuran ergonomic menggunakan SNI 9011:2021 ini merupakan Langkah dalam meringankan atau meminimalkan keluhan kerja pada tubuh pekerja agar pekerja dan perusahaan dapat menciptakan suasana kerja nyaman serta aman. SNI 9011:2021 merupakan langkah penting dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja di Indonesia. Dengan memprioritaskan potensi bahaya ergonomi, dapat menciptakan tempat kerja yang lebih aman, nyaman, dan produktif, yang pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi individu dan perusahaan. Jika #RekanNakerK3 ingin bertanya mengenai pelatihan maupun melakukan pengukuran lingkungan kerja bisa langsung kontak kami di email : k3@jatimprov.go.id, IG : @uptkeselamatankerjasby, Web : k3.disnakertrans.jatimprov.go.id, Hello K2 : 085645731115 UPT Keselamatan Kerja.*

SNI 9011:2021

Lampiran B
(normalif)
Survei keluhan gangguan otot rangka

- Perusahaan :
- Tanggal :
- Nama (opsional) :
- Posisi/jabatan :
- Deskripsikan tugas-tugas yang Anda lakukan pada pekerjaan ini dan durasi waktu (untuk tiap shift kerja) yang Anda habiskan untuk melaksanakan setiap tugas:
Tugas: Waktu:

- Manakah yang merupakan tangan dominan Anda?
 Kanan Kiri Keduanya
- Sudah berapa lama Anda bekerja pada posisi/jabatan saat ini?
 Kurang dari 3 bulan 3 - 10 Tahun
 3 Bulan - 1 Tahun Lebih dari 10 tahun
 1 - 5 Tahun
- Seberapa sering Anda merasakan kelelahan mental setelah bekerja?
 Tidak pernah Sering
 Kadang-kadang Selalu
- Seberapa sering Anda merasakan kelelahan fisik setelah bekerja?
 Tidak pernah Sering
 Kadang-kadang Selalu
- Pernahkah Anda mengalami rasa sakit/nyeri atau ketidaknyamanan yang Anda anggap berhubungan dengan pekerjaan dalam satu tahun terakhir?
 Ya Tidak
- Jika Ya, silakan mengisi survei pada halaman selanjutnya; untuk setiap bagian tubuh yang disebutkan, dimohon untuk menjelaskan tentang:
 - Seberapa sering Anda merasakan ketidaknyamanan pada setiap bagian tubuh
 - Tingkat ketidaknyamanan
 - Apakah rasa sakit itu mengganggu kemampuan Anda untuk melakukan pekerjaan Anda?
 - Pada bagian tubuh mana ketidaknyamanan dirasakan.

© BSN 2021 7 dari 28

Kompetisi 5R/5S: Mendorong Produktivitas dan Kualitas Kerja

Oleh: Dra. WiwiekWidyaningrum, Staf Bidang Latpro Disnakertrans Jatim



Dalam rangka mendorong daya saing dan mewujudkan perusahaan yang produktif, berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui berbagai program dan kegiatan peningkatan produktivitas di perusahaan, salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan Kompetisi 5R/5S Antar Perusahaan di Jawa Timur Tahun 2023. Kegiatan ini sebagai apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada perusahaan di Jawa Timur yang telah meningkatkan kualitas dan produktivitasnya serta dalam rangka untuk memotivasi dunia usaha dan dunia industri agar mampu melakukan upaya peningkatan produktivitas melalui implementasi 5R/5S, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan produktivitas melalui Kompetisi 5R/5S Antar Perusahaan di Jawa Timur Tahun 2023.

Gerakan peningkatan produktivitas di Indonesia telah menjadi agenda nasional sejak tahun 1968, namun tantangan tetap ada. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Gerakan Produktivitas Jawa Timur pada tahun 2002 dengan menggelar Kompetisi 5R/5S antar perusahaan. Gerakan ini dideklarasikan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja produktivitas perusahaan.

Kompetisi 5R/5S tingkat Provinsi di Jawa Timur sebagai wadah bagi perusahaan untuk memahami dan mengenali apakah penerapan 5R/5S di area tempat kerja sudah sesuai dengan kriteria penilaian dari sisi eksternal (auditor/juri

kompetisi 5R/5S antar Perusahaan di Jawa Timur). Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Kompetisi 5R/5S Antar Perusahaan di Jawa Timur Tahun 2023, adalah:

1. Meningkatkan kontinuitas dan konsistensi penerapan 5R/5S sebagai pondasi program peningkatan produktivitas perusahaan di Jawa Timur.
2. Meningkatkan motivasi perusahaan dan instansi untuk terus mengevaluasi kualitas penerapan budaya 5R/5S.
3. Mendorong kerjasama antarperusahaan dalam implementasi 5R/5S.
4. Membangun budaya kerja yang produktif dalam masyarakat industri.
5. Mendorong peningkatan produktivitas perusahaan dengan dampak penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi.
6. Meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendukung Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
7. Mendorong kerjasama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan peningkatan implementasi 5R/5S di Jawa Timur.

Kompetisi 5R/5S Antar Perusahaan di Jawa Timur Tahun 2023 diikuti oleh perusahaan di wilayah Provinsi Jawa Timur dari berbagai sector industri yang berskala kecil, menengah dan besar, dengan kategori area yang dikompetisikan meliputi area kantor, produksi, gudang, bengkel dan

lingkungan. Melalui implementasi 5R/5S, perusahaan mendapatkan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Kemudahan pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengurangan pemborosan waktu.
3. Peningkatan mutu kerja.
4. Peningkatan produktivitas.
5. Peningkatan keselamatan kerja dan kesehatan kerja.



Penilaian kompetisi implementasi 5R/5S antar Perusahaan di Jawa Timur Tahun 2023, dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

1. **Tahap Pertama**, penilaian terhadap kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung implementasi 5R/5S di perusahaan, sebagai dasar kelolosan ke tahap kedua (seleksi Administrasi). Perusahaan yang ingin berpartisipasi untuk ikut dalam Kompetisi 5R/5S ini, harus mendaftar terlebih dahulu melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Pendaftaran peserta Kompetisi 5R/5S Antar Perusahaan di Jawa Timur Tahun 2023, telah dibuka sejak bulan Mei 2023, dan ditutup pada tanggal 15 Juli 2023. Hasil dari seleksi administrasi ada 51 perusahaan yang telah lolos menjadi peserta Kompetisi 5R/5S dan berhak untuk mengikuti tahap penilaian selanjutnya/tahap kedua;



2. **Tahap Kedua**, yaitu penilaian dilakukan secara langsung ke obyek penilaian (Genba) melalui verifikasi, validasi dan pendalaman atas implementasi 5R/5S di lapangan. Kegiatan Genba ini sudah dilaksanakan oleh Tim Auditor/Juri Kompetisi 5R/5S mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023. Untuk penetapan hasil penilaian Genba oleh Tim Auditor/Juri Kompetisi 5R/5S, telah dilakukan rapat pleno Tim Auditor/Juri Kompetisi 5R/5S pada tanggal 31 Agustus 2023. Pengumuman pemenang, akan diumumkan dalam acara penutupan kompetisi.

Tingkat pencapaian implementasi 5R/5S dibagi menjadi lima level, dari "Baik Sekali" hingga "Kurang". Perusahaan yang mencapai level tertentu akan menerima penghargaan berupa medali emas, perak, perunggu, atau piagam partisipasi. Selain penghargaan medali, satu perusahaan yang paling unggul diantara perusahaan-perusahaan yang lain (paling banyak mendapatkan medali emas), akan diberikan penghargaan trophy sebagai Juara Umum.

Kompetisi 5R/5S Antar Perusahaan Tingkat Jawa Timur adalah inisiatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas kerja di wilayahnya. Melalui implementasi 5R/5S, diharapkan perusahaan-perusahaan di Jawa Timur dapat meningkatkan kinerja mereka dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengundang semua perusahaan di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini dan menerapkan Sistem Manajemen Tata Graha 5R/5S dengan baik. Dengan demikian, perusahaan dapat bersaing secara lebih efektif di pasar dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan.*

Implementasi 5R/5S Sebagai Pondasi Peningkatan Produktivitas Perusahaan

Oleh: Ir. Setiawan Wicaksono M.M

Pada era kompetisi global yang semakin ketat dewasa ini, negara kita dihadapkan dengan persoalan tingkat daya saing dan produktivitas yang masih cukup rendah. Berdasarkan laporan Institute for Management Development (IMD) bulan Juni 2023, daya saing negara Indonesia menduduki peringkat 34 dari 64 negara yang telah disurvei. Salah satu indikator utama yang digunakan sebagai variabel dalam survey tingkat daya saing tersebut adalah tingkat produktivitas.

Peringkat indikator tersebut juga masih cukup memprihatinkan. Menurut Asian Productivity Organization (APO, 2020) produktivitas tenaga kerja per kapita (per-worker labor productivity) Indonesia sebesar US \$ 23,9 atau 19 %, masih lebih rendah dari negara ASEAN dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja per kapita sebesar US \$ 29,3 atau 23 %. Indonesia masih tertinggal dari Singapura (116 % atau lebih tinggi 16 % dari Amerika Serikat). Data-data tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja adalah sasaran yang harus menjadi perhatian utama dan bersama dalam pembangunan ketenagakerjaan.

Ada beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan produktivitas di negara kita, antara lain: Bonus Demografi, Revolusi Industri 4.0, dan era desrupsi. Sekitar tahun 2030 nanti perbandingan

penduduk produktif dengan penduduk non produktif adalah 2 (dua) banding 1 (satu). Komposisi tersebut sangat menguntungkan bagi negara Indonesia karena peluang peningkatan produktivitas di segala bidang akan semakin besar, jika kelebihan penduduk usia produktif tersebut dikelola dengan tepat dan benar. Sebaliknya, akan menjadi "musibah" demografi, jika kompetensi penduduk produktif tersebut kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Justru akan menjadi beban kependudukan, menambah jumlah pengangguran, dan kontraproduktif.

Isu strategis yang kedua adalah adanya Revolusi Industri 4.0 dan digitalisasi yang merambah pada semua lini kehidupan, baik dunia industry maupun masyarakat umum, berdampak pada percepatan peningkatan produktivitas yang luar biasa. Akselerasi digitalisasi juga dipicu oleh adanya pandemi beberapa waktu yang lalu. Hasil riset kolaborasi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) dengan Laboratorium Data Persada Pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa sector manufaktur memperoleh nilai tambah tertinggi dari ekonomi digital, nilainya mencapai Rp 100 triliun atau 7,1 miliar dolar AS, diikuti oleh sector transportasi, gudang, dan komunikasi sebesar Rp 84,2 triliun.

Isu strategis yang lainnya adalah adanya era disrupsi. Era disrupsi adalah era dimana terjadinya perubahan-perubahan fundamental, signifikan, dan massif dalam sistem dan tatanan bisnis yang lebih baru atau bahkan baru sama sekali. Pada dasarnya munculnya era disrupsi sebagai dampak dari Revolusi Industry 4.0, Digitalisasi, dan Inovasi di segala bidang. Pada era disrupsi ditandai dengan munculnya istilah VUCA world yang merupakan singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity.

Dunia VUCA artinya dalam kehidupan yang kita alami sekarang terjadi perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi banyak faktor yang sulit terkontrol, dan kebenaran serta realitasnya menjadi sangat subyektif. Era disrupsi tersebut jika dikendalikan dengan tepat akan berpotensi meningkatkan produktivitas negara kita.



Strategi Peningkatan Produktivitas

Diperlukan kolaborasi lintas sektoral agar bisa memanfaatkan peluang dari issue-issue strategis tersebut sebagai daya ungkit dalam mewujudkan peningkatan produktivitas negara. Kolaborasi Lintas sektoral tersebut dikenal dengan istilah *Quadruple helix*, antara lain: Pemerintah, Pelaku Bisnis, Akademis, dan Komunitas.

Permasalahan rendahnya produktivitas tenaga kerja dapat diintervensi oleh Pemerintah, dengan melakukan intervensi ke seluruh stakeholders Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas secara nasional. Merujuk pada Model OSF (Lombardo dan Eichinger, 1986) dapat dihitung kontribusi peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional yang disebabkan oleh intervensi Kemenaker. Kontribusi masing-masing stakeholders: 70% peningkatan produktivitas disebabkan oleh peningkatan di perusahaan, 20% peningkatan produktivitas disebabkan oleh interaksi asosiasi atau karena interaksi sosial antar tenaga kerja lainnya, dan 10% peningkatan produktivitas disebabkan oleh pendidikan dan pelatihan formal yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Komitmen pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia diwujudkan dalam program Nawacita butir ke-5 "Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar", dan Nawacita, butir ke 6 berbunyi, "Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya".

Sedangkan di wilayah Provinsi Jawa Timur, kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga kedua permasalahan tersebut tentunya menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Jawa Timur, melalui berbagai Program Strategis yang berlandaskan visi Jawa Timur yaitu "Nawa Bhakti Satya" untuk menuju "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong".

Dalam penerapan Nawa Bhakti Satya tersebut, Gubernur Jatim telah merumuskan menjadi Bhakti Jatim Sejahtera, Bhakti Jatim Sehat dan Cerdas, Bhakti Jatim Kerja, Bhakti Jatim Akses, Bhakti Jatim Agro, Bhakti Jatim Berkah, Bhakti Jatim Berdaya, Bhakti Jatim Amanah dan Bhakti Jatim Harmoni, contoh untuk Bhakti Jatim Sejahtera merupakan sebuah pengabdian mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang terentaskan dari masalah kemiskinan demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini akan segera terwujud jika produktivitas masyarakatnya meningkat.

Model Peningkatan Produktivitas

Dalam ranah bisnis, peningkatan produktivitas di perusahaan tentu saja sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan usaha (*business sustainability*), maupun untuk memperkuat daya saing perusahaan, melalui berbagai strategi dan program peningkatan produktivitas yang dilakukan di internal perusahaan. Program peningkatan produktivitas di perusahaan idealnya mengikuti rangkaian kegiatan yang dikenal dengan daur (*siklus produktivitas*) yang berkelanjutan, diantaranya: Pengukuran Produktivitas (*Measurement*), Penilaian Produktivitas (*Evaluation*), Perencanaan Produktivitas (*Planning*), dan Peningkatan Produktivitas (*Improvement*).

Program peningkatan produktivitas perlu diawali dan diakhiri dengan kegiatan pengukuran produktivitas untuk mengetahui sampai sejauh mana efektivitas kegiatan peningkatan produktivitas tersebut dilakukan. Kegiatan pengukuran produktivitas antara lain juga bertujuan untuk mengetahui *performance* (kinerja) perusahaan; mengetahui tingkat kesejahteraan tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja dalam menciptakan kekayaan perusahaan; menunjukkan bagian-bagian perusahaan yang mempunyai potensi besar untuk ditingkatkan produktivitasnya dan bagian yang tidak produktif untuk diperbaiki; sebagai alat bagi manajemen untuk mengambil keputusan dalam menanggulangi masalah untuk meningkatkan produktivitas; sebagai indikator perencanaan pengembangan perusahaan; dan mengetahui daya saing perusahaan dibandingkan dengan perusahaan sejenis.

Hasil pengukuran produktivitas dievaluasi, dianalisa masalah dan penyebabnya, kemudian direncanakan program peningkatan produktivitas perusahaan, baik melalui berbagai kegiatan perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement/ Kaizen*) maupun inovasi. Sasaran program peningkatan produktivitas di internal perusahaan secara umum pendekatan pada proses-proses yang tidak menciptakan nilai tambah dengan mengenali tiga dosa besar dan tujuh setan muda. Tiga dosa besar antara lain: Muda adalah berbagai jenis pemborosan, Mura adalah alur proses kerja yang timpang dan tidak seimbang (*unbalance*), dan Muri adalah pembebanan kerja yang berlebihan. Adapun tujuh setan Muda adalah berbagai jenis pemborosan yang terdiri dari: kelebihan produksi, menunggu, transportasi, kehilangan selama proses, penyimpanan, cara kerja, dan barang cacat.

Dalam implementasinya, model peningkatan produktivitas pada perusahaan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Menurut paradigma lama diawali dari pendekatan Konsep Peningkatan Mutu Dan Produktivitas; Penyebaran Konsep; Metode Peningkatan Mutu dan Produktivitas; Aplikasi Praktis; Hasil; dan Evaluasi, sedangkan paradigma baru diawali dari penerapan Aplikasi Praktis; Hasil, Evaluasi, dan seterusnya.

Dalam paradigma baru, penerapan aplikasi praktis (*Action*) dalam peningkatan produktivitas secara berkelanjutan diharapkan mampu membentuk habit (*Behaviour*), mewujudkan Misi dan Visi Perusahaan, dan akhirnya mampu membangun

budaya unggul. Kebanyakan perusahaan yang berhasil memilih aplikasi praktis (Action) sebagai awal penyempurnaan organisasinya. Contoh budaya unggul adalah budaya 'Kaizen'. Diawali dari aktivitas 5R/5S Kaizen sebagai piranti kualitas berguna bagi setiap orang untuk terlibat dalam proses perbaikan. Aktifitas 5R/5S Kaizen sangat efektif sebagai pondasi untuk mengimplementasikan piranti (Tools) peningkatan produktivitas yang lainnya.

Sebenarnya ada dua versi atau alternatif yang dapat dilakukan dalam program peningkatan produktivitas di perusahaan yaitu melalui kegiatan perbaikan berkelanjutan (Continuous Improvement/Kaizen) dan inovasi. Kaizen adalah suatu sistem perusahaan yang komprehensif, berupa aktivitas perbaikan terus menerus untuk mencapai kondisi yang lebih baik, berorientasi pada proses, dan melibatkan seluruh karyawan. Sedangkan inovasi adalah perbaikan yang bersifat dramatis, berbiaya tinggi, dan umumnya pembaruan teknologi. Tetapi pendekatan Kaizen memiliki keunggulan dibandingkan dengan Inovasi adalah: meningkatkan kemampuan karyawan dalam problem solving, membangun team work dan hubungan kerja yang kondusif, membangun partisipasi dan kontribusi karyawan dalam improvement.

Implementasi 5R/5S di Perusahaan

5R/5S Kaizen adalah suatu konsep dan teknik pengendalian mutu kerja & lingkungan tempat kerja yang dilakukan oleh seluruh jajaran karyawan perusahaan/ organisasi dengan menggunakan pendekatan sistem manajemen tata graha (good house keeping). Tujuan implementasi 5R/5S Kaizen adalah untuk menciptakan tempat kerja yang bersih, rapi, aman & nyaman sehingga pada akhirnya akan tercipta budaya kerja produktif, efektif, efisien dan berkualitas. Adapun sifat implementasi 5R/5S Kaizen adalah: suka rela dan partisipasi total, pendekatan pada komunikasi dan hubungan kerja, melalui kelompok kerja (pokja 5R/5S), dan berorientasi pada mutu dan proses kerja. Selanjutnya Implementasi 5R/5S Kaizen yang merupakan pendekatan organisasi tempat kerja, kebersihan dan kenyamanan, dapat memberikan manfaat antara lain: meningkatkan imej perusahaan, meningkatkan produktivitas tempat kerja, mengeliminasi pemborosan waktu dan gerak, mengurangi cacat produksi dan mengurangi biaya kualitas, meningkatkan kenyamanan kerja, meningkatkan moral pekerja.

Adapun pengertian singkat masing-masing R dalam 5R/5S adalah: RINGKAS (Seiri) adalah sisihkan barang yang tidak berguna pada lingkungan kerja dan pindahkan; RAPI (Seiton) adalah susun barang yang berguna dan disimpan dengan baik, sehingga mudah jika digunakan; RESIK (Seiso) adalah bersihkan lingkungan kerja, sehingga lantai, mesin dan peralatan bebas debu; RAWAT (Seiketsu) adalah pelihara lingkungan kerja, sehingga produktif dan menyenangkan dengan cara terus menerus melakukan Ringkas-Rapi-Resik, dan RAJIN (Shitsuke) adalah latih karyawan untuk bekerja lebih baik dan menjadi kebiasaan melaksanakan aturan di tempat kerja.



Prinsip-prinsip penerapan 5R/5S di perusahaan antara lain:

- **Ringkas**: Eliminasi Pemborosan, Manajemen stratifikasi, dan Mengenali penyebab.
- **Rapi**: Penyimpanan fungsional. Segala sesuatu pada tempatnya, dan mengurangi waktu pencarian.
- **Resik**: Kebersihan sebagai spirit kehidupan. Kebersihan adalah inspeksi, dan Eliminasi kerusakan kecil.
- **Rawat**: Visual Manajemen dan Standarisasi.
- **Rajin**: Pembentukan kebiasaan/habit, Kedisiplinan, dan Autonomasi.

Keberhasilan penerapan 5R/5S di perusahaan tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari perspektif pendekatan implementasi 5R/5S, antara lain, perspektif budaya/filosofi, perspektif manajemen, dan perspektif metodologi.



Dari perspektif budaya/filosofi, pada dasarnya implementasi 5R/5S membangun budaya. Diawali dari pembiasaan yang bersifat kewajiban dan keterpaksaan bagi karyawan, kemudian semakin lama menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan yang berulang-ulang tersebut diharapkan akan menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan secara konsisten dilakukan. Nilai-nilai tersebut terinternalisasi menjadi budaya kerja yang unggul.

Dari perspektif Manajemen 5R yaitu bagaimana implementasi 5R/5S dikelola secara sistematis, efektif, terarah sesuai dengan tujuan penerapan. Manajemen 5R/5S meliputi beberapatahapan, antara lain:

- Gerakan Penyadaran 5R (5R Awareness) meliputi: Sosialisasi, Promosi, Edukasi & Pembinaan, membantu korganisasi dan agen 5R.
- Penerapan 5R (5R Implementation) meliputi: Penggunaan Metodologi PDCA (Plan Do Check Action), Standarisasi 5R, dan Dokumentasi Implementasi 5R.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi 5R (5R Monitoring and Evaluation) meliputi audit 5R secara berkala, dan melakukan Program Peningkatan 5R.
- Studi Banding (5R Sharing) meliputi Benchmarking internal maupun eksternal perusahaan
- Penghargaan 5R (5R Awarding) mengikuti berbagai kegiatan kompetisi yang dilakukan oleh internal maupun eksternal perusahaan.

Sedangkan dari perspektif Metodologi yaitu bagaimana implementasi 5R/5S diterapkan sesuai metode yang tepat dan benar dari segi konsep (teori) maupun prakteknya. Metodologi 5R/5S mengacu pada siklus deming PDCA (Plan Do Check Action) secara berkelanjutan, yaitu: Plan (membangun komitmen, mengadakan pelatihan, pembagian area, dan kelompok kerja), Do (identifikasi permasalahan, melakukan pemotretan, dan melaksanakan aktivitas R1, R2, dan R3), Check (melakukan evaluasi), dan Action (standarisasi).



Kompetisi 5R/5S di Jawa Timur

Dalam rangka menggelorakan gerakan peningkatan produktivitas di Provinsi Jawa Timur sekaligus memperingati Bulan Mutu Dan Produktivitas pada bulan Nopember 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Disnakertrans akan mengadakan kegiatan Kompetisi 5R/5S Antar Perusahaan di Jawa Timur, yaitu memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitasnya melalui implementasi 5R/5S. Lebih lanjut tujuan kegiatan tersebut adalah membudayakan gerakan peningkatan kualitas dan produktivitas di perusahaan melalui implementasi 5R/5S dan memberikan apresiasi atas prestasi perusahaan dalam bidang

peningkatan kualitas dan produktivitas.

Rangkaian kegiatan telah diawali dengan sosialisasi dan registrasi sejak bulan Mei 2023 dengan target jumlah peserta kompetisi sebanyak 50 (lima puluh) perusahaan di Jawa Timur yang telah menerapkan 5R/5S di tempat kerjanya, meliputi lima kriteria area yang dapat diajukan, antara lain: Kantor, Produksi, Gudang, Bengkel, dan Lingkungan.

Perusahaan yang mendaftar diseleksi terlebih dahulu dari segi kesesuaian dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai peserta kompetisi. Persyaratan tersebut antara lain: belum pernah mendapat predikat juara umum/menerima trophy, telah menerapkan 5R/5S minimal 2 tahun, luasan area yang dikompetisikan (berkaitan dengan effort yang telah dilakukan), jumlah area yang dikompetisikan, serta kelengkapan dan kualitas bukti/dokumen pendukung.

Kelengkapan dan kualitas bukti/dokumen pendukung merupakan bagian dari pertimbangan penilaian auditor dengan bobot 40%, disamping kunjungan langsung ke tempat kerja (Genba) dengan bobot 60%. Jenis-jenis dokumen pendukung antara lain: Dokumen komitmen dan publikasi implementasi 5S; Struktur Organisasi Implementasi 5S; Jadwal Kegiatan Implementasi 5S; Hasil Inovasi 5S (kondisi sebelum dan sesudah perbaikan); Dampak Implementasi 5S terhadap dimensi PQCSDSME; Standar-standar (S1 sd. S5); Hasil Internal audit 5S; dan lainnya jika ada. Bukti pendukung tersebut diverifikasi oleh tim juri untuk menentukan lolos tidaknya ke tahapan penilaian berikutnya. Tim juri terdiri dari dua orang dari praktisi perusahaan maupun pemerintah.

Perusahaan yang lolos seleksi akan dikunjungi tim juri dan pendamping sekitar awal bulan Agustus 2023 untuk melakukan penilaian (audit) secara langsung. Penilaian secara langsung lebih fokus pada pengamatan visualisasi implementasi 5R/5S di tempat kerja, dari tahapan persiapan, Implementasi R1, R2, R3, R4, sampai dengan R5, mengacu pada siklus deming: PDCA.

Gabungan antara hasil penilaian terhadap dokumen bukti pendukung dengan penilaian kunjungan langsung (genba) menentukan score total akhir penilaian sesuai dengan bobot masing-masing jenis penilaian, dan juga menentukan jenis medali dan penghargaan yang akan diperoleh masing-masing katagori area. Adapun ketentuan score dan penerima medali adalah sebagai berikut: Score 91 sd. 100 mendapat Medali Emas; Score 76 sd 90 mendapat Medali Perak; Score 65 sd. 75 mendapat Medali Perunggu; Score < 64 mendapat Piagam Partisipasi. Sedangkan bagi satu perusahaan yang memperoleh peringkat tertinggi pada semua katagori area, akan dinobatkan sebagai juara umum dan mendapat trofi yang diagendakan diberikan pada bulan Oktober 2023.*

Pencegahan CTD Pekerja Wanita Industri Tembakau

Oleh: Tarisa Mulia Saki, Mahasiswi Unusa Surabaya



Industri tembakau merupakan sektor yang sangat mempengaruhi PDB suatu negara. Rata-rata kontribusi sektor ini antara 27,58% dari total PDB 2001-2008 yang merupakan salah satu industri utama dalam pembangunan. Di Indonesia, industri manufaktur penyumbang perekonomian nasional adalah Industri Hasil Tembakau (IHT). IHT menyumbang andil besar di negara-negara penghasil tembakau termasuk Indonesia. Penerimaan cukai produksi tembakau menanjak 29 kali lipat dari Rp. 1,7 triliun pada tahun 1990 menjadi Rp. 4,99 triliun pada tahun 2008.

Pada saat ini, peran wanita dalam industri tembakau semakin meningkat, sehingga penting untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan ergonomis bagi pekerja wanita. Salah satu tantangan terbesar bagi pekerja wanita di industri tembakau adalah risiko gangguan trauma kumulatif (CTD) atau gangguan akibat beban kerja yang berulang.

CTD merupakan masalah kesehatan serius yang dapat menyebabkan cedera jangka panjang dan ketidaknyamanan pada pekerja. Untuk mencegah CTD dan mengoptimalkan kondisi kerja pekerja wanita di industri tembakau, sangat penting untuk memperhatikan ergonomi kerja.



Secara umum, ergonomi membahas masalah yang terjadi dalam hubungan interpersonal atau pekerjaan yang mereka lakukan dan membantu menciptakan pekerjaan yang lebih efisien, nyaman, aman, sehat dan efektif bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan pekerjaan sambil mendukung keselamatan fisik dan mental.

Dengan mengacu pada SNI 9011:2021, maka terdapat tiga tahap untuk mengetahui potensi bahaya ergonomi pada pekerja tersebut yaitu dengan:

1. Identifikasi gejala awal

Identifikasi awal dilakukan untuk memahami skor keluhan dari kuesioner. Itu juga digunakan untuk mengetahui metode kesamaan dari objek penelitian ini. Persyaratan kuesioner adalah 30% dari ketidaknyamanan keluhan responden (skor >6 atau zona kuning). Wawancara dan observasi menjelaskan bahwa responden mengalami sangat tidak nyaman; rasa sakit di bagian tubuh mereka sering. Skor identifikasi awal adalah 3

2. Pemberian kuesioner gangguan Muskuloskeletal

Pemberian kuesioner untuk mengetahui berapa lama responden bekerja per hari dan hubungannya dengan rasa sakit yang dirasakan pada bagian tubuh mereka dan frekuensinya

3. Evaluasi potensi risiko faktor ergonomi

Evaluasi terhadap potensi bahaya ergonomi yang telah diidentifikasi. Evaluasi ini melibatkan pengukuran dan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap bahaya ergonomi, seperti kekuatan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, frekuensi gerakan, durasi paparan, dan lain sebagainya.

Di salah satu industri hasil tembakau terdapat potensi bahaya ergonomi pada pekerja wanita dengan aktivitas

kerja bagian pasok packing. Di awal shift tenaga kerja membuka terpal yang menutupi bak batangan selanjutnya menyapu lantai, mengambil material yang akan di packing di gudang A menggunakan hand salmand (hand pallet) dengan jarak kurang lebih 50 meter sehari sekali di awal shift saja, mendorong dan menarik kereta Zet B sekitar 60 kali sehari dengan jarak sekitar 5–10 meter, diantara mengelola kereta Zet B tenaga kerja melakukan pekerjaan nyodet reject yaitu menyobek batangan rokok yang reject menggunakan dan memisahkan kertas ambri dengan tembakau, pekerjaan ini dilakukan dengan posisi duduk, pada akhir shift tenaga kerja menyapu area gudang. Waktu kerja sehari adalah 8-9 jam. Adapun hasil penilaian potensi bahaya pada pekerja tersebut yaitu:

menyebabkan sakit punggung dan cedera.

3. Segera istirahat ketika merasa ada beberapa bagian anggota tubuh yang terasa nyeri dan diharapkan tetap bekerja dalam posisi nyaman.

Perlu diketahui bahwa UPT Keselamatan Kerja (K2) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu pemeriksaan/pengujian K3, pelatihan keselamatan Higiene Perusahaan dan Kesehatan kerja, serta pelayanan laboratorium Kesehatan Kerja.

Di Jawa Timur, UPT K2 berhadapan dengan masalah higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang

Daftar Periksa Potensi Bahaya Faktor Ergonomi		
Potensi Bahaya	Durasi Paparan	Skor
Hasil Penilaian Potensi Bahaya Tubuh Bagian Atas :		
Leher yang memuntir > 20° dan / atau leher yang menekuk ke depan > 20°	50-100%	2
Pergelangan tangan: menekuk ke depan atau ke samping	25-50%	2
Jumlah		4
Hasil Penilaian Potensi Bahaya Pada Punggung & Tubuh Bagian Bawah :		
Duduk dalam waktu yang lama tanpa sandaran atau penopang punggung yang memadai	50-100%	2
Jumlah		2
Periksa Pengangkatan Beban Secara Manual:		
Sesekali mengangkat 1-5 kali per menit		1
Sesekali mengangkut (membawa) benda jarak lebih dari 9 meter		2
Jumlah		3
Total Hasil Penilaian		9



Berdasarkan hasil dari daftar periksa potensi bahaya pada pekerja tersebut dapat diberikan saran dan tindakan perubahan sebagai berikut:

1. Alternatif perbaikan untuk pekerja tersebut mencakup penyediaan sarana prasarana yang lebih baik, seperti meja dan kursi kerja ergonomis. Kursi harus memiliki sandaran punggung, lebar kursi lebih besar dari pinggul, dan panjangnya lebih pendek dari lekuk lutut. Posisi duduk sebaiknya mendukung punggung bawah agar menghindari kelelahan dan ketegangan otot.
2. Pekerjaan harus didesain agar menghindari gerakan ekstrem seperti menjangkau atau membungkuk yang dapat menyebabkan kelelahan dan keluhan. Saat mengangkat dan meletakkan benda, penting untuk menjaga posisi tubuh yang benar, seperti berjongkok dengan kaki terkuat di depan dan punggung tegak. Menggunakan lutut sebagai tumpuan saat mengambil atau meletakkan benda juga dianjurkan. Hindari membungkuk atau memutar tubuh saat mengangkat benda, karena teknik yang salah dapat

Program Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas

Oleh: Arif Helmy Mubarak, S.E

Produktivitas merupakan salah satu indikator penting dalam aktivitas ekonomi, produktivitas merupakan daya ungkit (leverage) bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional dalam jangka panjang. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa dewasa ini banyak Negara yang berlomba dalam meningkatkan produktivitas.

Dalam tataran nasional maupun regional produktivitas merupakan salah satu isu pembangunan yang menjadi bagian agenda prioritas pemerintah saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktivitas tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan, salah satu usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui UPT. Balai Latihan Pengembangan Produktivitas adalah melalui kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pembangunan kesadaran pekerja akan pentingnya produktivitas.

Dalam beberapa situasi, hasil pelatihan peningkatan produktivitas belum dapat menampilkan peningkatan produktivitas secara signifikan di perusahaan tempat peserta pelatihan peningkatan produktivitas bekerja. Salah satu contoh masalah yang sering ditemui adalah kurangnya dukungan dari manajemen. Untuk dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka perusahaan perlu diberikan pendampingan langsung oleh instruktur produktivitas melalui bimbingan konsultasi.

Bimbingan Konsultasi adalah salah satu bentuk layanan yang dilakukan oleh UPT. Balai Latihan Pengembangan Produktivitas di Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan produktivitas yang terjadi di dalam perusahaan sehingga meningkatkan kesadaran perusahaan dalam arti pentingnya meningkatkan produktivitas. Diharapkan dengan memberikan bimbingan konsultasi kepada perusahaan, akan mempunyai dampak keberhasilan yang efektif yang menjamin meningkatnya produktivitas perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan.

Konsep Bimbingan Konsultasi

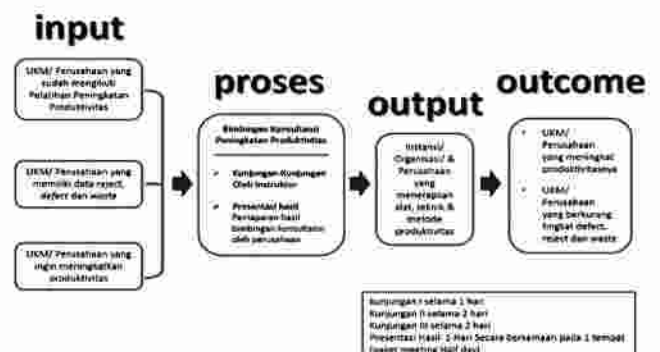
Bimbingan konsultasi adalah proses peningkatan produktivitas melalui pendampingan penerapan alat teknik dan metode peningkatan produktivitas oleh tenaga ahli bidang produktivitas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh instruktur produktivitas yang telah memiliki bekal teknis



peningkatan produktivitas melalui pendidikan dasar instruktur produktivitas.

Pendampingan penerapan alat teknik dan metode peningkatan produktivitas dilakukan secara bertahap dengan metode kunjungan oleh instruktur ke perusahaan agar penerapan alat teknik dan metode peningkatan produktivitas dapat benar-benar dijalankan. Dengan metode ini permasalahan yang menjadi sumber pemborosan perusahaan diharapkan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sehingga prinsip efisiensi dapat tercipta di dalam perusahaan.

Metode peningkatan produktivitas yang mungkin diterapkan untuk meningkatkan produktivitas sangat beragam dari mulai penerapan alat teknik sederhana hingga yang kompleks, pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh tim kecil atau tim yang melibatkan semua orang di perusahaan. Di bawah ini digambarkan kerangka kerja Bimbingan Konsultasi.



Kerangka Kerja Bimbingan Konsultansi

Gambar diatas merupakan kerangka kerja pelaksanaan Bimbingan Konsultansi secara umum. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Konsultansi dimulai dari pemilihan beberapa perusahaan untuk diikutsertakan pada kegiatan Bimbingan Konsultansi. Perusahaan-perusahaan tersebut harus memenuhi kriteria diantaranya adalah sudah pernah mengikuti Pelatihan Peningkatan Produktivitas, bersedia menyampaikan data-data reject, defect atau waste dan yang paling penting adalah memiliki komitmen yang kuat ingin meningkatkan produktivitasnya.

Apabila perusahaan ingin mendapatkan layanan bimbingan konsultansi namun belum dapat mengikuti Pelatihan Peningkatan Produktivitas sebelumnya, maka perusahaan dapat mengajukan diri untuk diikutsertakan pada kegiatan bimbingan konsultansi dengan mengirimkan proposal pengajuan ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi setempat.

Proses pelaksanaan Bimbingan Konsultansi dilakukan dengan cara kunjungan oleh Instruktur/Konsultan Produktivitas ke perusahaan peserta Bimbingan konsultansi. Selama proses kunjungan Instruktur/Konsultan akan mengidentifikasi, memberikan rekomendasi, mengarahkan penerapan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas di perusahaan peserta kegiatan Bimbingan Konsultansi. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penerapan Bimbingan Konsultansi adalah perusahaan-perusahaan yang meningkat produktivitasnya melalui penerapan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas yang tepat.

Pinsip Perbaikan Kerja

a. Pendekatan Terpadu

Di dalam melakukan perbaikan kerja tidak dapat dilakukan parsial, tetapi lebih menekankan kepada kesatuan usaha atau gerak seperti diuraikan di bawah ini:

1) Terpadu dalam melaksanakan pemecahan permasalahan

Sumber permasalahan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan yang pada akhirnya bermuara kepada tingkat produktivitas (efisiensi, efektivitas dan kualitas). Ada enam aspek yang harus diintegrasikan dalam melaksanakan pemecahan permasalahan perbaikan produktivitas yaitu: PQCDMS.

- a) Perbaikan produksi (P)
- b) Perbaikan kualitas (Q)
- c) Pengurangan biaya (Cost) (C)
- d) Perbaikan penyerahan (Delivery) (D)
- e) Perbaikan keselamatan kerja (S)
- f) Perbaikan moral (M)

Dengan perkataan lain, jika memecahkan permasalahan biaya tetapi mengabaikan permasalahan kualitas, delivery, safety dan moral maka dikatakan tidak terpadu.

2) Terpadu dalam memecahkan persoalan organisasi

Agar teknik pemecahan permasalahan peningkatan

produktivitas dapat dilaksanakandenganbaik, diharapkan adanya partisipasi semua pihak dalam organisasi dan hidupnya arus komunikasi dua arah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pihak manajemen tidak boleh hanya menggunakan wewenang sebagai alat melalui perintah tetapi memberikan komitmen yang kuat.

Komitmen manajemen meliputi: Kesiediaan menjadi teladan; Menyediakan waktu untuk turun ke bawah; Menyediakan dana untuk perbaikan; Menyediakan tenaga untuk proyek tim; Memberi dorongan munculnya saran dari bawah dan Memberi dorongan untuk mengadakan perubahan.

3) Terpadu dalam menggunakan piranti (tools)

Piranti yang digunakan meliputi:

- * Fondasi IPI 5S
- * Basic IPI Practical IE (Industrial Engineering), KAIZEN
- * Advanced IPI Total Productive Maintenance, Just In Time

Pada tahap awal memusatkan perhatian pada penerapan teknik sederhana 5S (Good Housekeeping), sampai semua pekerja terbiasa melakukannya pada kegiatan sehari-hari, yang akhirnya menjawai dan menjadi budaya, setelah itu teknik yang lebih tinggi seperti Practical IE dapat diterapkan secara bertahap.

b. Pendekatan Praktikal

Tidak ada pendekatan yang generik, konsultan harus mengembangkan sistem sendiri yang akan dipraktekkan dan disesuaikan dengan keadaan budaya dan kondisi di perusahaan sendiri. Cara satu-satunya menampakkan gagasan-gagasan yang disampaikan ialah dengan melakukannya, mencobanya lalu menyimpulkan hasilnya.

c. Pendekatan Bertahap dan Terus Menerus (Kaizen)

Kaizen adalah mengadakan perubahan kecil-kecil tapi terus menerus, setelah diakumulasi hasilnya akan besar. Jangan mengerjakan pekerjaan yang sama dengan pola kerja yang sama setia phari, selalu mengadakan perubahan dan perbaikan sekalipun kecil.

d. Pendekatan Prioritas

Prioritaskan permasalahan yang akan diselesaikan mulai dari yang mendesak sampai yang tidak mendesak.

e. Pendekatan Motivasi

Pemberian motivasi merupakan salah satu cara untuk melestarikan (menjaga kesinambungan) pelaksanaan suatu kegiatan pemecahan permasalahan agar usaha tersebut secara terus-menerus dapat dilakukan dengan penuh semangat.

Tahapan Bimbingan Konsultansi

Jumlah kunjungan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan perusahaan, idealnya antara 3 sampai 4 kali kunjungan

a. Kunjungan I. Agenda kunjungan pertama adalah:

1) Pertemuan pertama antara Instruktur/Konsultan dengan pimpinan dan pemilik perusahaan;

2) Melakukan Pengamatan Pendahuluan;

3) Pembuatan Kesepakatan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kunjungan ini adalah perlu disepakati sejauh mana keterlibatan Instruktur/ Konsultan dalam proses-proses yang dilaksanakan;

Pada saat melakukan kunjungan pertama dokumen yang digunakan adalah:

- Dokumen kesepakatan.
- Informasi umum perusahaan.

b. Kunjungan II. Agenda kunjungan kedua adalah:

1) Mengidentifikasi permasalahan perusahaan dan membuat rencana aksi atas permasalahan-permasalahan yang ada pada perusahaan kemudian dilakukan identifikasi peluang peningkatan produktivitas di perusahaan secara langsung oleh Instruktur/Konsultan;

2) Menggali permasalahan (diagnosa) bertujuan untuk mencari dan menganalisis akar atau penyebab timbulnya permasalahan supaya dapat dikembangkan cara penanggulangannya.

Kegiatan diagnose dilakukan dengan cara:

- Plant Tour sekaligus meneliti keadaan perusahaan;
- Melakukan wawancara;
- Menyebarkan survey manajemen/kuesioner (apabila diperlukan);
- Mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dokumen yang digunakan pada saat kunjungan kedua:

- Dokumen Rencana Aksi.
- Kuesioner/Survey (jika diperlukan).

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kunjungan kedua adalah:

- Pelaksanaan kunjungan sekurang-kurangnya melibatkan manajemen puncak di perusahaan;
- Instruktur/Konsultan sudah mempersiapkan survey/kuesioner;
- Instruktur/Konsultan memastikan semua data, informasi, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menganalisis sudah berhasil didapat.

c. Kunjungan III. Agenda kunjungan ketiga adalah:

1) Mempresentasikan rekomendasi kepada pimpinan dan pemilik perusahaan;

2) Menunjuk tim penerapan peningkatan produktivitas yang akan bertanggung jawab di dalam implementasi alat, teknik dan metode produktivitas yang akan diterapkan;

3) Melakukan bimbingan implementasi alat, teknik dan metode produktivitas yang dinilai paling tepat oleh Instruktur/Konsultan kepada tim dimaksud di atas;

4) Mempresentasikan dan mendiskusikan jadwal-jadwal rencana implementasi alat, teknik dan metode produktivitas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- Penentuan rekomendasi alat, teknik dan metode produktivitas dilaksanakan setelah Instruktur/ Konsultan melakukan analisis terhadap hasil-hasil pertemuan pada Kunjungan-II;
- Kegiatan analisis dilakukan oleh Instruktur/Konsultan di kantor

- Jadwal rencana penerapan alat, teknik dan metode produktivitas sudah disusun oleh konsultan;
- Pelaksanaan kunjungan dilakukan dengan melibatkan tim peningkatan produktivitas di perusahaan.

Pada saat melakukan kunjungan ketiga dokumen yang digunakan adalah:

- Dokumen rencana aksi.
- Jadwal Rencana Penerapan Alat, Teknik dan Metode Peningkatan Produktivitas.

d. Kunjungan IV. Agenda kunjungan keempat adalah:

1) Melakukan evaluasi dan perbaikan apabila pelaksanaan implementasi alat, teknik dan metode produktivitas dinilai sudah tidak sesuai dengan rencana aksi yang sudah ditetapkan di awal;

2) Melakukan bimbingan implementasi alat, teknik dan metode kepada tim peningkatan produktivitas perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Hasil evaluasi kunjungan keempat dituangkan dalam bentuk laporan, selain sebagai cara penyampaian informasi, laporan mempunyai fungsi yang sangat berarti bagi pihak klien dimana mereka dapat lebih merasakan dampak hasil kerja Instruktur/Konsultan selama proses konsultasi dilaksanakan. Informasi penting yang perlu disampaikan melalui laporan antara lain:

- (1) Fakta baru yang ditemukan untuk perta makalnya.
- (2) Penemuan fakta yang sangat dominan di antara fakta-fakta yang sudah diketahui.
- (3) Penemuan hubungan sebab akibat yang belum diketahui sebelumnya.
- (4) Pemecahan permasalahan.

Pada saat melakukan kunjungan ketiga dokumen yang digunakan adalah:

- Lembar Evaluasi.
- Laporan Peningkatan Produktivitas.

e. Presentasi Hasil

Tahapan Terakhir dari pelaksanaan Bimbingan Konsultasi adalah pemaparan hasil yang didapatkan setelah perusahaan melaksanakan Bimbingan Konsultasi. Pemaparan dilakukan oleh perwakilan perusahaan dilaksanakan pada tempat yang dianggap memadai.*



Jalan Sehat Ketenagakerjaan

Merayakan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, Disnakertrans Jatim menggelar jalan sehat bersama para pemangku kepentingan. Selain diikuti pimpinan dan staf, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia, serikat pekerja/serikat buruh, BPJamsostek Kanwil Jatim dan akademisi. Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo dan Kakanwil BPJamsostek Hadi Purnomo berbaris bersama peserta lain menyusuri rute jalan sehat di sekitar kawasan Dukuh Menanggal Surabaya. Himawan mengaku gembira dengan adanya semangat kebersamaan di sketor ketenagakerjaan. Ia mengakui tantangan pelayanan ketenagakerjaan akan semakin berat, karena harus menyiapkan masyarakat beradaptasi dengan dunia kerja yang baru. Disnakertrans Jatim harus membangun semangat Inspiratif, Kolaboratif dan Inovatif agar mampu memenuhi keinginan masyarakat yang terus berkembang.*



UPT K2 Surabaya Terima Mahasiswa MBKM Unusa



UPT Keselamatan Kerja (K2) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu Pemeriksaan/Pengujian K3, Pelatihan Keselamatan Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, Serta Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kerja. UPT K2 Surabaya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Jawa timur dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satunya menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan atau Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM). Tahun 2023, UPT K2 menerima mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 14 Agustus 2023 sampai 14 Desember 2023. Jam kerja mahasiswa magang mengikuti jam kerja para pegawai di UPT K2, yaitu Senin-Kamis, 08.00-16.00; Jumat, 07.00-16.00. Di setiap hari Jumat, mulai pukul 07.00 hingga pukul 08.00 ada senam Bersama. Jika hari Senin, tetap masuk pukul 08.00 tetapi diawali dengan apel pagi yang dihadiri oleh para pegawai dan jajarannya termasuk mahasiswa magang. Pada minggu pertama dan kedua, mahasiswa magang masih mempelajari struktur organisasi, kebijakan dan prosedur di tempat kerja yang ada di UPT K2. Selanjutnya mahasiswa diikutsertakan untuk mengikuti dan mempelajari cara menganalisis di Laboratorium K3 di UPT K2. Mahasiswa mengikuti analisis HCL, HCOH, debu, logam, SOE, SOA dan lain lain. Selain itu, mahasiswa magang juga diberikan materi terkait kesehatan dan keselamatan kerja dan praktik kerja lapangan. "MB-KM ini salah satu peluang mahasiswa Unusa untuk berkolaborasi dengan UPT K2 mulai dari mempelajari tentang aspek pengujian dan layanan K3 hingga pemecahan masalah melalui inovasi dan pemikiran kritis," kata Rosyid, dosen Pembimbing Lapangan UPT K2.

UPT K2 juga membimbing mahasiswa magang untuk mengerjakan output kegiatan magang selama lima bulan, yaitu artikel ilmiah berupa jurnal yang bisa diterbitkan di situs jurnal nasional ataupun konferensi internasional, Selain itu ada inovasi atau pembaruan yang dibuat oleh mahasiswa yang bisa memberi dampak positif antara mahasiswa dan UPT K2. Semua output dikonsultasikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak dosen pembimbing lapangan UPT K2 dan dosen pembimbing lapangan Unusa. (kiriman Nur Rizqika Salsabilla Putri Adi/Unusa Surabaya)





PEMBUKAAN

**LENSA
SDM PLUS**

KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI CALON TRANSMIGRAN TAHUN 2023



Pelatihan Calon Transmigran

sungguh-sungguh seluruh materi pelajaran dari para instruktur selama berlangsungnya pelatihan, sehingga nantinya dapat diterapkan pada saat di lokasi Transmigrasi. Pemerintah Provinsi Jatim melalui program transmigrasi dan tujuan utama transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun daerah baru guna membuka peluang usaha dan berusaha berkembang serta menciptakan lapangan kerja. *industrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek menghadiri Pembukaan "Pelatihan Berbasis Kompetensi Calon Transmigran Tahun 2023" pada tanggal 22 Agustus 2023, diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur di UPT BLK Wonojati Singosari Kabupaten Malang. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur dan dihadiri oleh 11 Kabupaten di Jawa Timur yang membidangi Program Ketransmigrasian.

Untuk membekali calon transmigran asal Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuannya agar calon transmigran siap dan mampu dalam mengolah potensi yang ada di lokasi permukiman transmigran. Sesuai Surat Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 138 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 226 tahun 2022 tentang Program Penempatan Transmigrasi Tahun 2023, disebutkan bahwa Provinsi Jatim mendapatkan alokasi program penempatan transmigrasi sebanyak 10 KK (Kepala Keluarga) reguler dan 5 KK (Kepala keluarga) luncuran. Mereka akan diberangkatkan menuju daerah penempatan transmigrasi yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Bengkulu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo, saat membuka pelatihan Transmigran di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati Kabupaten Malang, Selasa (22/8/2023), mengimbau kepada seluruh peserta pelatihan/calon transmigran yang akan diberangkatkan agar memperhatikan dan mengikuti secara





Bimbingan Wirausaha Penyandang Disabilitas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Prov Jatim) memberikan pembekalan untuk penyandang disabilitas berupa keterampilan membuat batik. Kegiatan yang diikuti 50 orang ini diselenggarakan di Hotel Harris HR Muhammad Surabaya selama lima hari, mulai 19 Juni 2023. Kepala Disnakertrans Prov Jatim, Himawan Estu Bagijo, mengatakan, keterampilan membuat batik tersebut merupakan keinginan dari penyandang disabilitas agar bisa memiliki keahlian yang berkompeten sehingga nantinya menjadi wirausaha baru.

Untuk menjadikan penyandang disabilitas pembatik, Disnakertrans Prov Jatim bekerja sama dengan AORA (lembaga khusus dan pelatihan) bersinergi dalam upaya memperluas lapangan kerja di sektor informal. Bimbingan wirausaha ini dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan di bidang kewirausahaan. "Tidak berhenti di situ, upaya ini juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi pencari kerja disabilitas," katanya.

Himawan berpesan agar menerapkan ilmu yang telah diperoleh nanti untuk meningkatkan kompetensi berwirausaha. Kemudian selalu junjung tinggi nilai kerjasama dan saling memahami-saling menghargai, baik dalam tim usahanya sendiri maupun dengan pelaku usaha lain, dan selalu temukan cara untuk berkolaborasi, bekerjasama dengan sesama pelaku usaha sehingga embrio usaha yang ada dapat semakin berkembang.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Purwanti Utami mengatakan, bimbingan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas maka bisa meningkatkan jumlah wirausaha baru yang berkualitas. Kemudian menciptakan wirausaha baru dalam satu wadah kelompok usaha bersama yang mandiri, efisien, efektif secara produktif dan beretos kerja tinggi serta mampu membaca peluang pangsa pasar di daerahnya. Peserta dilatih meningkatkan ketrampilan dan keahlian teknis pembuatan batik tulis dan batik shibori dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal (kearifan lokal) dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan dapat menghasilkan produk unggulan di daerahnya.*

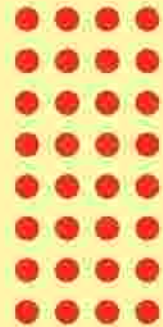




FGD Pengawasan dan Perbaikan Tata Kelola TKBM

Pengawasan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) pelabuhan menjadi perhatian Pemprov Jatim. Pada Juni 2023, Disnakertrans Jatim menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Mendukung Perbaikan Tata Kelola TKBM di Hotel Harris, Jl. HR Muhammad Surabaya. Kegiatan FGD diikuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan, perusahaan dan pelaku UMKM. FGD pengawasan TKBM dilakukan untuk mendorong komitmen bersama TKBM Pelabuhan Tanjung Perak dalam menegakkan disiplin penerapan Budaya K3 di lingkungan pelabuhan. Pengawasan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran atas implementasi budaya K3 agar keselamatan dan kesehatan pekerja terjamin sehingga produktivitas dan efisiensi operasional pelabuhan tetap berjalan dengan baik. Awareness K3 merupakan bagian dari komitmen dalam menjunjung budaya keselamatan kerja di lingkungan pelabuhan, baik untuk internal maupun untuk eksternal.*





Line Dance Merajut Kebersamaan DWP Disnakertrans Jatim

Dalam rangka memperingati 78 tahun Indonesia Merdeka, Ikatan Langkah Dance Indonesia (ILDI) Dharma Wanita Persatuan Disnakertrans Prov. Jatim memersempahkan Line Dance. Aksi yang digelar pada saat pembukaan lomba-lomba Agustusan Disnakertrans Prov. Jatim ini menarik perhatian karena kostum merahnya. Peserta Line dance adakah perwakilan dari sekretariat, bidang dan UPT BLK se-Jatim. Anggota ILDI Jatim melakukan gerak dansa yang energik bersama 120 peserta senam ASN-PTT Disnakertrans Jatim di halaman Disnakertrans Jatim, Kamis (3/8/2023).

Sintarini Mestika Dewi Himawan selaku Ketua DPW Disnakertrans Jatim sekaligus Ketua ILDI Jawa Timur mengatakan, aksi ILDI Jatim bertujuan membangun kebersamaan dan kekompakan dalam melangkah menyukseskan program pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Line Dance menjadi salah satu bagian olahraga pergaulan. "Selaku ketua Dharma Wanita Disnakertrans Jatim, yang memiliki anggota cukup banyak maka upaya kami untuk mempersatukan dengan cara yang bermanfaat dengan 3S yaitu silaturahmi, sehat, senang, bugur dan bahagia," ujarnya. Dengan line dance, akan menjadi sarana mempersatukan dengan rajutan kasih kebersamaan Dharma Wanita membangun perempuan sehat dan bugur dalam lingkup Disnakertrans Jatim.

Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, mengatakan, kehadiran ILDI Jatim dengan gerak langkah yang berayun ke kanan dan ke kiri, kemudian berganti ke depan dan ke belakang sesuai hitungan, membuat ASN-PTT keasyikan dan mengikuti semuanya dengan lancar dan bahagia dengan alunan musik yang rancak. Kekompakan pun tidak hanya tampak dari gerakan yang serasi satu sama lain, tetapi juga kostum atasan kebaya merah celana kulot putih motif batik menambah semarak yang digagas oleh Ketua Dharma Wanita Disnakertrans Jatim dan anggotanya."

